



**Dinas Kelautan  
dan Perikanan**

Prov. Sulawesi Selatan



**RENSTRA**

**2024 - 2026**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 1

Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
  - f. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;

- g. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kerja, dan Tata Ruang;
  - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Dinas Sosial;
  - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. Dinas Ketahanan Pangan;
  - n. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - q. Dinas Perhubungan;
  - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - v. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
  - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - cc. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - dd. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - ee. Badan Pendapatan Daerah;
  - ff. Badan Kepegawaian Daerah;
  - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - ii. Badan Penghubung Daerah; dan
  - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Selain Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) juga memuat renstra Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri Rencana Strategis Biro Lingkup sekretariat daerah dan Rencana Strategis Unit Pengelola Teknis (UPT) Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

- (1) Para Kepala Bidang Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing;

- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 8 September 2023

P. GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Diundangkan di Makassar

pada tanggal 8 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 34

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 52/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru untuk Menyusun RPD 2024-2026 dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dan disusun dengan berpedoman pada RPD. Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dengan penegasan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Kemudian numenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 .

RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berpedoman pada RPD 2024-2026. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada saatnya

nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Semoga RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terimakasih. Semoga Renstra Perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar, 2023  
Kepala Dinas  
  
DR. M. ILYAS, S.T., M.Sc



# **DINAS**

## **KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Jl. Baji Minasa 12 Makassar  
<http://dkp.sulselprov.go.id>  
<http://ppid.sulselprov.go.id>

## DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL                                                                                                   | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                             | ii      |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                 | iv      |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                              | vii     |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                              | x       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                        |         |
| 1.1.Latar Belakang.....                                                                                         | 1       |
| 1.2.Landasan Hukum .....                                                                                        | 4       |
| 1.3.Maksud dan Tujuan .....                                                                                     | 8       |
| 1.4.Sistematika Penulisan .....                                                                                 | 8       |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                   |         |
| 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.....                             | 12      |
| 2.1.1. Tugas dan Fungsi.....                                                                                    | 12      |
| 2.1.2. Struktur Organisasi.....                                                                                 | 15      |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan.....                                                              | 16      |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia.....                                                                                 | 16      |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....                                                                          | 22      |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....                                                        | 28      |
| 2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan.....                                                                           | 50      |
| 2.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 51      |
| 2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....                                                                              | 51      |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                                              |         |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                 | 54      |
| 3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....                                           | 54      |
| 3.1.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....                             | 93      |
| 3.1.3 Telaah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan.....                | 100     |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....                                             | 112        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>                                                  |            |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026..    | 116        |
| 4.2. Cascading Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.....                          | 120        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                          |            |
| 5.1. Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan .....               | 126        |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN<br/>SERTA PENDANAAN.....</b> |            |
|                                                                                   | 132        |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                              |            |
| 7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPD.....                                 | 180        |
| 7.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....                                         | 180        |
| 7.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....                                         | 182        |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>                                                      | <b>192</b> |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>                                                        |            |

## DAFTAR TABEL

|            | Halaman                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1  | Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin..... 29                     |
| Tabel 2.2  | Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan..... 31                          |
| Tabel 2.3  | Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon..... 31                            |
| Tabel 2.4  | Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang ditamatkan..... 32 |
| Tabel 2.5  | Komposisi Diklat PIM Tahun 2018 -2022 ..... 33                                                                         |
| Tabel 2.6  | Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan..... 33                         |
| Tabel 2.7  | Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan 35                                                              |
| Tabel 2.8  | Sarana dan Prasarana Pendukung ..... 38                                                                                |
| Tabel 2.9  | Produksi Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 41                                                               |
| Tabel 2.10 | Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022 42                                                                  |
| Tabel 2.11 | Volume Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019..... 43                                  |
| Tabel 2.12 | Volume Produksi Garam ..... 44                                                                                         |
| Tabel 2.13 | Volume Produksi Olahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... 44                                               |
| Tabel 2.14 | Konsumsi Ikan Kabupaten Kota Tahun 2018-2022..... 46                                                                   |
| Tabel 2.15 | Konsumsi Ikan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... 47                                                                 |
| Tabel 2.16 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022..... 48                                        |
| Tabel 2.17 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... 49                                  |
| Tabel 2.18 | Proporsi Tangkap Ikan yang Berada dalam Batasan Biologi yang Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 49         |
| Tabel 2.19 | Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi ..... 51                               |
| Tabel 2.20 | Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... 53                                                  |
| Tabel 2.21 | Kontribusi PDRB Perikanan Terhadap PDRB SulSel Tahun 2010-2019..... 53                                                 |
| Tabel 2.22 | Peningkatan Produksi dan Nilai Hilirisasi Perikanan Tahun 2018-2022..... 54                                            |
| Tabel 2.23 | Produksi Rumput Laut Perkabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... 55                               |

|            |                                                                                                                                                             |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.24 | Produksi Ekspor dan Kontribusi Eksport Hasil Perikanan Tahun 2018-2022 .....                                                                                | 56  |
| Tabel 2.25 | Luas Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022.....                                                                  | 58  |
| Tabel 2.26 | Luas Lahan Mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                            | 58  |
| Tabel 2.27 | Perkembangan Luas Lahan Mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                               | 59  |
| Tabel 2.28 | Luas Lahan Padang Lamun di Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                        | 59  |
| Tabel 2.29 | Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022.....                                                                      | 60  |
| Tabel 2.31 | Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan (Berdasarkan Gender) dalam mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2018-2022.....             | 61  |
| Tabel 2.32 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan .....                                                                   | 63  |
| Tabel 2.33 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan.....                                                              | 64  |
| Tabel 2.34 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....                                                        | 66  |
| Tabel 2.35 | Kerangka Pendanaan dan Program serta realisasi Tahun 2019-2020 (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006) .....                                                            | 68  |
| Tabel 2.36 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan .....                                                                                       | 71  |
| Tabel 3.1. | Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan....                                           | 73  |
| Tabel 3.2  | Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....                          | 75  |
| Tabel 3.3  | Permasalahan yang Relevan dengan Program dan Kegiatan                                                                                                       | 77  |
| Tabel 3.4  | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan..... | 80  |
| Tabel 3.5  | Sasaran dan Strategis Renstra Kementrian Provinsi Sulawesi Selatan.....                                                                                     | 83  |
| Tabel 3.6  | Hasil Telaahan Struktural Ruang Wilayah.....                                                                                                                | 86  |
| Tabel 3.7  | Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS )                                                                                                    | 103 |
| Tabel 3.8  | Sasaran Strategis Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan                                                                                                    | 106 |
| Tabel 3.9  | Pembobotan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Kajian .....                                                                 | 108 |
| Tabel 3.10 | Skor Kriteria Isu Strategis .....                                                                                                                           | 108 |

|           |                                                                                                                                                |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.....                             | 111 |
| Tabel 4.2 | Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas.....                                                                                    | 113 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....                                                                                             | 114 |
| Tabel 5.2 | Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....                                                                         | 117 |
| Tabel 6.1 | Indikator Tujuan Sasaran dan Program.....                                                                                                      | 123 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.....                                                  | 221 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024-2026..... | 222 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                            |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.1 | Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen RPJMD.....                                         | 3   |
| Gambar 2.2 | Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Provinsi Sulawesi Selatan.....         | 17  |
| Gambar 6.1 | Arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai<br>tugas dan fungsi ..... | 120 |



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki panjang garis pantai + 1.937 km dengan 19 kabupaten/kota memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar terutama pada potensi perikanan laut dan pesisir dan 5 kabupaten/kota memiliki potensi perikanan air tawar atau perairan umum. Namun dengan adanya keterbatasan SDM dalam pengelolaan sumberdaya, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Usaha Perikanan sehingga pengelolaan potensi tersebut belum optimal oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Selatan berupaya agar potensi tersebut dapat dikelola sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku agar sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan dapat lestari dan berkelanjutan. Mengingat perikanan dan kelautan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga sangat logis jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan maritim yang cukup besar jika dimanfaatkan baik mampu mendatangkan devisa daerah.

Tabel 1.1. Sepuluh Negara Produsen Perikanan Laut Dunia Tahun 2020

| No | Nama            | Nilai / Juta Ton |
|----|-----------------|------------------|
| 1  | Cina            | 11,77            |
| 2  | Indonesia       | 6,43             |
| 3  | Peru            | 5,61             |
| 4  | Rusia           | 4,79             |
| 5  | Amerika Serikat | 4,23             |
| 6  | India           | 3,71             |
| 7  | Vietnam         | 3,27             |
| 8  | Jepang          | 3,13             |
| 9  | Norwegia        | 2,45             |
| 10 | Chile           | 1,77             |

Sumber : Laporan Food and Agriculture Organization (FAO), pada tahun 2020

Aktivitas penangkapan ikan laut saat ini menurun secara global, pada tahun 2020, walupun demikian Indonesia masih menjadi produsen kedua terbesar sebagai penghasil produksi perikanan dunia namun untuk mewujudkan perikanan tangkap nasional berkelanjutan, harus dipastikan bahwa laju penangkapan sumberdaya

(stok) ikan tidak melebihi potensi produksi lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY).

Meskipun Indonesia termasuk tiga besar dalam produksi tangkapan ikan setelah China dan Peru, namun perbedaan angkanya masih sangat jauh. China memproduksi sekitar 11,77 juta ton sementara Indonesia hanya sekitar 6,43 juta ton tahun 2020. Provinsi Sulawesi Selatan Secara nasional berkontribusi pada pmengalami pertumbuhan yang signifikan hal ini dapat dilihat pada kinerja tahun 2018 – 2021. Hal ini dapat dilihat dari data statistik KKP dibawah ini.

TABEL 1.1 Provinsi yang berkontribusi besar pada produksi perikanan nasional

| VOLUME (TON)        | 2018         | Peringkat | 2019         | Peringkat | 2020         | Peringkat | 2021         | Peringkat |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| SUMATERA UTARA      | 796,441.93   |           | 1,104,294.07 | VIII      | 746,383.51   | VIII      | 805,877.85   | IX        |
| JAWA BARAT          | 1,438,204.08 | IV        | 1,538,374.72 | IV        | 1,435,458.68 | IV        | 1,513,586.81 | IV        |
| JAWA TENGAH         | 956,601.63   | VIII      | 826,624.43   | X         | 900,829.97   | VII       | 863,438.88   | VII       |
| JAWA TIMUR          | 1,713,892.14 | III       | 1,733,379.79 | III       | 1,688,410.00 | III       | 1,825,181.81 | II        |
| NUSA TENGGARA BARAT | 1,297,287.66 | VI        | 1,365,315.29 | V         | 1,133,997.59 | V         | 1,187,198.59 | V         |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 1,971,746.56 | II        | 1,737,514.60 | II        | 2,344,395.49 | II        | 1,587,871.53 | III       |
| SULAWESI SELATAN    | 3,917,690.97 | I         | 4,052,993.23 | I         | 4,100,367.82 | I         | 4,500,492.82 | I         |
| SULAWESI TENGAH     | 1,441,666.07 | V         | 1,121,150.02 | VI        | 1,112,785.12 | VI        | 899,295.38   | VI        |
| SULAWESI TENGGARA   | 871,571.28   | IX        | 707,411.50   |           | 636,868.05   |           | 660,877.54   |           |
| SULAWESI UTARA      | 870,252.35   | X         | 872,277.49   | IX        | 700,675.81   | IX        | 736,367.42   | X         |
| MALUKU              | 1,273,000.00 | VII       | 1,110,501.71 | VII       | 646,391.65   | X         | 851,600.33   | VIII      |

Namun, kini industri perikanan menghadapi sejumlah risiko baru seperti adanya konflik Rusia-Ukraina dan krisis global akibat perubahan iklim dan karbon. Sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan secara bijak, salah satunya dengan menerapkan Kebijakan *Blue Economy*.

Saat ini ada sejumlah tantangan dan permasalahan mendasar bagi Sulawesi Selatan dalam membangun ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, antara lain adalah : (1) identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan; (2) manajemen pemerintah melalui peraturan dan birokrasi; (3) penurunan nilai investasi; dan (4) kompleksitas permasalahan perikanan, yaitu sumberdaya ikan

yang kian kritis akibat menurunnya kemampuan areal penangkapan, kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu, tingkat pengetahuan dan peralatan nelayan, dan rendahnya kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Kondisi pembangunan sektor kelautan dan perikanan tergambar pada rendahnya kinerja ekspor produk perikanan.

Sekarang ini ekspor mengalami penurunan, perlu dilihat apa dampaknya terhadap nilai perdagangan dan negara-negara tujuan ekspornya. Tekanan inflasi global juga meningkatkan biaya operasional di sebagian besar negara-negara penghasil makanan laut, dan bisa memperburuk akses investasi ke sektor perikanan. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak termasuk dalam lima besar pengekspor ikan. Indonesia bahkan kalah dibanding dengan Vietnam dan Thailand. Nilai ekspor ikan Indonesia baru sekitar US\$ 2,9 juta (Anonim, 2012). Meskipun demikian, secara nasional, kondisi pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2018 - 2022 cukup baik. Hal ini merupakan indikator bahwa sektor perikanan Sulawesi Selatan masih berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 disusun untuk melakukan penyesuaian terhadap paradigma pembangunan, isu dan permasalahan nasional dan global serta tindak lanjut dari pergeseran kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bahwa rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun sesuai Instruksi Presiden nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Renstra masa pejabat sementara dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2026 yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Salah satunya yaitu indikator makro ekonomi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah pertumbuhan produksi perikanan di saat bencana pandemik . Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan prioritas daerah dan merenspon kebijakan pembangunan nasional yaitu mendukung ketahanan pangan, stunting, kemiskinan ekstrim, perubahan iklim dan penurunan emisi karbon. Kemudian untuk mendatangkan devisa daerah maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan, perbaikan tata kelola dan kapasitas pelabuhan perikanan, dukungan kepada sistem pelayaran dan logistik perikanan sehingga mampu menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai **Poros Maritim dan Pintu Gerbang Utama Kawasan Timur Indonesia**.

Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan dan kemaritiman, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi yang ramah lingkungan. Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan daya saing dan pemasaran melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adanya arahan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 oleh pemerintah pusat yaitu **Berbasis Ekonomi Biru** dengan output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan

sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kebijakan tersebut yaitu :

1. Perluasan wilayah konservasi perairan.
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal.
4. Pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak.
5. Pengurangan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, diantaranya : (1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat pemeliharaan; (2) Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada tiga fokus pengembangan, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (fishing technology), penguasaan dan pengembangan pengetahuan terhadap target tangkapan (fish target), dan peningkatan pemahaman terhadap daerah penangkapan ikan (fishingground); (3) Adanya Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas terhadap 7 komoditi unggulan seperti udang, rumput laut, kepiting, cumi-cumi, bandeng, kakap kerapu dan tuna cakalang tongkol sebagai wujud dari Hilirisasi Perikanan dan Kelautan; (4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung; (5) adanya trend dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggungjawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparat pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan.

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen RPD



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja
8. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang TataCara Pertanggungjawaban Kepala Daerah,
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243)
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah,
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 tahun 2022 tentang Rencana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 37 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 38 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
33. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 39 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
34. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Provinsi Sulawesi Selatan, terutama yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan sehingga rumusan program strategis dengan skala prioritas, kebijakan, indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih terarah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, 1) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) pada periode 2024-2026 yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, 2) sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**Bab II** Gambaran Pelayanan OPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode 2024 - 2026 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan serta kelompok sasaran layanan.

**Bab III** Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor yang menganalisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta estetika birokratis yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Bab IV** Tujuan dan Sasaran, memuat uraian tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan menggambarkan langkah - langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian menyajikan Cascadi perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, output, outcome dan indikatornya masing-masing.

**Bab V** Strategi dan Arah Kebijakan, memuat uraian tentang penjelasan yang masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detail bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

**Bab VI** Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

**Bab VIII** Penutup,

An aerial photograph of a flooded coastal area. In the foreground, a long, narrow pier made of wooden planks extends into the water. The planks are painted in a vibrant rainbow pattern, with colors transitioning from red at the bottom to purple, blue, green, yellow, and orange towards the top. At the end of the pier, there is a small, elevated wooden building with a white roof and yellow railings. The surrounding water is a murky, brownish-grey color. In the background, there are some green trees and a distant shoreline. The sky is overcast and grey. The overall scene suggests a coastal area affected by flooding or a storm.

## **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN**

## **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka tugas dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelautan dan Pesisir;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Budidaya dan Daya Saing Produk;
- f. Bidang Pengawasan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang dan Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kelautan dan Pesisir, Budidaya dan Daya Saing, Perikanan Tangkap dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan pembentukan dan klasifikasinya mengacu pada Permendagri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun Cabang Dinas Kelautan yang terbentuk sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan yang berkedudukan :

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Bidang Teknis dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelayanan dan pelaksanaan tugas UPTD maka dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. Penjelasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.Pan/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan;
  - pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 36 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah I dan II pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

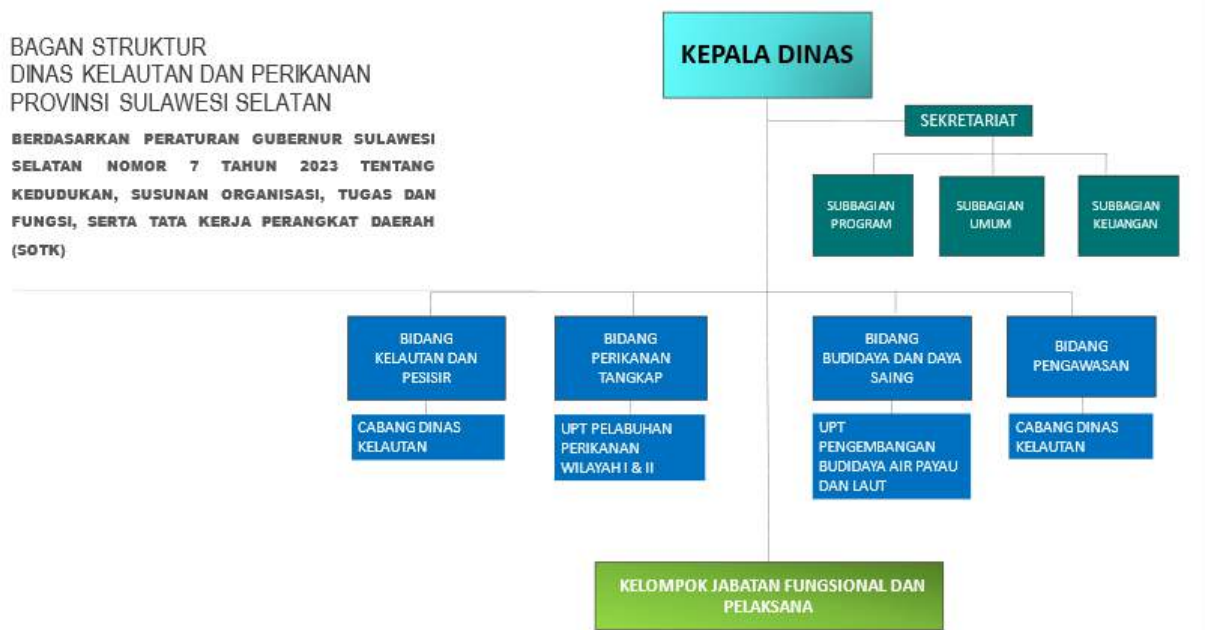
- Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan;
  - pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayananpengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk hasil perikanan;
  - pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan SNI produk perikanan pada produk hasil perikanan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan SNI pada produk hasil perikanan;
  - pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis maka Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 SubBagian
3. Bidang sebanyak 4 Unit
4. UPT sebanyak 4 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi
5. Kepala CDK sebanyak 7 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**



Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjalankan amanah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh Unit Pelayanan Teknis sebanyak 4 unit dan Cabang Dinas Kelautan sebanyak 7 unit kerja. Setelah terbentuknya Cabang Dinas yang tersebar di wilayah kabupaten/kota maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembinaan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, namu dalam melaksanakan tata kelola tugas dan fungsi masih terkendala dengan SDM yang terampil dan sarana prasana sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja

pelayanan yaitu berdasarkan hasil analisis peta jabatan maka Dinas Kelautan dan Perikanan masih kekurangan pegawai.

## 2.2.Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

### 2.2.1 SumberdayaManusia

- a. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat dan didukung 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin**

| Unit Kerja                          | PNS  |        | Jumlah | Non PNS |        | Jumlah |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                     | Pria | Wanita |        | Pria    | Wanita |        |
| Kepala Dinas                        | 1    | 0      | 1      | -       | -      | 1      |
| Sekretariat                         | 19   | 24     | 43     | 19      | 10     | 29     |
| Bidang PPRLP3K                      | 4    | 8      | 12     | -       | 3      | 3      |
| Bidang Perikanan Tangkap            | 5    | 5      | 10     | 1       | 1      | 2      |
| Bidang Pengawasan SDKP              | 6    | 5      | 11     | -       | 2      | 2      |
| Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP | 6    | 7      | 13     | -       | 2      | 2      |
| CDK Kep. Selayar                    | 4    | 1      | 5      | 3       | 1      | 4      |
| CDK Pangkajene dan Kepulauan        | 7    | 3      | 10     | 7       | 2      | 9      |
| CDK Luwu Raya                       | 5    | 4      | 9      | 3       | 2      | 5      |
| CDK Ajatappareng                    | 5    | 2      | 7      | 4       | 1      | 5      |
| CDK Bosowasi                        | 3    | 4      | 7      | 4       | 3      | 7      |
| CDK. Wilayah Selatan                | 2    | 4      | 6      | 7       | 1      | 8      |
| CDK Mamminasata                     | 6    | 3      | 9      | 6       | 2      | 8      |
| UPT PP Wilayah I                    | 4    | 3      | 7      | 8       | 5      | 13     |
| UPT PP Wilayah II                   | 10   | 0      | 10     | 6       | 8      | 14     |
| UPT BPMPP                           | 3    | 8      | 11     | 6       | 8      | 14     |
| UPT PBAP                            | 7    | 3      | 10     | 12      | 2      | 24     |
| Fungsional                          | 3    | 4      | 7      | -       | -      | 0      |
| Dipekerjakan                        | 0    | 1      | 1      | -       | -      | 0      |
| Jumlah                              | 100  | 89     | 189    | 86      | 53     | 139    |

- b. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dibarengi dengan system karier yang baik. Tapi sebelumnya harus dilakukan analisis beban kerja. Kepala Dinas harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun system karier dalam jabatan, sesuai dengan amanat UU No.5/2014 tentang ASN. Karier PNS berbasis pada system merit yang lebih terbuka, adil, transparan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta integritas, dan moralitas yang baik.

**Tabel 2.3.**

**Komposisi PNS Menurut Golongan**

| No | Jabatan       | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|----|---------------|---------------|-----------|-----------|
|    |               | Pria          | Wanita    |           |
| 1  | Eselon II     | 1             | -         | 1         |
| 2  | Eselon III    | 12            | 4         | 16        |
| 3  | Eselon IV     | 24            | 8         | 32        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>37</b>     | <b>12</b> | <b>49</b> |

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

- c. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan
- Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 tercatat sebanyak 189 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Doktor (S3). Adapun komposisi sebagai berikut.

**Tabel.2.4.**

**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |        | Jumlah |
|----|--------------------|---------------|--------|--------|
|    |                    | Pria          | Wanita |        |
| 1  | S3                 | 3             | 2      | 5      |
| 2  | S2                 | 27            | 25     | 52     |
| 3  | S1                 | 49            | 59     | 108    |

|   |               |            |           |            |
|---|---------------|------------|-----------|------------|
| 4 | Sarjana Muda  | 6          | 0         | 6          |
| 5 | SLTA          | 14         | 3         | 17         |
| 6 | SLTP          | 0          | 0         | 0          |
| 7 | SD            | 1          | 0         | 1          |
|   | <b>Jumlah</b> | <b>100</b> | <b>89</b> | <b>189</b> |

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

- d. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikuti Diklat PIM Tahun 2018-2022. Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018–2022 sebanyak 38 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun komposisinya sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**

**Komposisi Diklat PIM Tahun 2018-2022**

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |          | Jumlah    |
|----|--------------------|---------------|----------|-----------|
|    |                    | Pria          | Wanita   |           |
| 1  | Diklat PIM II      | 1             | -        | 1         |
| 2  | Diklat PIM III     | 13            | 1        | 14        |
| 3  | Diklat PIM IV      | 17            | 6        | 23        |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>31</b>     | <b>7</b> | <b>38</b> |

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan PROVINSI Sulawesi Selatan Tahun 2022

- e. Kebutuhan ASN Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel.

Berdasarkan Analisa terhadap kebutuhan ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat deviasi antara kebutuhan dengan jumlah ASN yang tersedia saat ini sebagaimana table 2.6

**Tabel 2.6.**

**Jumlah Sebaran dan Kebutuhan ASN Lingkup DKP SulSel**

| No | Bidang/Unit                                          | Tersedia | Kebutuhan | Selisih |
|----|------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 1  | Kepala Dinas                                         | 1        | 1         | 0       |
| 2  | Sekretariat                                          | 42       | 77        | 35      |
| 3  | Bidang PPRLP3K                                       | 11       | 16        | 5       |
| 4  | Bidang Perikanan Tangkap                             | 12       | 17        | 5       |
| 5  | Bidang Pengawasan SDKP                               | 11       | 15        | 4       |
| 6  | Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP                  | 13       | 16        | 3       |
| 7  | CDK Kep. Selayar                                     | 5        | 25        | 20      |
| 8  | CDK Pangkajene dan Kepulauan                         | 10       | 29        | 19      |
| 9  | CDK Luwu Raya                                        | 9        | 26        | 17      |
| 10 | CDK Ajatappareng                                     | 7        | 26        | 19      |
| 11 | CDK Bosowasi                                         | 7        | 41        | 34      |
| 12 | CDK. Wilayah Selatan                                 | 6        | 32        | 26      |
| 13 | CDK Mamminasata                                      | 9        | 32        | 23      |
| 14 | UPT PP Wilayah I                                     | 8        | 57        | 49      |
| 15 | UPT PP Wilayah II                                    | 10       | 57        | 47      |
| 16 | UPT BPMPP                                            | 11       | 36        | 25      |
| 17 | UPT PBAP                                             | 10       | 45        | 35      |
| 18 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda       | 0        | 4         | 4       |
| 19 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya      | 1        | 3         | 2       |
| 20 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda       | 0        | 4         | 4       |
| 21 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya      | 0        | 3         | 3       |
| 22 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda  | 0        | 4         | 4       |
| 23 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya | 2        | 4         | 2       |
| 24 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda             | 0        | 3         | 3       |
| 25 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya            | 2        | 3         | 1       |
| 26 | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda                   | 0        | 3         | 3       |

|              |                                                  |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 27           | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya              | 0          | 3          | 3          |
| 28           | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda      | 0          | 3          | 3          |
| 29           | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya     | 0          | 3          | 3          |
| 30           | Analisis Kebijakan Ahli Muda                     | 0          | 1          | 1          |
| 31           | Analisis Kebijakan Ahli Madya                    | 0          | 1          | 1          |
| 32           | Perencana Ahli Muda                              | 0          | 3          | 3          |
| 33           | Perencana Ahli Madya                             | 1          | 2          | 1          |
| 34           | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda  | 0          | 2          | 0          |
| 35           | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | 0          | 1          | 1          |
| 36           | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda        | 0          | 3          | 3          |
| 37           | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya       | 0          | 3          | 3          |
| 38           | Arsiparis Ahli Muda                              | 1          | 3          | 2          |
| 39           | Arsiparis Ahli Madya                             | 0          | 2          | 2          |
| <b>Total</b> |                                                  | <b>189</b> | <b>609</b> | <b>418</b> |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan PROVINSI Sulawesi Selatan Tahun 2022

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana (Aset) yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

**Tabel. 2.7**

**Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan**

| No. | Jenis Aset              | Status (Kondisi) |        |             | Jumlah |
|-----|-------------------------|------------------|--------|-------------|--------|
|     |                         | Baik             | Sedang | Rusak Berat |        |
| 1   | PPI Pelabuhan Perikanan | 10               | 7      | -           | 17     |
| 2   | SPDN                    | 2                |        | 2           | 4      |
| 3   | Dempon Tambak           | 15               | -      | -           | 14     |

|    |                                     | Status (Kondisi) |    |     |     |
|----|-------------------------------------|------------------|----|-----|-----|
| 4  | Gedung Konservasi                   | 2                | 2  | -   | 4   |
| 5  | Kantor UPT                          | 2                | 2  | -   | 4   |
| 6  | Kantor CDK                          | 4                | 3  | -   | 7   |
| 7  | Laboratorium                        | 1                | -  | 2   | 3   |
| 8  | Kolam Perbenihan Budidaya Payau     | 4                | 4  | -   | 8   |
| 9  | Kolam Perbenihan Budidaya Air Tawar | 8                | -  | -   | 8   |
| 10 | Kolam Pendederan Budidaya Payau     | 4                | -  | -   | 4   |
| 11 | Kolam Pendederan Budidaya Air Tawar | 3                | -  | 1   | 4   |
| 12 | Kendaraan Operasional (Mobil)       | 16               | 3  | 19  | 38  |
| 13 | Kendaraan Operasional (Motor)       | 9                | 15 | 106 | 130 |
| 14 | Kantor Pelayanan Pengujian Mutu     | 1                | -  | -   | 1   |
| 15 | Speed Boat                          | 5                | -  | -   | 2   |
| 16 | Pos Pengawas                        | 20               | 30 | 10  | 60  |
| 17 | Tanah Bangunan Perumahan            | 12               | 5  | 3   | 20  |

Sumber : Data Asset UKH DKP

Pengelolaan aset telah menjadi tanggung jawab unit kerja yang sesuai dengan tugas fungsi yaitu :

#### **A. Bidang Perikanan Tangkap**

##### **1. Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan Perikanan adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya : a) tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan, b) sebagai sarana bengkel untuk perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap ikan, c) sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan, d) disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pemasaran Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran, sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil verifikasi BPKP, terdapat 19 unit Pelabuhan Perikanan (Tipe D) yang ada di 15 Kabupaten/kota

yang diserahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi operasional sebanyak 13 unit, dan tidak beroperasi sebanyak 6 unit. Secara detail jumlah Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan seperti pada tabel 2.8 .

**Tabel 2.8**

**Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan**

| No | Nama Pelabuhan Perikanan         | Lokasi            | Kelas / Type | Kewenangan                                    |
|----|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|    |                                  | Kab /Kota         |              |                                               |
| 1  | Pelabuhan Perikanan Untia        | Kota Makassar     | PPN/B        | Kewenangan Pusat                              |
| 2  | Pelabuhan Perikanan Paotere      | Kota Makassar     | PPI / D      | Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)        |
| 3  | Pelabuhan Perikanan Bontobahari  | Kab. Maros        | PPI / D      | Tdk Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)    |
| 4  | Pelabuhan Perikanan Labuang      | Kab. Maros        | PPI / D      | Operasional/TPI (Kewenangan Kab/Kota)         |
| 5  | Pelabuhan Perikanan Maccini Baji | Kab. Pangkep      | PPI / D      | Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)        |
| 6  | Pelabuhan Perikanan Cempae       | Kota Parepare     | PPI / D      | Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)        |
| 7  | Pelabuhan Perikanan Lonrae       | Kab. Bone         | PPI / D      | Operasional / P3D (Kewenangan Provinsi)       |
| 8  | Pelabuhan perikanan Bone Pute    | Kab.Luwu          | PPI / D      | Tdk Operasional / P3D (Kewenangan Provinsi)   |
| 9  | Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo      | Kab. Luwu         | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 10 | Pelabuhan Perikanan Balambang    | Kab. Luwu         | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 11 | Pelabuhan Perikanan Pontap       | Kota Palopo       | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 12 | Pelabuhan Perikanan Malili       | Kab. Luwu Timur   | PPI / D      | Tdk Operasional/TPI (Kewenangan Kab/Kota)     |
| 13 | Pelabuhan Perikanan Lappa        | Kab. Sinjai       | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 14 | Pelabuhan Perikanan Kajang       | Kab. Bulukumba    | PPI / D      | Operasional /P3D (Kewenangan Provinsi)        |
| 15 | Pelabuhan Perikanan Bontobahari  | Kab. Bulukumba    | PPI / D      | Operasional /P3D (Kewenangan Provinsi)        |
| 16 | Pelabuhan Perikanan Birea        | Kab. Bantaeng     | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 17 | Pelabuhan Perikanan Tanrusampe   | Kab. Jeneponto    | PPI / D      | Operasional Musiman/P3D (Kewenangan Provinsi) |
| 18 | Pelabuhan Perikanan Beba         | Kab. Takalar      | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 19 | Pelabuhan Perikanan Barombong    | Kab. Gowa         | PPI / D      | Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)         |
| 20 | Pelabuhan Perikanan Bonehalang   | Kab. Kep. Selayar | PPI / D      | Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)        |

| No | Nama Pelabuhan                       | Lokasi     | Kelas / |                                            |
|----|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|
| 21 | Pelabuhan perikanan Polejiwa         | Kab. Barru | PPI / D | Tdk Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi) |
| 22 | Pelabuhan perikanan Sumpang Binangae | Kab. Barru | PPI / D | Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)     |

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap dan Laporan Tahunan 2021

## 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan dimana aset tersebut sudah diserahkan ke provinsi yaitu sebagai berikut :

1. SPDN Pelabuhan Perikanan Beba Kabupaten Pangkep 1 unit
2. SPDN Pelabuhan Perikanan Kajang Kabupaten Bulukumba 1 unit
3. SPDN Pelabuhan Perikanan Lonrae Kabupaten Bone 1 unit
4. SPDN Pelabuhan Perikanan Lonrae Kota Palopo 1 unit
5. SPDN Pelabuhan Perikanan Lonrae Kabupaten Luwu 1 unit

Adapun jumlah SPDN yang ada di Prov Sulsel (Status kepemilikan dan kondisi SPDN) disajikan pada tabel dibawah ini .

**Tabel 2.9**  
**Jumlah SPDN Provinsi Sulawesi Selatan**

| No | NO SPBUN REG | PENGELOLA SPBUN<br>PT/CV/UD/KOPERASI   | LOKASI         |                  |               | Operasional/Tidak<br>Operasional | KETERANGAN |                |
|----|--------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------|
|    |              |                                        | Kota/Kab       | Kecamatan        | Kelurahan     |                                  | TERINPUT   | BELUM<br>INPUT |
| 1  | 789.29.04    | Koperasi Pemasaran Nelayan Mina Bahari | Luwu Timur     | Mallu            | Wewangriu     | Operasional                      | √          | -              |
| 2  | 789.27.02    | Koperasi Mitara Mina Bahari            | Bone           | T Riantang Timur | Lonrae        | Operasional                      | √          | -              |
| 3  | 78.927.03    | CV. Prima Tama                         | Bone           | Barebbo          | Watu          | Operasional                      | √          | -              |
| 4  | 78.927.04    | CV Harapan Daerah                      | Bone           | Kajua            | Tarasu        | Operasional                      | √          | -              |
| 5  | 79.919.01    | KSU Dewi Sartika                       | Palopo         | Wara Timur       | Pongalae      | Operasional                      | √          | -              |
| 6  | 75.928.01    | CV. Tenri Jaya Niaga                   | Selayar Kep    | Benteng          | Benteng       | Tidak beroperasi                 | √          | -              |
| 7  | 78.906.03    | Perumda Mappatuwo                      | Pangkajene Kep | Labakkang        | Pandata Baji  | Operasional                      | √          | -              |
| 8  | 78.926.01    | KUD Mina Lappa                         | Sinjai         | Sinjai Utara     | Lappa         | Operasional                      | √          | -              |
| 9  | 78.926.02    | PT. Alkan Cipta Anugrah                | Sinjai         | Sinjai Utara     | Lappa         | Operasional                      | √          | -              |
| 10 | 78.926.03    | Koperasi Nelayan Harapan Jaya          | Sinjai         | Sinjai Timur     | Tongke Tongke | Operasional                      | √          | -              |
| 11 | 78.901.03    | PT. Mitra Berkah Mandiri               | Makassar       | Biringkanayya    | Untia         | Operasional                      | √          | -              |
| 12 | 79.919.02    | Koperasi Kunsumen Karya Mario          | Luwu           | Poirang          | Tironau       | Operasional                      | √          | -              |
| 13 | 78.925.02    | CV. Windu Bahari                       | Bulukumba      | Kajang           | Tanah Jaya    | Operasional                      | √          | -              |
| 14 | 78.922.04    | KSU Rabiah Mandiri Banyuwana           | Takalar        | Sanrobone        | Laganuda      | Operasional                      | √          | -              |

|    |           |                                   |                 |                   |                     |             |   |   |
|----|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|---|---|
| 15 | 79.929.02 | Koperasi Bahari Indah             | Luwu Timur      | Wotu              | Bawalipu            | Operasional | √ | - |
| 16 | 76.919.03 | Koperasi Nelayan Samudera Ulu ulu | Luwu            | Belopa            | Ulu Ulu             | Operasional | √ | - |
| 17 | 78.919.03 | FT. Nirwana Trimedia Gas          | Luwu            | Larompong Selatan | Bonepute            | Operasional | √ | - |
| 18 | 78.905.05 | SPDN Mina Bonto Bahari            | Maros           | Bontos            | Pajukukang          | Operasional | √ | - |
| 19 | 78.905.06 | Koperasi Mina Rezy                | Maros           | Bontos            | Pajukukang          | Operasional | √ | - |
| 20 | 79.905.03 | SPDN Koperasi Mario Nusantara     | Maros           | Tunikale          | Labuang             | Operasional | √ | - |
| 21 | 78.905.01 | CV. Energi Prima                  | Maros           | Maros Baru        | Lingk.Data          | Operasional | √ | - |
| 22 | 78.905.02 | SPBU-N Baji Pamai                 | Maros           | Maros Baru        | Borikamase          | Operasional | √ | - |
| 23 | 78.906.01 | CV. Eka Jaya                      | Pangkep         | Pangkajene        | Mappasale           | Operasional | √ |   |
| 24 | 78.906.02 | CV Cahaya Solo                    | Pangkep         | Pangkajene        | Tukulabbua          | Operasional | √ |   |
| 25 |           | CV. Ananda Utama                  | Bulukumba       | Bontobahari       |                     | Operasional | √ |   |
| 26 | 79.901.01 | Koperasi Nelayan Insan Perikanan  | Makassar        | Ujung Tanah       | Sabutung            | Operasional | √ |   |
| 27 |           | Koperasi Kencana Bahari           | Ujung Bulu      |                   |                     | Operasional | √ |   |
| 28 |           | Cv Saputra Jaya                   | Calon Pembangun |                   | Proses Administrasi |             | √ |   |
| 29 |           | PT Mitra Berkah Mandiri           | Calon Pembangun |                   | Proses Membangun    |             | √ |   |
| 30 |           | KUD Mattoangng                    | Calon Pembangun |                   | Proses Membangun    |             | √ |   |
| 31 |           | PT. Tri Karya Selatan             | Calon Pembangun |                   | Proses Administrasi |             | √ |   |
| 32 |           | PT. Almira Nusa Raya              | Calon Pembangun |                   | Proses Administrasi |             | √ |   |
| 33 |           | Koperasi Nelayan Tukulabbua       | Calon Pembangun |                   | Proses Membangun    |             | √ |   |

## 1. DemponTambak

Sarana Dempon tambak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun peranan sarana tersebut adalah :

- Tempat uji coba teknologi budidaya
- Tempat pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemerintah dan swasta untuk berusaha di bidang perikanan tambak
- Sarana pembelajaran bagi petugas perikanan budidaya dalam peningkatan kinerjanya

## 2. Sarana Perikanan Budidaya Payau danLaut

Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut terdapat di kabupaten Barru, yang peranannya adalah:

- Sarana uji coba pembenihan udang untuk spesies atau jenis udang tertentu
- Sarana pengkajian terhadap tingkat produktivitas dan kelangsungan hidup budidaya payau dan laut.
- Sarana pelatihan, pembinaan petugas pemerintah dan swasta yang memiliki usaha dibidang pembenihanudang

- d. Sarana pembelajaran bagi petugas BPU dalam peningkatan kinerjanya
- e. Sebagai unit produksi benur udang yang berkualitas

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut yaitu:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Kantor UPT               | 1 unit                 |
| 2. Kendaraan operasional    | 1 unit                 |
| 3. Bangsal Pembenihan       | 4 unit                 |
| 4. Kolam perbenihan         | 60 unit                |
| 5. Laboratorium             | 1 unit (kondisi rusak) |
| 6. Rumah Dinas Pegawai      | 6 unit                 |
| 7. Musholla                 | 1 unit                 |
| 8. Ruang Genset             | 1 unit                 |
| 9. Gedung Pengolahan Limbah | 1 unit                 |
| 10. Gedung Pertemuan        | 1 unit                 |

### 3. Instalasi Pengembangan Budiaya AirTawar

Sarana Pengembangan Budidaya Air Tawar (Instalasi Lajoa) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Soppeng dan pengembangannya didukung Lima (5) Kabupaten/Kota, masing-masing yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa. Adapun peranannya adalah:

- Sarana uji coba teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar
- Sarana Pelatihan dan Pembinaan kegiatan budidaya air tawar
- Sarana pemurnihan benih ikan air tawar untuk menghasilkan bibit ikan dan calon induk unggul dan tahan terhadap penyakit

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di Instalasi Lajoa yaitu :

|                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Kantor Instalasi                                                                                                                      | 1 unit |
| 2. Kolam perbenihan                                                                                                                      | 4 unit |
| 3. Kolam pendederan                                                                                                                      | 4 unit |
| 4. Kantor Pembinaan Usaha dan Kelembagaan                                                                                                | 1 unit |
| 5. Guest house                                                                                                                           | 2 unit |
| 6. Sarana produksi untuk kebutuhan Restocking dan pemenuhan calon induk untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BBI local Kabupaten/Kota. |        |

### 4. Sarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Balai Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan, yang berlokasi di kota Makassar adapun aset-aset yang berperan dalam pengembangan produk dan pelayanan mutu adalah:

- 1. Sarana pengujian terhadap mutu hasil perikanan,
- 2. Sarana pengkajian terhadap mutu hasil pengolahan modern dan

- tradisional hasil perikanan,
3. Sarana pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan,
4. Sarana pelatihan dan pembelajaran bagi petugas pemerintah dan swasta yang menangani hasil perikanan.

## 5. Depo

Disamping Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan tersebut diatas, juga dilengkapi dengan Depo 1 unit yang peranannya adalah sarana penyimpanan produksi hasil perikanan terutama pada saat ikan/udang mengalami panen puncak yang berlokasi di Kabupaten Barru.

## C. Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian

Unit perlindungan, pengawasan dan pengendalian melaksanakan tugas pada usaha penangkapan dan budidaya. Khusus untuk pelaksanaan tugas pada kegiatan penangkapan, unit ini dilengkapi dengan kapal pengawasan perikanan. Dalam kegiatan tugas pengawasan dilaut, petugas perikanan sering bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan Laut, terutama pada saat operasi lapangan dilakukan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana pengawasan pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

| No | Sarana/Prasarana | Jumlah (Unit) |     | Keterangan                                |
|----|------------------|---------------|-----|-------------------------------------------|
|    |                  | Asset         | P3D |                                           |
| 1  | Pos Pengawas     | 2             | 12  | Kondisi P3D rata-rata dalam keadaan rusak |
| 2  | Kapal Pengawasan | 6             | 2   | Kapal yang P3D dalam Kondisi rusak        |

Sumber : Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya KP dan Laporan Tahunan 2021

## D. Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Perlindungan Laut

Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetic serta mendorong penguatan fungsi otoritas pengelola konservasi sumberdaya ikan maka telah dibangun prasarana Konservasi di beberapa kabupaten yaitu:

1. Gedung Konservasi di Kabupaten Pangkep 1 unit
2. Gedung Konservasi di Kabupaten Barru 1 unit
3. Gedung Konservasi di Kabupaten Luwu Utara 1 unit
4. Gedung Konservasi di Kabupaten Selayar 1 unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

#### **2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan**

Capaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi (IKK) dan target indikator lainnya yaitu:

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (T-C. 23)**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD                                              | Target SPM | Target IKK                                    | Target Indikator Lainnya                                | Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun |         |         |         |         | Realisasi Capaian Tahun ke - |         |         |         |         | Rasio Capaian pada Tahun ke - |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                            |            |                                               |                                                         | 2018                                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2018                         | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 1                             | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                                                        | (3)        | (4)                                           | (5)                                                     | (6)                                               | (7)     | (8)     | (9)     | (10)    | (11)                         | (12)    | (13)    | (14)    | (15)    | (16)                          | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I   | <b>PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                             |            |                                               |                                                         |                                                   |         |         |         |         |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
| 1   | Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi | --         | Jumlah Produksi Perikanan (1000 ton)          | Jumlah Produksi Perikanan                               | 3,349.1                                           | 3,517.3 | 4,145.8 | 4,906.6 | 5,117.4 | 3,786.8                      | 3,941.7 | 4,262.6 | 3,935.5 | 4,061.3 | 2,18                          | 2,17 | 2,20 | 1,97 | 1,87 |
|     |                                                                                            |            |                                               | Produksi Perikanan Budidaya (1000 ton)                  | 3,051.0                                           | 3,216.2 | 3,841.7 | 4,599.5 | 4,656.9 | 3,476.5                      | 3,629.3 | 3,902.8 | 3,568.9 | 3,662.8 |                               |      |      |      |      |
|     |                                                                                            |            |                                               | Produksi Perikanan Tangkap (1000 ton)                   | 298.1                                             | 301.1   | 304.1   | 307.1   | 369.4   | 310.3                        | 312.4   | 359.8   | 366.5   | 398.6   | 1,4                           | 1,13 | 1,02 | 0,78 | 0,79 |
| a.  |                                                                                            |            |                                               |                                                         |                                                   |         |         |         |         |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
|     |                                                                                            |            |                                               | Jumlah produksi garam rakyat (ton)                      |                                                   |         | 45.846  | 46.500  | 47.500  |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
|     |                                                                                            |            | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) |                                                         | 8.4                                               | 4.2     | 4.6     | 5.1     | 8.4     |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
| 2   | Meningkatnya Konsumsi Ikan                                                                 |            | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/ Kap/th)             |                                                         | 45.2                                              | 45.6    | 46.1    | 46.5    | 57.02   | 49.7                         | 52.5    | 55.2    | 56.3    | 64.7    | 1,10                          | 1,15 | 1,20 | 1,21 | 1,13 |
|     |                                                                                            |            |                                               | Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan (Rp.M) | 293,120                                           | 304.96  | 311,06  | 317.28  | 293,120 |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
|     |                                                                                            |            |                                               | Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)    | 5.332,1                                           | 7.051,7 | 8.109,5 | 9.325,9 | 5.332,1 |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
|     |                                                                                            |            |                                               | Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)          | 20%                                               | 20%     | 20%     | 20%     | 20%     |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |
| 3   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan                  |            | Nilai Tukar Nelayan                           |                                                         |                                                   | 107     | 101.59  | 102.60  | 103.63  |                              |         |         |         |         |                               |      |      |      |      |

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD |                                                                                              | Target SPM | Target IKK                                                                                     | Target Indikator Lainnya                                                        | Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke - |       |      |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke - |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|------|-------|-------|-------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                               |                                                                                              |            |                                                                                                |                                                                                 | 2018                                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2018                         | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 1                             | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) |                                               | (2)                                                                                          | (3)        | (4)                                                                                            | (5)                                                                             | (6)                                               | (7)    | (8)    | (9)    | (10)   | (11)                         | (12)  | (13) | (14)  | (15)  | (16)                          | (17) | (18) | (19) | (20) |
|     | a.                                            | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                                                |            |                                                                                                | Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n                  | 295                                               | 303    | 308    | 311    | 314    | 89                           | 193   | 78   | 50    | 55    | 0,30                          | 0,64 | 0,25 | 0,16 | 0,18 |
|     | b.                                            | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan                                                          |            |                                                                                                | Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (ton (1.000))            |                                                   |        |        |        |        | 93.6                         | 181.1 | 78.4 | 173.4 | 174.6 | -                             | -    | -    | -    | -    |
| 4   |                                               | Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan |            |                                                                                                | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial         | 1.01                                              | 1.01   | 1.01   | 1.01   | 1.01   |                              |       |      |       |       |                               |      |      | -    | -    |
|     |                                               |                                                                                              |            |                                                                                                | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman            | 48.85%                                            | 33.09% | 36.27% | 38.80% | 48.85% |                              |       |      |       |       |                               |      |      |      |      |
|     |                                               |                                                                                              |            |                                                                                                | Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing                                       | 5.88%                                             | 25.00% | 50%    | 60%    | 5.88%  |                              |       |      |       |       |                               |      |      |      |      |
|     |                                               |                                                                                              |            |                                                                                                | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%) |                                                   | 67,28  | 67,28  | 67,29  | 67,30  |                              |       |      |       |       |                               |      |      |      |      |
|     |                                               |                                                                                              |            | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%) |                                                                                 |                                                   | 82.40  | 86,88  | 87,48  | 88,73  |                              |       |      |       |       |                               |      |      |      |      |

## Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKK dan IKU)

### 1. Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel

Perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan dapat dilihat pada realisasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melalui kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sumbangan komoditas unggulan produk perikanan. Pertumbuhan produksi setiap tahunnya merupakan sumbangan devisa Negara yang melalui ekspor yang mencapai 8,2 %, perkembangan pangsa pasar domestik yang mencapai 10% dan konsumsi ikan perkapita yang mencapai 4,9%. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 7,81 % terlihat pada pencapaian PDRB Perikanan setiap tahun seperti berikut :

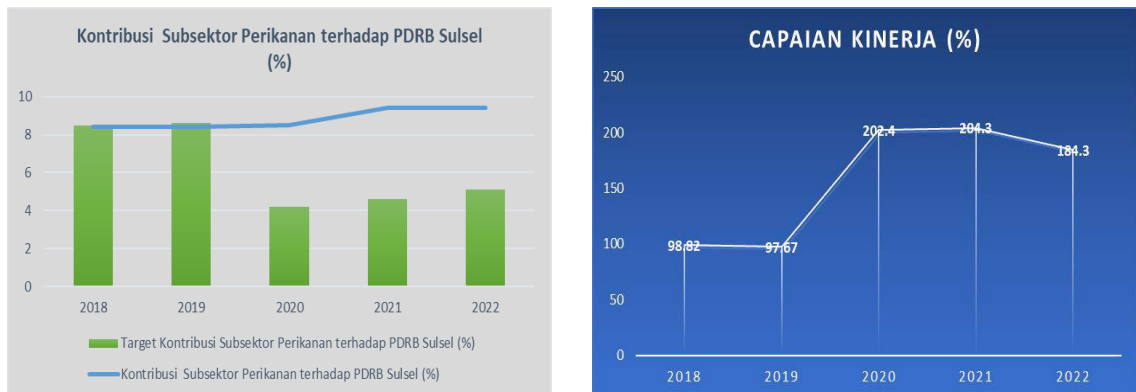
**Tabel 2.12**  
**Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel Tahun 2018-2022**

| Indikator                                                      | Kondisi Awal | Kinerja per tahun |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                                                                | 2018         | 2019              | 2020  | 2021  | 2022  |
| Target Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel (%) | 8.5          | 8.6               | 4,2   | 4,6   | 5,1   |
| Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)        | 8,4          | 8,4               | 8,5   | 9,4   | 9,4   |
| Capaian Kinerja (%)                                            | 98,82        | 97,67             | 202,4 | 204,3 | 184,3 |

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif (-5,32%). Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Berdasarkan data Sulsel mencatat perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 4,65 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 0,71 persen. Sehingga dilakukan revisi target pada Renstra Perubahan 2018-2023 , namun ternyata tidak terlalu berdampak negative pada subsektor perikanan hal ini dapat dilihat pada data yang telah diperoleh dari BPS.

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Sulsel mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 sesuai press release yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemik Covid-19 sehingga 2020 dilakukan revisi target .

**Grafik II.1**  
**Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel Tahun 2018-2022**



## 2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.. **Tahun 2022 produksi perikanan Sulawesi Selatan mencapai 4,532,670.4 ton** dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar **4,095,934.7 ton** dan produksi perikanan tangkap sebesar **436,735.7 ton**. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan **budidaya sebesar 90,4%** dan **perikanan tangkap sebesar 9,6 %**. sehingga berdasarkan data BPS kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel tahun 2022 berkontribusi sebesar **9,4 %** dan Laju pertumbuhan PDRB Perikanan sebesar **3,55 %** dengan nilai PDRB Perikanan berdasarkan harga konstan sebesar **Rp. 28,3T** serta harga berlaku sebesar **57,1 T**.

**Tabel 2.13**  
**Produksi Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| Indikator                      | Satuan | Tahun       |              |              |             |             |
|--------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                |        | 2018        | 2019         | 2020         | 2021        | 2022        |
| Jumlah Produksi Ikan           | Ton    | 3,935,493.0 | 4,061,326.7  | 4,102,319.5  | 4,498,891.2 | 4,532,670.4 |
| Target Daerah                  | Ton    | 3,425,869.4 | 5.117.387,52 | 4,092,881.40 | 4,342,259.8 | 4.546.138   |
| Capaian IKK Produksi Perikanan | %      | 114,9       | 79,4         | 100,2        | 103,6       | 99,7        |

Sumber : Data Olahan

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif, dimana produksi perikanan pada tahun **2018 sebesar 3,935,493.0 meningkat menjadi 4,061,326.7 ton pada tahun 2019, pada tahun 2020 produksi mengalami peningkatan sebesar 4,102,319.5 ton, pada tahun 2021 meningkat sebesar 4,498,891,2 ton dan pada tahun 2022 menjadi 4,532,670.4 ton.** Jika ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), angka capaian indikator belum mencapai target RPJMD hal ini disebabkan data proyeksi yang digunakan sebagai data *baseline* yaitu data tahun 2021 untuk menghitung trend rata-rata pertumbuhan dimana pada tahun tersebut produksi Perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2022 triwulan I produksi Perikanan mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada Perikanan budidaya dan Perikanan tangkap akibat adanya pembatasan aktivitas skala besar karena adanya pandemic Covid 19 sehingga pembudidaya dan nelayan tidak dapat melakukan aktivitasnya sampai pada triwulan II, termasuk aktivitas di pelabuhan dan usaha yang mendukung kebutuhan operasional pembudidaya dan nelayan.

**Grafik II.2**  
**Produksi Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 (Data Diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan produksi perikanan dari **tahun 2018 hingga 2022** mengalami trend positif dengan laju pertumbuhan produksi sebesar **3,7 %**, Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini telah dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang Windu dan Udang lainnya, Bandeng, Tuna Tongkol Cakalang dan komoditas ikan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan di kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan maka didukung beberapa program pembangunan, pada tahun 2020 merupakan tahun masa pandemic Covid 19, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya agar

Produksi Kelautan dan Perikanan dapat meningkat dengan fokus pengembangan komoditas unggulan yaitu udang Windu melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap pandemic dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan pengembangan rumput laut serta melakukan pembinaan ke kabupaten/kota terkait pengembangan Perikanan budidaya air tawar dan payau, meningkatkan pembinaan kepada pembudidaya untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), melakukan penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan dan pembinaan mutu hasil tangkapan.

**Tabel 2.13**  
**Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022**

| No                      | Kabupaten/Kota | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         |                | 2018                            | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 1                       | Luwu           | 628,756.1                       | 635,285.1          | 643,906.4          | 645,919.2          | 660,698.2          |
| 2                       | Luwu Utara     | 208,871.4                       | 219,078.1          | 226,669.9          | 234,533.2          | 242,702.7          |
| 3                       | Wajo           | 522,305.3                       | 538,019.5          | 545,172.7          | 559,220.4          | 567,029.4          |
| 4                       | Bone           | 403,644.0                       | 425,510.6          | 443,272.9          | 504,951.4          | 547,965.9          |
| 5                       | Sinjai         | 74,682.4                        | 84,255.6           | 83,298.7           | 85,934.3           | 81,939.7           |
| 6                       | Bulukumba      | 240,921.4                       | 235,999.4          | 252,835.1          | 282,750.3          | 251,280.6          |
| 7                       | Selayar        | 22,085.5                        | 28,837.7           | 19,566.6           | 21,406.6           | 21,766.8           |
| 8                       | Bantaeng       | 90,082.1                        | 91,228.5           | 92,554.2           | 92,831.7           | 95,757.7           |
| 9                       | Jeneponto      | 216,065.3                       | 188,205.3          | 253,093.2          | 275,450.9          | 275,654.5          |
| 10                      | Takalar        | 554,114.1                       | 488,282.0          | 431,941.1          | 607,971.0          | 609,555.8          |
| 11                      | Makassar       | 14,885.9                        | 21,391.1           | 20,208.3           | 20,429.4           | 21,545.1           |
| 12                      | Maros          | 48,637.0                        | 44,756.1           | 39,442.3           | 46,578.0           | 54,754.3           |
| 13                      | Pangkep        | 353,130.2                       | 491,225.7          | 460,754.6          | 493,740.0          | 449,570.5          |
| 14                      | Barru          | 25,100.1                        | 25,648.9           | 25,773.9           | 26,168.4           | 26,421.4           |
| 15                      | Parepare       | 4,680.9                         | 4,766.6            | 3,066.3            | 4,740.8            | 4,763.2            |
| 16                      | Pinrang        | 64,795.2                        | 66,763.0           | 77,294.2           | 79,916.4           | 82,630.6           |
| 17                      | Gowa           | 2,033.1                         | 2,043.5            | 2,054.2            | 2,127.2            | 2,279.8            |
| 18                      | Luwu Timur     | 319,713.6                       | 325,273.2          | 325,405.4          | 325,627.1          | 330,174.5          |
| 19                      | Palopo         | 130,608.4                       | 133,479.5          | 145,142.2          | 176,897.4          | 194,333.0          |
| 20                      | Soppeng        | 2,600.8                         | 3,120.9            | 3,394.1            | 4,043.7            | 4,079.4            |
| 21                      | Sidrap         | 3,064.0                         | 3,268.6            | 1,775.1            | 3,425.6            | 3,463.1            |
| 22                      | Enrekang       | 1,537.4                         | 1,625.8            | 689.2              | 1,870.4            | 1,883.0            |
| 23                      | Toraja         | 490.1                           | 573.5              |                    | 712.6              | 773.5              |
| 24                      | Toraja Utara   | 2,689.0                         | 2,688.7            | 1,637.4            | 1,645.2            | 1,647.8            |
| <b>Sulawesi Selatan</b> |                | <b>3,935,493.2</b>              | <b>4,061,326.7</b> | <b>4,102,319.5</b> | <b>4,498,891.1</b> | <b>4,532,670.4</b> |

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Dari 24 kabupaten/Kota yang merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan terdapat 5 **Kabupaten penyumbang terbesar** produksi ikan Sulawesi Selatan yaitu **Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur**

**dan Kabupaten Pangkep** dengan sumber produksi dari hasil budidaya dan hasil tangkapan. Adapun komoditas unggulan yaitu rumput laut, udang, bandeng dan tuna. Kenaikan produksi rumput laut selama 5 tahun di Sulawesi Selatan sebesar **3,5 %**. **Pada tahun 2022. Kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Luwu sebesar 627,984.2 ton, Kabupaten Takalar sebesar 593,395.5 ton, kabupaten Wajo 483,088.6 ton, dan Kabupaten Pangkep sebesar 407,330.0 ton.** Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar **7,4 %**. **Pada tahun 2022** Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain **kabupaten Pinrang sebesar 15,726.9 Ton, Kabupaten Bone sebesar 9,997.5 ton, Kabupaten Wajo sebesar 8,718.9 ton, Kabupaten Barru sebesar 4,708.6 ton, Kabupaten Bulukumba sebesar 3,714.0 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 3,427.8 ton, Kabupaten Maros sebesar 3,415.1 ton.** Selain itu, Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sektor perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar **3,6 %**. **Pada tahun 2022** Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain **Kabupaten Bone sebesar 105,737.0 Ton, Kabupaten Pinrang sebesar 22,711.1 ton, Kabupaten Wajo sebesar 16,111.1 Ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 14,270.6 ton, kabupaten Pangkep sebesar 12,815.0 Ton.**

Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (effort) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun **sebesar 1,6 %**.

#### **Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota**

Produksi rumput laut Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif, dimana produksi rumput laut pada **tahun 2018 sebesar 3,317,524.9 ton** meningkat sebesar **3,406,924.6 ton** pada **tahun 2019**, selanjutnya pada **tahun 2020 meningkat menjadi 3,441,138.7 ton**, pada **tahun 2021 produksi menjadi 3,786,411.7 ton** dan pada **tahun 2022 produksi perikanan budidaya rumput laut mengalami peningkatan menjadi 3,796,733.3 ton** atau naik **3,5 %**.

**Tabel 2.14**  
**Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| No.                     | Kab/Kota     | Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton) |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         |              | 2018                              | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 1                       | Luwu         | 598,037.3                         | 604,420.8          | 612,532.2          | 614,258.4          | 627,984.2          |
| 2                       | Luwu Utara   | 196,988.6                         | 206,618.5          | 213,848.7          | 221,207.8          | 228,950.1          |
| 3                       | Wajo         | 462,474.7                         | 476,055.2          | 476,078.9          | 479,632.2          | 483,088.6          |
| 4                       | Bone         | 275,627.0                         | 291,686.6          | 301,871.2          | 337,592.2          | 366,491.0          |
| 5                       | Sinjai       | 40,775.8                          | 47,734.0           | 45,976.4           | 47,823.8           | 43,400.5           |
| 6                       | Bulukumba    | 178,848.4                         | 177,351.1          | 192,250.4          | 221,980.9          | 189,854.1          |
| 7                       | Selayar      | 365.5                             | 395.7              | 642.1              | 359.1              | 381.4              |
| 8                       | Bantaeng     | 84,076.8                          | 84,805.2           | 86,284.6           | 86,313.0           | 89,164.7           |
| 9                       | Jeneponto    | 193,517.8                         | 165,036.2          | 231,754.4          | 253,389.9          | 252,795.5          |
| 10                      | Takalar      | 538,680.4                         | 466,014.1          | 409,117.3          | 587,061.0          | 593,395.5          |
| 11                      | Makassar     | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 12                      | Maros        | 13,240.8                          | 12,475.0           | 12,360.5           | 12,870.0           | 14,150.0           |
| 13                      | Pangkep      | 314,201.3                         | 445,608.0          | 420,952.0          | 450,011.0          | 407,330.0          |
| 14                      | Barru        | 959.0                             | 1,114.0            | 680.0              | 667.7              | 949.9              |
| 15                      | Pare-Pare    | -                                 | -                  | -                  | -                  | 7.9                |
| 16                      | Pinrang      | 15,448.8                          | 16,266.3           | 14,243.7           | 19,399.1           | 23,641.4           |
| 17                      | Gowa         | -                                 | -                  | 102.0              | 20.0               | -                  |
| 18                      | Luwu Timur   | 294,897.0                         | 299,067.5          | 298,712.0          | 296,267.1          | 299,808.5          |
| 19                      | Palopo       | 109,385.9                         | 112,276.4          | 123,732.4          | 157,558.4          | 175,340.0          |
| 20                      | Sidrap       | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 21                      | Enrekang     | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 22                      | Soppeng      | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 23                      | Tana Toraja  | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 24                      | Toraja Utara | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Sulawesi Selatan</b> |              | <b>3,317,525.1</b>                | <b>3,406,924.6</b> | <b>3,441,138.7</b> | <b>3,786,411.7</b> | <b>3,796,733.3</b> |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

### Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota

Produksi udang di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,4 %. Produksi udang pada tahun 2018 sebesar 46,524.0 ton menurun sebesar 44,520.5 ton pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 50,876.1 ton, pada tahun 2021 produksi meningkat menjadi 54,974.6 ton dan pada tahun 2022 produksi perikanan udang menjadi 61,446.2 ton. Realisasi capaian produksi udang pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lahan dalam mendukung produktivitas. Oleh karenanya dilaksanakan kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya udang Windu kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), melakukan

penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

**Tabel 2.15**  
**Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022**

| No.                     | Kab/Kota   | Jumlah Produksi Udang (Ton) |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         |            | 2018                        | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
| 1                       | Luwu       | 3,882.3                     | 3,691.7         | 3,455.3         | 3,452.0         | 3,274.9         |
| 2                       | Luwu Utara | 1,298.1                     | 1,430.0         | 1,449.1         | 1,611.8         | 1,668.2         |
| 3                       | Wajo       | 1,502.5                     | 1,446.6         | 1,632.5         | 2,405.1         | 8,718.9         |
| 4                       | Bone       | 4,900.1                     | 5,103.4         | 5,359.5         | 8,561.8         | 9,997.5         |
| 5                       | Sinjai     | 177.6                       | 172.7           | 130.2           | 36.5            | 76.0            |
| 6                       | Bulukumba  | 5,302.7                     | 3,337.5         | 4,300.5         | 4,280.1         | 3,714.0         |
| 7                       | Selayar    | 75.3                        | 68.2            | 50.0            | 50.9            | 81.5            |
| 8                       | Bantaeng   | 39.9                        | 56.9            | 35.2            | 41.7            | 41.2            |
| 9                       | Jeneponto  | 1,206.3                     | 1,654.3         | 1,933.8         | 1,286.2         | 1,464.3         |
| 10                      | Takalar    | 1,908.4                     | 1,007.7         | 1,550.2         | 1,232.2         | 1,350.0         |
| 11                      | Makassar   | 331.1                       | 367.0           | 319.7           | 199.5           | 84.3            |
| 12                      | Maros      | 3,484.1                     | 3,381.2         | 3,424.8         | 3,395.2         | 3,415.1         |
| 13                      | Pangkep    | 3,851.0                     | 3,922.0         | 3,470.0         | 3,952.7         | 3,358.5         |
| 14                      | Barru      | 4,188.4                     | 4,211.4         | 4,745.5         | 4,858.2         | 4,708.6         |
| 15                      | Pare-Pare  | 13.1                        | 17.2            | 13.4            | 18.5            | 12.0            |
| 16                      | Pinrang    | 11,100.0                    | 11,239.1        | 15,431.2        | 15,708.8        | 15,726.9        |
| 17                      | Gowa       | 71.6                        | 76.7            | 120.4           | 110.6           | 123.2           |
| 18                      | Luwu Timur | 2,951.0                     | 3,091.5         | 3,175.5         | 3,485.5         | 3,427.8         |
| 19                      | Palopo     | 240.5                       | 245.6           | 279.2           | 287.2           | 203.5           |
| <b>Sulawesi Selatan</b> |            | <b>46,524.0</b>             | <b>44,520.5</b> | <b>50,876.1</b> | <b>54,974.6</b> | <b>61,446.2</b> |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

#### **Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap**

Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar **3,7 %**, dimana produksi perikanan budidaya **pada tahun 2018 sebesar 3,568,952.3 ton, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,662,761.4 ton, pada tahun 2020 produksi mengalami kenaikan menjadi 3,713,111.3 ton, pada tahun 2021 produksi Perikanan budidaya mengalami peningkatan menjadi 4,081,480.5 dan tahun 2022 meningkat menjadi 4,095,934.7 ton.** Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata **sebesar 4,6 %**, dimana produksi perikanan tangkap **pada tahun 2018 sebesar 366,540.6 ton meningkat pada tahun 2019 menjadi 398,565.3 ton, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 389,208.2 atau 2,3 %, pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan menjadi 417,410.7 ton dan pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan menjadi 436,735.7 ton.** Penurunan

produksi pada tahun 2020 disebabkan tinggi gelombang dan pembatasan aktivitas akibat pandemic global Covid 19.

**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap**  
**di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022**

| Indikator                          | Satuan | Realisasi   |             |             |             |             |
|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    |        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| Total Volume Produksi Perikanan    | Ton    | 3,935,493.0 | 4,061,326.7 | 4,102,319.5 | 4,498,891.2 | 4,532,670.4 |
| Volume produksi perikanan budidaya | Ton    | 3,568,952.3 | 3,662,761.4 | 3,713,111.3 | 4,081,480.5 | 4,095,934.7 |
| Volume produksi perikanan tangkap  | Ton    | 366,540.6   | 398,565.3   | 389,208.2   | 417,410.7   | 436,735.7   |

**Grafik II.2**  
**Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022**



### 3. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang cukup tinggi dalam konsumsi ikan Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari

kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.17**  
**Konsumsi Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| Indikator                 | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Jumlah Konsumsi Ikan      | Kg/kap | 56.3  | 64.7  | 65.5  | 68.3  | 69.7  |
| Target Daerah             | Kg/kap | 43    | 57,4  | 55    | 55,9  | 62,7  |
| Capaian IKK Konsumsi Ikan | %      | 130,9 | 112,7 | 119,1 | 122,2 | 111,2 |

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dalam periode 2018-2022 telah terjadi penurunan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 5,6 % pertahun, dimana pada tahun 2018 sebesar 56,3 kg/kap , meningkat menjadi 64,7 kg/kap pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 65,5 kg/kap pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 68,3 kg/kap dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,7 kap/kap.

**Grafik II.2**  
**Konsumsi Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**



Dari grafik diatas memperlihatkan peningkatan konsumsi ikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,6 % hal ini menandakan perubahan pola konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap sumber pangan ikan.

### 3.Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah kelompok nelayan di daerah. Selama 5 tahun terakhir sekitar 465 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.18**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| Indikator                                                      | Satuan | Tahun |       |      |       |       |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                                                |        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  |
| Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n | Klp    | 50    | 55    | 21   | 60    | 86    |
| Jumlah Kelompok Nelayan                                        | Klp    | 311   | 314   | 314  | 314   | 314   |
| Capaian IKK Cakupan Bina Kelompok Nelayan                      | %      | 16,08 | 17,52 | 6,69 | 19,11 | 27,39 |

Sumber : Data olahan

Tahun 2018 kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak 50 kelompok , tahun 2019 yaitu sebanyak 55 kelompok. Kemudian di tahun 2020 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 21 kelompok, tahun 2021 sebanyak 60 kelompok dan tahun 2022 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 86 Kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Tidak tercapainya target indikator disebabkan karena adanya pembagian urusan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang termuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dibawah kapal 5 GT adalah kewenangan kabupaten/Kota sehingga tahun 2017 – 2019 pembinaan nelayan focus pada usaha nelayan skala menengah keatas (nelayan yang memiliki kapal 5 – 30 GT). Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan. Untuk keberhasilan indikator ini maka didukung oleh program Hilirisasi Perikanan dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi pengelolaan perikanan tangkap, Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan

**Grafik II.3**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020**



Dari grafik menunjukkan angka fluktuatif pada indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2018 – 2022 dimana saat itu terjadi penurunan bantuan pada tahun 2020 dampak dari pandemic Covid-19, upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan kapasitas nelayan pada tahun 2021-2022 dengan kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. Upaya tersebut untuk melakukan fungsi fasilitasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan agar dapat memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan.

#### 4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan.

**Tabel 2.19**  
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| Indikator                                                  | Satuan | Tahun      |            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            |        | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      |
| Jumlah Produksi Ikan Hasil Kelompok Nelayan                | Ton    | 173.412,00 | 174.620,24 | 50,168.9  | 75,593.1  | 128,400   |
| Jumlah Produksi Ikan di Daerah                             | Ton    | 366.540,6  | 398.565.3  | 389,208.2 | 417,410.7 | 436,735.7 |
| Capaian IKK Kontribusi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | %      | 47,66      | 43.81      | 12,89     | 18,11     | 29,43     |

Sumber : Data olahan

Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun pada tahun 2020 sekitar 70% dari tahun 2019 disebabkan adanya pandemic global Covid-19. Rata-rata kelompok nelayan yang menerima bantuan adalah nelayan skala kecil namun terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 sehingga bantuan sarana ke kelompok nelayan terbatas.

**Grafik II.4**  
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020**



Berdasarkan data grafik diatas memperlihatkan kontribusi produksi nelayan berfluktuasi dari tahun 2018 sampai tahun 2022, peningkatan kontribusi produksi yang cukup besar

terjadi di tahun 2018 sebesar 47,66% hal ini sesuai dengan indikator cakupan bina nelayan dimana tahun 2018 puncak bantuan pemerintah yang diterima oleh nelayan . Kemudian terjadi perlambatan pertumbuhan produksi kontribusi nelayan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2020 sebesar 12,89% akibat dampak pandemik Covid-19 dan melaju tumbuh sampai tahun 2022 sebesar 29,43%. Oleh karena itu perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok nelayan secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan Penyuluh perikanan kemudian pendataan produksi kelompok nelayan dilakukan secara efektif dan berkala. Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

## 5. Proporsi Tangkapan Ikan

Dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

**Tabel 2.20**  
**Proporsi Tangkapan Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022**

| Indikator                                                                        | Satuan | Tahun     |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                  |        | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| JumlahTangkapan Ikan                                                             | Ton    | 366,540.6 | 398,565.3 | 389,208.2 | 417,410.7 | 436,735.7 |
| 80% dari Tangkapan Maksimum Lestari                                              | Ton    | 743,776   | 743,776   | 743,776   | 743,776   | 743,776   |
| Capaian IKK Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | %      | 49,3      | 53,59     | 52,33     | 56,12     | 58.7      |

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018, jumlah tangkapan ikan mengalami rata-rata pertumbuhan sampai tahun 2022 sebesar 1,69% dan mengalami penurunan 0,11% pada tahun 2020 karena dampak pandemik Covid-19 . Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk propinsi sebesar 743,8 ribu ton per tahun. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi

Sulawesi Selatan masih < 743,8 ribu ton per tahun.

**Grafik II.5**  
**Proporsi Tangkapan Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020**



Dari grafik diatas menunjukkan proporsi tangkapan ikan sebesar 42% dan mengalami fluktuasi peningkatan sampai tahun 2022 mencapai 58,7% dan terjadi penurunan pada tahun 2020 pada angka 52,33%. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan atau tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan. Indikator ini didukung Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan, dan Pengawasan Terpadu SDKP.

#### **6.Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial**

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 433.551,94 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2018-2023 luas kawasan akan ditargetkan seluas 849.969.66 Ha dengan penambahan sebesar 416,417.72Ha .

**Tabel 2.21**  
**Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| Indikator                                                              | Satuan          | Tahun      |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                        |                 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| Kawasan Lindung Perairan                                               | Ha              | 433.551,94 | 674.120,8  | 674.174    | 674.252.62 | 821.110.4  |
| Total Luas Perairan Teritorial                                         | Km <sup>2</sup> | 43.047.900 | 43.047.900 | 43.047.900 | 43.047.900 | 43.047.900 |
| Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial |                 | 1,01       | 1,56       | 1,57       | 1,57       | 1,90       |

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel pada tahun 2018 kawasan konservasi yang dikelola bertambah sebesar 433.551,94 Ha kemudian tahun 2019 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah bertambah 674.120,8 Ha, kemudian pada tahun 2022 setelah berdasarkan integrasi RZWP3K dengan dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan menjadi 821.110,4 Ha dengan ditetapkannya 13 Kawasan konservasi sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2022 yaitu KKP3K Lanyukang, KKP3K Pulau Sembilan, KKP3K Kepulauan Tanakeke, KKP3K Pulau Pannikiang, KKP3K Liukang Tangaya, KKM Pembuatan Kapal Phinisi, KKPD Teluk Bone, KKPD Bilongka, KKPD Liukang Tupabiring, KKPD Pulau Pasi Gusung, KKPD Kauna Kayuadi, KKPD Tanalili dan KKPD Malili kemudian rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Grafik II. 6**  
**Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020**



Dari grafik menunjukkan rasio kawasan lindung perairan terhadap total luar perairan teritorial pada tahun 2018 sebesar 1,01 terjadi perluasan kawasan lindung pada tahun 2019 dengan rasio kawasan lindung sebesar 1,56. Sehingga luas kawasan mencapai pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan meningkat drastis dengan adanya penetapan teluk Bone sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan hal ini sebagai respon akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi dimana masing-masing kabupaten/kota mengelola sendiri kawasan konservasi perairan daerah di wilayahnya, yang kemudian diserahkan ke Provinsi sebagaimana diatur pada UU 23 tahun 2014. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut. Indikator ini didukung oleh Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel, Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut, pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Boswasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

## 7. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

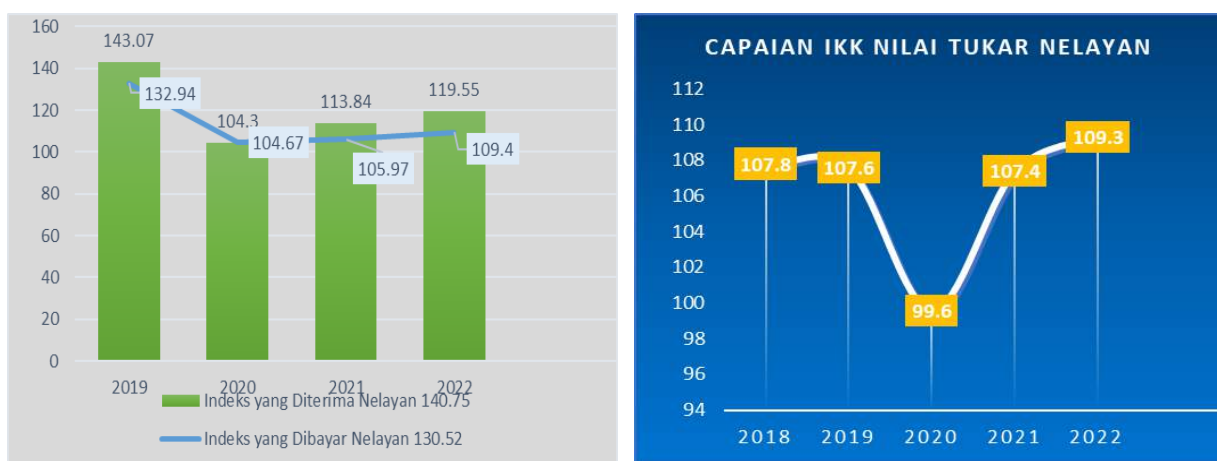
**Tabel 2.22**  
**Nilai Tukar Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

| Indikator                       | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Indeks yang Diterima Nelayan    | 140.75 | 143.07 | 104.30 | 113.84 | 119.55 |
| Indeks yang Dibayar Nelayan     | 130.52 | 132.94 | 104.67 | 105.97 | 109.40 |
| Capaian IKK Nilai Tukar Nelayan | 107,8  | 107,6  | 99,6   | 107,4  | 109,3  |

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel diatas nilai tukar nelayan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif, pada tahun 2020 terjadi penurunan indeks Nilai Tukar Nelayan karena adanya pandemik Covid-19 kemudian pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan hal ini disebabkan oleh indeks harga yang dibayar nelayan cukup besar daripada indeks harga yang diterima nelayan. Adapun indeks tersebut sangat dipengaruhi pola konsumsi nelayan terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan BBM untuk operasional melaut apalagi pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, **Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,7 % dibandingkan Tahun sebelumnya.** Hal ini terjadi karena kenaikan indeks yang diterima Nelayan (it) lebih besar dibandingkan kenaikan pada indeks yang dibayar Nelayani (ib). Indeks yang diterima Nelayan (it) mengalami kenaikan **sebesar 5 persen**, sedangkan Indeks yang dibayar petani (ib) mengalami kenaikan **sebesar 3,2 persen**..

**Grafik II.7**  
**Nilai Tukar Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**



Dari grafik memperlihatkan pencapaian indeks NTN tahun 2018 sampai tahun 2019 dipengaruhi oleh tingkat produktivitas nelayan dan harga pasar yang stabil, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan akibat cuaca ekstrim dan pandemik Covid-19 pada tahun 2020. Indeks NTN digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesejahteraan tersebut dapat meningkat jika aksesibilitas nelayan dapat terpenuhi dan lancar dalam memenuhi kebutuhannya sehingga intervensi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada kinerja ini adalah dalam mewujudkan ekonomi biru, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memberikan penguatan

peningkatan kapasitas nelayan melalui restrukturisasi armada kapal perikanan yang dilengkapi dengan system GPS agar dapat memantau aktivitas penangkapan ikan di WPP 713 dan alat tangkap yang ramah lingkungan.

### Capaian Kinerja Program

#### 1. Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program ini berinisiasi untuk melakukan harmonisasi dan sinergi sesuai kewenangan yang telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014. Kinerja program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi . Pada program ini dilaksanakan dengan intervensi program ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menyediakan sarana dan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama pada pengembangan usaha garam dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan. Adapun kinerja pemerintah dalam melaksanakan program ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2022 mendukung**  
**sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan**  
**produktivitas produksi**

| Indikator                                                                            | Tahun    |            |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                      | 2018     | 2019       | 2020     | 2021      | 2022      |
| Target Produksi Garam (ton)                                                          | 86.712,7 | 91.176,91  | 45.846   | 46.500    | 47.500    |
| Realisasi Produksi Garam (ton)                                                       | 86.712,7 | 140.338,87 | 45.310,5 | 4.842,02* | 6.506,75* |
| Capaian Kinerja Produksi Garam (%)                                                   | 100      | 153,9      | 98,8     | 2,8       | 2,7       |
| Target Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)    | -        | 20         | 40       | 50,17     | 74,08     |
| Realisasi Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%) | -        | 6,52       | 8,70     | 32,32     | 49,49     |
| Capaian Kinerja (%)                                                                  | -        | 32,6       | 21,7     | 64,43     | 66,81     |

Sumber : Data olahan, \*) Data KKP

Pada tabel dapat dilihat bahwa produksi garam mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 hal ini disebabkan adanya perubahan iklim pada bulan produksi. Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan gagal produksi pada tambak di 4 kabupaten (Jeneponto, Takalar, Selayar dan Maros). Sehingga performance pada indikator kinerja program ini sangat kurang pada tahun 2021 dan 2022, oleh karena itu dibutuhkan upaya perbaikan dalam

mencapai kinerja tahun depan. Demikian juga halnya pada indikator kinerja cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian untuk mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, maka program ini melaksanakan indikator kinerja yaitu :

**Tabel 2.24**

**Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2022 mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

| Indikator                                                                                 | Tahun |      |      |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|--------|
|                                                                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022   |
| Target Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)    | -     | -    | -    | 67,29 | 67,30  |
| Realisasi Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%) | -     | -    | -    | 67,29 | 81,95  |
| Capaian Kinerja (%)                                                                       | -     | -    | -    | 100   | 121,77 |

Sumber : Data olahan

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan arah kebijakan terkait perluasan kawasan konservasi maka pada tahun 2021 kebijakan tersebut terakomodir, yang didukung oleh kegiatan pemantauan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dengan fokus cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap cara penanganan ikan di atas kapal dan peningkatan kapasitas nelayan. Adapun data kinerja selama tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.25**

**Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2018-2022 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**

| Indikator                                                    | Tahun   |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                                              | 2018    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| Target Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)    | 4.564.2 | 6.525.95 | 8,675.44 | 8,852.48 | 9.029.52 |
| Realisasi Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M) | 7.987.2 | 8.631,3  | 8,678.9  | 10,679,9 | 11.812,9 |
| Capaian Kinerja (%)                                          | 174.99  | 132.61   | 100.04   | 120.64   | 130,83   |

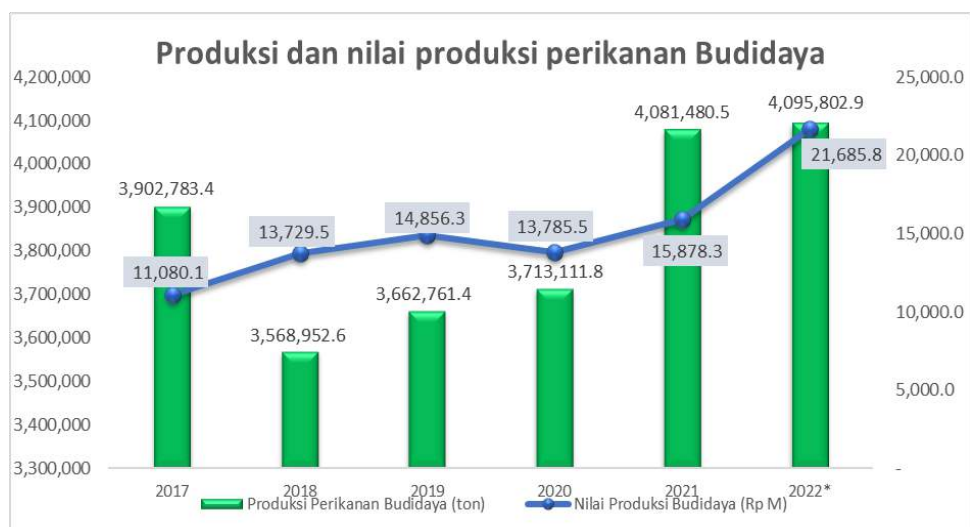
| Indikator                                                    | Tahun     |           |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|                                                              | 2018      | 2019      | 2020       | 2021       | 2022      |
| Target produksi perikanan tangkap (ton)                      | 366.540,7 | 369.365   | 389,052.40 | 396,992.30 | 404.932,2 |
| Realisasi produksi perikanan tangkap (ton)                   | 398.565,2 | 398.565,2 | 389,208.2  | 417.410,7  | 436.749,6 |
| Capaian Kinerja (%)                                          |           | 108,74    | 100.04     | 105.14     | 107,86    |
| Target Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)    | 4.564.2   | 6.525.95  | 8,675.44   | 8,852.48   | 9.029.52  |
| Realisasi Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M) | 7.987.2   | 8.631,3   | 8,678.9    | 10,679,9   | 11.812,9  |
| Capaian Kinerja (%)                                          | 174.99    | 132.61    | 100.04     | 120.64     | 130,83    |

Sumber : Data olahan

### 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi budidaya ikan ramah lingkungan, pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap cara budidaya ikan dengan baik dan peningkatan kapasitas pembudidaya. Adapun data kinerja selama tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

**Grafik II.8**  
**Kinerja Produksi dan nilai produksi perikanan budidaya**



#### 4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan laut sampai dengan 12 mil, penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan serta pemasaran. Adapun data kinerja selama tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.26**  
**Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022**

| INDIKATOR                                                               | REALISASI KINERJA |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                         | 2019              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial | *                 | *     | 1.57  | 1.91  | 1.34  |
| Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman    | 53.59             | 52.33 | 56.12 | 58,72 | 66.17 |
| Persentase penurunan tindakan IUU Fishing                               | *                 | *     | 83.33 | 40.91 | 23.08 |

#### 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha pengolahan dan hasil perikanan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi diversifikasi olahan, pembinaan mutu, standar mutu, penjaminan keamanan pangan untuk konsumsi, pengawasan dan pengujian mutu. Adapun data kinerja selama tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

**Grafik II.9**  
**Kinerja Angka Konsumsi Ikan**



#### Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat berbasis Gender

Dalam rangka mengefektifkan kinerja pelayanan , Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target

sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mewujudkannya, salah satunya adalah pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat. Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan penilaian yang sama dan diberikan pada masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta atas berbagai peran yang mereka lakukan untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender, maka persentase keterwakilan perempuan terhadap laki-laki untuk memperoleh kesempatan untuk pengembangan SDM dapat dilihat pada tampilan data pada tabel 2.31.

**Tabel 2.27**  
**Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan**  
**(Berbasis Gender) dalam Mendukung**  
**Peningkatan Produksi Perikanan sampai tahun 2018-2022**

| Uraian               | Realisasi (%) per Tahun |       |        |       |        |       |        |       |        |        |
|----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|                      | 2018                    |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |        |
|                      | L                       | P     | L      | P     | L      | P     | L      | P     | L      | P      |
| Aparat Dinas KP      | 60,88                   | 39,10 | 59,97  | 39,11 | 70,74  | 29,26 | 56,67  | 43,33 | 62,69  | 41,33  |
| Pembudidaya          | 96,17                   | 3,82  | 97,56  | 3,82  | 98,31  | 1,69  | 95,25  | 4,75  | 90,15  | 14,75  |
| Nelayan              | 97,80                   | 2,80  | 94,29  | 2,80  | 94,24  | 5,76  | 95,22  | 4,78  | 90,22  | 14,78  |
| Pengolah dan Pemasar | 49,11                   | 50,88 | 27,86  | 50,88 | 41,62  | 58,38 | 58,11  | 41,89 | 68,11  | 51,89  |
| Jumlah               | 303,96                  | 37,71 | 279,68 | 96,60 | 304,91 | 95,09 | 305,25 | 94,75 | 311,17 | 122,75 |
| Rasio                | 1,31                    |       | 1,42   |       | 2,21   |       | 2,22   |       | 1,53   |        |

Sumber : Data Olahan DKP Prov. Sulsel Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perkembangan rasio gender yang berperan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Sesuai data diatas maka dapat dilihat kontribusi peran mulai dari aparat hingga pelaku usaha berdasarkan gender. Rasio antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi peningkatan setiap tahunnya .

#### **Capaian Kinerja Pendanaan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/ penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (T-C. 24)**

| Uraian                 |                        | Anggaran pada Tahun ke - |                |                |                |                |                | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - |                |                |                |                |                | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|                        |                        | 2018                     | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2018                               | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 1                                             | 2    | 3    | 4    | 5    | Anggaran              | Realisasi |
|                        | -1                     | -2                       | -3             | -4             | -5             | -6             | -7             | -8                                 | -9             | -10            | -11            | -12            | -13            | -14                                           | -15  | -16  | -17  | -18  | -19                   | -20       |
| PENDAPATAN DAERAH      |                        | 2,795,000,000            | 3,000,000,000  | 3,000,000,000  | 1,209,025,000  | 1,818,930,000  | 2,139,425,000  | 3,001,917,283                      | 2,428,416,358  | 2,167,625,412  | 1,276,687,404  | 2,239,460,000  | 2,258,325,000  | 0,80                                          | 0,72 | 1,05 | 1,23 | 1,05 | -0,11                 | -0,02     |
| Pendapatan Asli Daerah |                        | 2,795,000,000            | 2,778,000,000  | 2,778,000,000  | 757,025,000    | 1,818,930,000  | 2,139,425,000  | 3,001,917,283                      | 2,428,416,358  | 2,167,625,412  | 658,627,404    | 2,239,460,000  | 2,258,325,000  | 0,87                                          | 0,78 | 0,87 | 1,23 | 1,05 |                       |           |
| -                      | Hasil retribusi daerah | -                        | 50,000,000     | 50,000,000     | 100,000,000    | -              | -              | -                                  | 44,220,000     | 78,285,000     | 272,565,000    | -              | -              | 0,88                                          | 1,56 | 2,72 | -    | -    |                       |           |
| -                      | Lain-lain PAD yang Sah | -                        | 172,000,000    | 172,000,000    | 352,000,000    | -              | -              | -                                  | 169,950,000    | 285,310,000    | 345,495,000    | -              | -              | 0,98                                          | 1,65 | 0,98 | -    | -    |                       |           |
| Belanja tidak langsung |                        | 14,458,386,427           | 16,846,441,712 | 16,498,236,542 | 18,188,149,256 | 18,158,440,138 | 18,188,149,265 | 14,154,921,486                     | 15,656,078,797 | 16,295,494,117 | 16,815,795,645 | 16,645,117,669 | 21,918,369,701 | 0,92                                          | 0,98 | 0,92 | 0,91 | 1,20 | 0,02                  | 0,11      |

|                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |      |      |      |        |        |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| Belanja langsung          | 35,944,485,714 | 59,716,846,500 | 57,364,337,664 | 69,747,742,156 | 79,687,654,229 | 58,823,343,000 | 34,697,833,657 | 55,203,467,995 | 53,304,160,317 | 62,332,854,689 | 74,228,979,393 | 54,599,447,772 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | -0,01  | -0,003 |
| - Belanja Pegawai         | -              | -              | -              | 1,528,950,000  | 2,292,300,000  | -              | -              | -              | -              | 1,448,225,000  | 2,215,979,393  | -              | ;-   | ;-   | 0,94 | 0,96 | ;-   |        |        |
| - Belanja Barang dan jasa | -              | -              | -              | 62,414,948,156 | 65,310,331,929 | 47,078,527,120 | -              | -              | -              | 56,282,950,189 | 61,169,975,573 | 43,825,311,092 | ;-   | ;-   | 0,90 | 0,93 | 0,93 |        |        |
| - Belanja Modal           | -              | -              | -              | 5,803,844,000  | 12,085,022,300 | 11,744,815,880 | -              | -              | -              | 4,561,679,500  | 10,834,801,320 | 10,774,136,680 | ;-   | ;-   | 0,78 | 0,89 | 0,91 |        |        |
| Total BELANJA DAERAH      | 53,197,872,141 | 79,563,288,212 | 76,862,574,206 | 89,144,916,412 | 99,665,024,367 | 79,150,917,265 | 51,854,672,426 | 73,287,963,150 | 71,767,279,846 | 80,425,337,738 | 93,113,557,062 | 78,776,142,473 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,99 | -0,002 | 0,02   |

**Tabel 2.28**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

*Permendagri 13 tahun 2006*

| URAIAN                                                                              | Anggaran pada Tahun ke - |                |                |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - |                |                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------------|----------------|----------------|------|------|
|                                                                                     | 2018                     | 2019           | 2020           | 2021 | 2022 | 2018                               | 2019           | 2020           | 2021 | 2022 |
| -1                                                                                  | -2                       | -3             | -4             | -5   | -6   | -7                                 | -8             | -9             | -10  | -11  |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | 4,462,457,714            | 5,959,069,100  | 16,246,336,914 |      |      | 4,322,670,076                      | 5,610,100,115  | 14,784,773,454 |      |      |
| Program Peningkatan Kapasitas dan kinerja OPD                                       | 150,000,000              | 490,000,000    | 770,000,000    |      |      | 149,781,000                        | 450,732,300    | 756,935,250    |      |      |
| Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja OPD | 704,060,000              | 894,500,000    | 1,235,670,000  |      |      | 701,911,600                        | 893,533,200    | 1,210,257,035  |      |      |
| Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir                                     | 2,312,400,000            | 2,712,725,000  | 3,318,725,000  |      |      | 2,306,952,100                      | 2,505,805,380  | 3,176,773,920  |      |      |
| Program pemberdayaan masyarakat pengawasan dan pengendalian                         | 1,226,500,000            | 980,400,000    | 1,654,683,000  |      |      | 963,973,300                        | 1,617,083,540  | 3,729,457,967  |      |      |
| Program pengembangan perikanan budidaya                                             | 13,334,165,000           | 33,227,261,600 | 20,013,734,750 |      |      | 13,170,453,954                     | 31,614,036,000 | 19,359,877,403 |      |      |
| Program pengelola an perikanan tangkap                                              | 9,546,648,000            | 10,649,865,800 | 9,514,750,000  |      |      | 8,682,112,300                      | 9,367,572,600  | 8,025,242,300  |      |      |
| Program optimalisasi pengelola an dan pemasara n produksi perikanan                 | 4,208,275,000            | 4,803,025,000  | 4,610,438,000  |      |      | 4,180,773,127                      | 3,767,695,100  | 4,393,217,415  |      |      |
| Total                                                                               | 35,944,505,714           | 59,716,846,500 | 57,364,337,664 |      |      | 34,478,627,457                     | 55,826,558,235 | 55,436,534,744 |      |      |

Permendagri 90 Tahun 2019

| URAIAN                                                | Anggaran pada Tahun ke - |      |      |                |                  |                   | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                       | 2018                     | 2019 | 2020 | 2021           | 2022             | 2023              | 2018                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -1                                                    | -2                       | -3   | -4   | -5             | -6               | -7                | -8                                 | -9   | -10  | -11  | -12  | -13  |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH          | -                        | -    | -    | 31.129.743.757 | 33.591.608.562.8 | 35.456.852.901.26 |                                    |      |      |      |      |      |
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK         |                          |      |      | 10.393.474.500 |                  |                   |                                    |      |      |      |      |      |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 |                          |      |      | 26.874.813.000 | 27516403075      | 28441223228.75    |                                    |      |      |      |      |      |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |                          |      |      | 19.640.016.764 | 28.639.899.034   | 8.480.062.500     |                                    |      |      |      |      |      |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                          |      |      |                |                  |                   |                                    |      |      |      |      |      |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      |                          |      |      | 2.390.927.923  | 2.514.815.266    | 2.783.770.324.92  |                                    |      |      |      |      |      |
| Total                                                 | -                        | -    | -    |                |                  |                   |                                    |      |      |      |      |      |

### 2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tantangan dan peluang dalam menghadapi paradigma pergeseran pembangunan yang berimplikasi terhadap perencanaan paradigma perubahan pembangunan hingga tahun berikutnya oleh karena itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Berdasarkan analisis SWOT, peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta langkah-langkah yang dapat dikembangkan yaitu meningkatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang, meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan peluang, meningkatkan kekuatan dalam menghadapi ancaman dan meminimalkan kelemahan dalam menghadapi ancaman. Meningkatkan peluang dari segi produksi perikanan, jasa kelautan, pariwisata bahari, pengendalian sumberdaya ikan, perbaikan lingkungan pesisir dan laut, serta sarana dan prasarana penunjang. Berdasarkan faktor internal dan eksternal, maka melalui matriks SWOT akan ditemukan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.26**  
**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam analisis SWOT**

| Faktor Eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opportunities/ Peluang (O)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya paradigma Ekonomi Biru</li> <li>2. Potensi sumberdaya maritim untuk kesejahteraan</li> <li>3. Kelembagaan Masyarakat usaha perikanan</li> <li>4. Program yang telah dilakukan dalam kaitan Kelestarian Kawasan</li> <li>5. Kedudukan Kawasan dalam RTRW (Rencana TataRuang Wilayah) yang terintegrasi dengan RZWP3K dan pemanfaatan SDA sesuai Zonasi</li> <li>6. SDM ASN dan Pelaku Usaha Perikanan</li> <li>7. Pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan yang inklusif</li> </ol> |
| <b>Threats/ Tantangan (T)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan <i>effort</i> untuk penyamaan paradigma Ekonomi Biru di level daerah</li> <li>2. Pemanfaatan SDA yang cukup tinggi</li> <li>3. Hama penyakit dan virus pada perikanan budidaya</li> <li>4. Lembaga Keuangan Mikro masih I</li> <li>5. Usaha Masyarakat Pesisir masih Skala Kecil</li> <li>6. Pasar Ekspor dan Domestik</li> <li>7. Mitra Usaha</li> <li>8. Emisi Karbon, Degradasi lingkungan dan penurunan mutu air</li> <li>9. Keterampilan, Pola Pikir dan Skill SDM</li> </ol>         |

**Faktor Pengungkit**

1. Dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah
2. Generasi muda mulai peduli lingkungan
3. Peningkatan kapasitas SDM Pelaku Usaha Perikanan, fasilitasi dan Edukasi
4. Adanya RTRW yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Penguatan Petik Olah Jual (Hulu – Hilir)
6. Kelembagaan pelaku usaha perikanan yang Mandiri

**2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk berperan dalam pembangunan daerah dengan fungsi melayani kepada masyarakat pelaku usaha perikanan baik dari hulu ke hilir.

Adapun kelompok sasaran layanan yang dilayani adalah :

**1. Kelompok Pembudidaya.**

Layanan yang diberikan adalah dengan :

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha dan sertifikasi budidaya baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Melakukan pembinaan dan edukasi terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik
- Menjamin ketersediaan bibit/benur dan pengawasan pemakaian bahan obat/kimia/pakan non organik.
- Memfasilitasi akses perlindungan kepada pembudidaya melalui asuransi pembudidaya jika gagal panen atau terdampak bencana akibat perubahan iklim

**2. Kelompok Nelayan**

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha perikanan tangkap, dokumen kapal, surat ijin berlayar baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Melakukan pembinaan dan edukasi terkait Cara Penanganan Ikan diatas Kapal
- Menjamin fasilitas dan operasional PPI dan layanan Pendaratan Ikan di Pelabuhan Perikanan
- Memfasilitasi akses perlindungan kepada nelayan melalui asuransi nelayan jika gagal panen atau terdampak bencana akibat perubahan iklim
- Melakukan edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap

**3. Kelompok Petambak Garam dan pemanfaat pesisir dan laut**

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha terhadap pemanfaatan pesisir baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Melakukan pembinaan dan edukasi
- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak aktivitas pesisir dan laut

**4. Kelompok Pengolah dan Pemasar**

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha pengolahan dan pemasar, dokumen kelayakan pengolah, sertifikat BPOM, Sertifikat Halal baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi .
- Melakukan pembinaan dan edukasi
- Koordinasi dengan Unit Pengolah dan Pemasar Ikan baik Skala Kecil, Skala besar, UKM Mikro dan UMKM

**5. Masyarakat umum, Mahasiswa dan Pelajar**

- Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terkait informasi dan data
- Penerimaan kerja praktek bagi pelajar dan kerja Magang bagi Mahasiswa dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar.

-

**b. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan**

- BPOM
- Polairud
- Bappelitbangda
- Dinas Koperasi
- Dinas Perindag
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Asperli/Kospermindo
- HNSI
- Pertamina (penyediaan BBM Nelayan)
- TNI AL
- BPJS

**c. Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

- Perseroda
- Galangan Kapal IKI

**d. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

An aerial photograph of a coastal area. In the foreground, there is a body of water. A concrete pier extends from the shore into the water. Several small boats are docked at the pier. On the pier, there are some people and a few vehicles. Behind the pier, there are several buildings with red and blue roofs. The background shows a residential area with many small houses and trees.

## **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

---

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

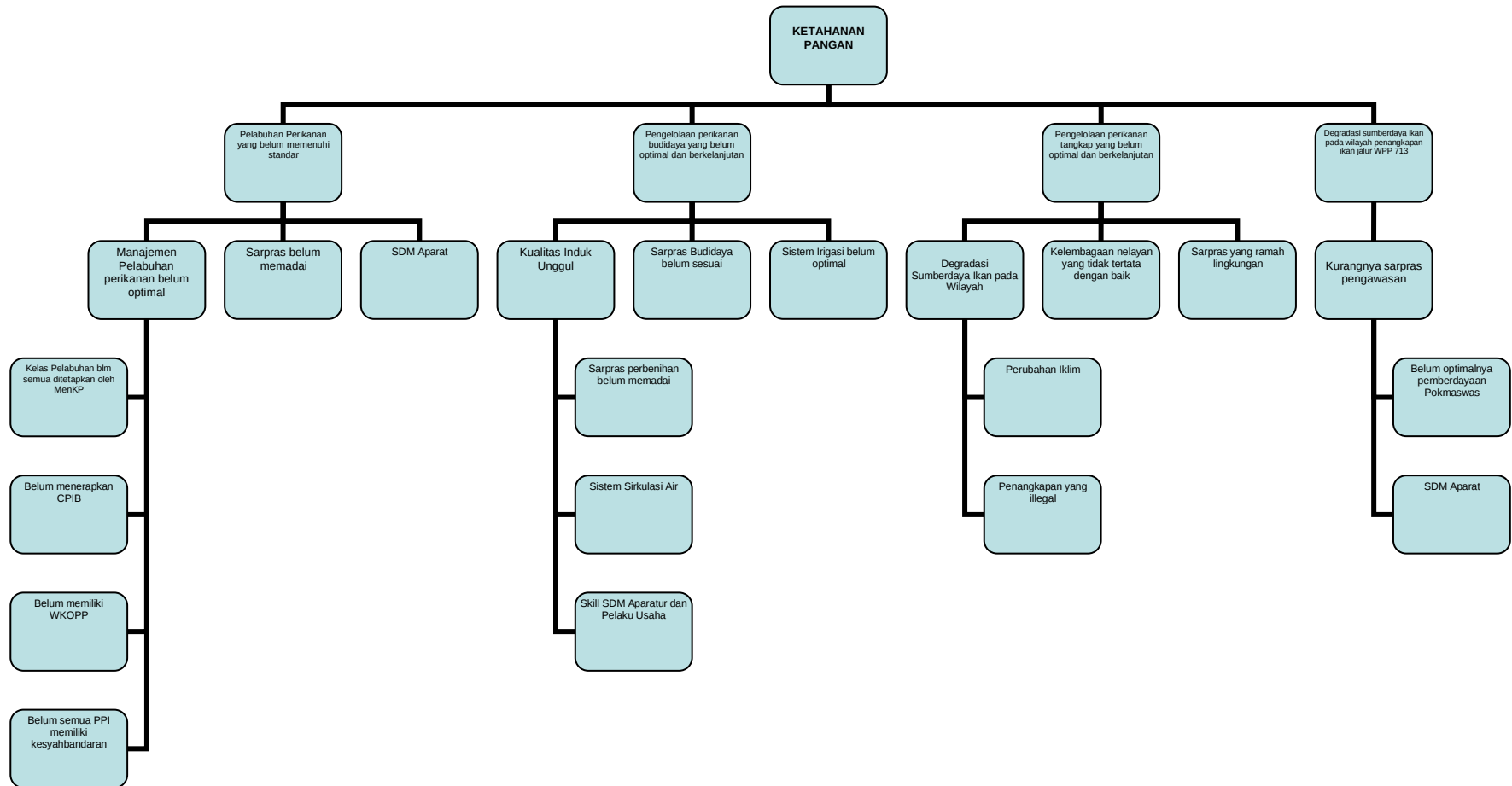
**3.1 . Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan**

**3.1.1 Permasalahan berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas serta kualitas hasil perikanan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang pada pohon masalah dan pemetaan permasalahan pada tabel berikut.

**Gambar 3.1**  
**Pohon Masalah**

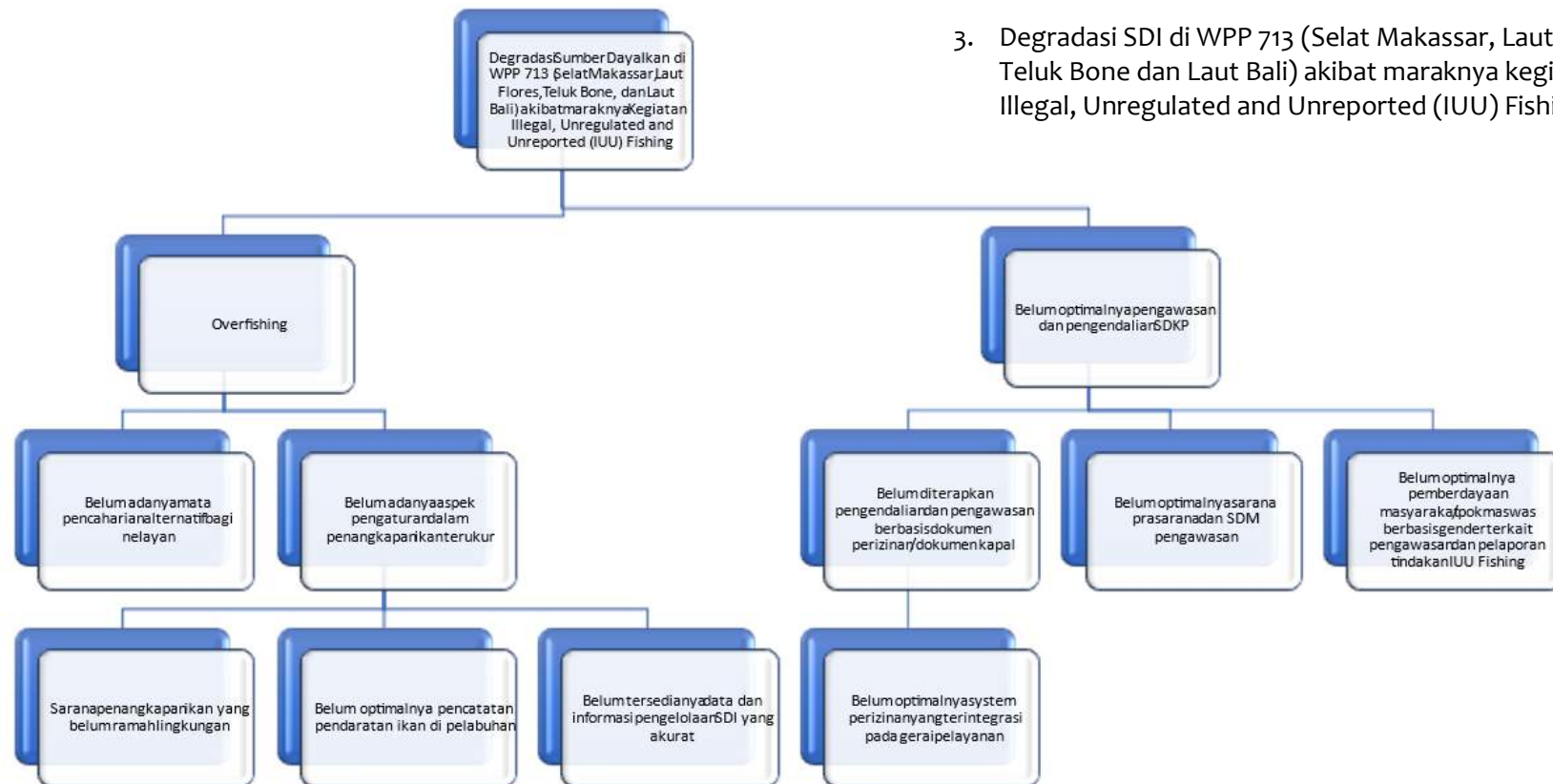


2. Masih rendahnya Produksi dan Produktivitas Garam



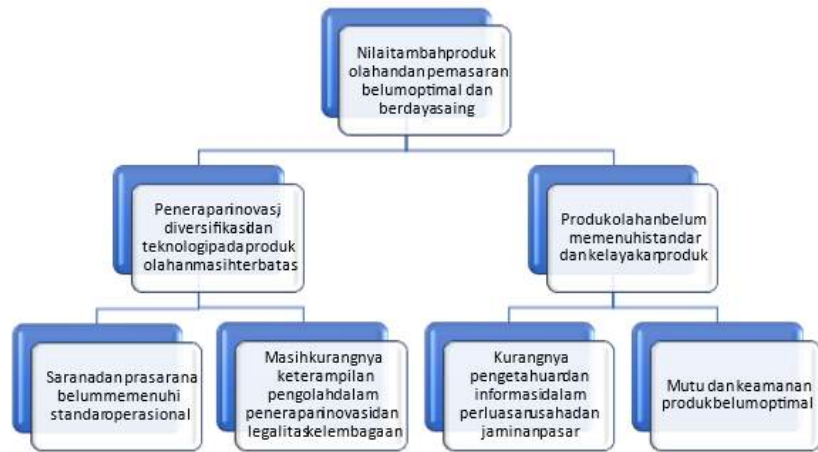
1. Pelabuhan perikanan yang belum memenuhi standar operasional



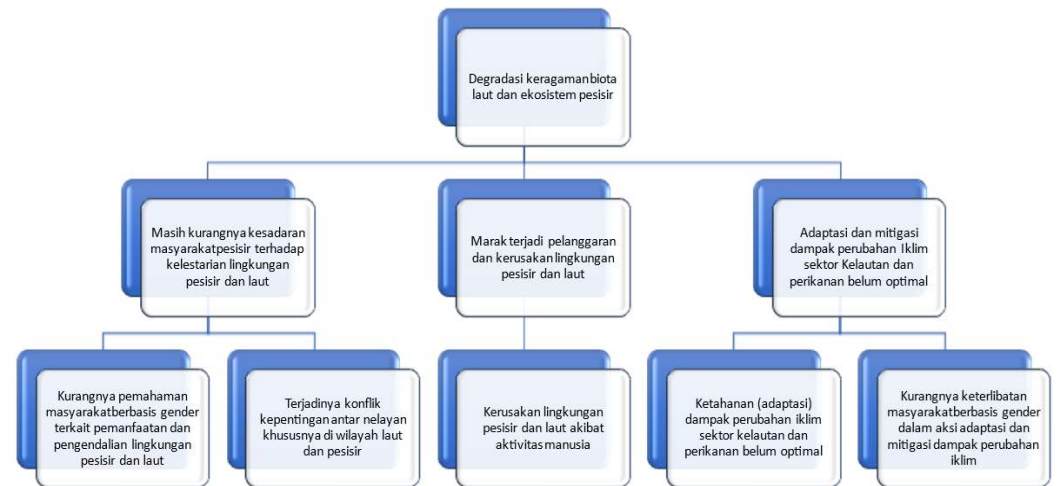


3. Degradasi SDI di WPP 713 (Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone dan Laut Bali) akibat maraknya kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing

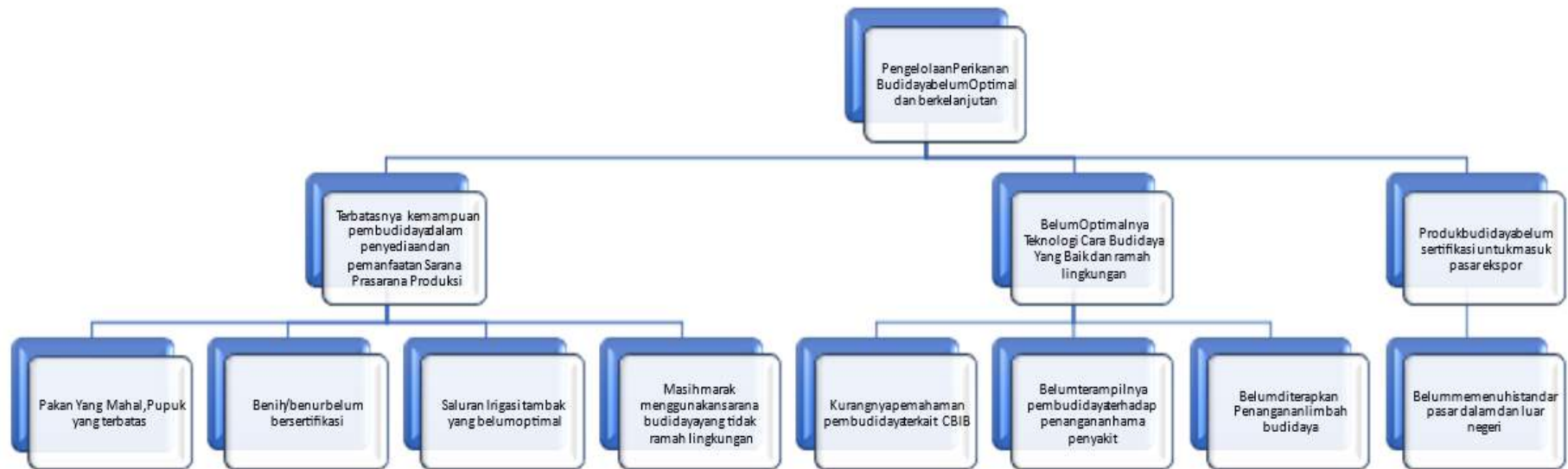
4. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdayasaing



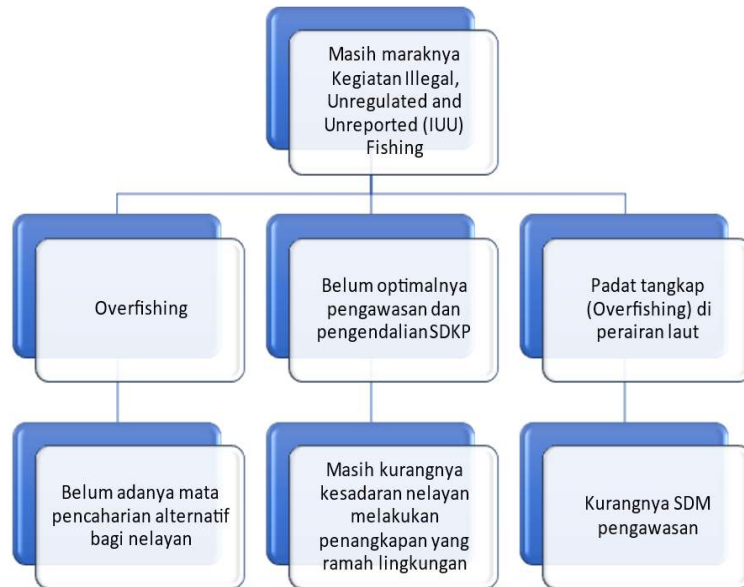
5. Degradasi keragaman biota laut dan ekosistem pesisir



6. Pengelolaan Perikanan Budidaya belum optimal dan berkelanjutan



8. Masih maraknya kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing

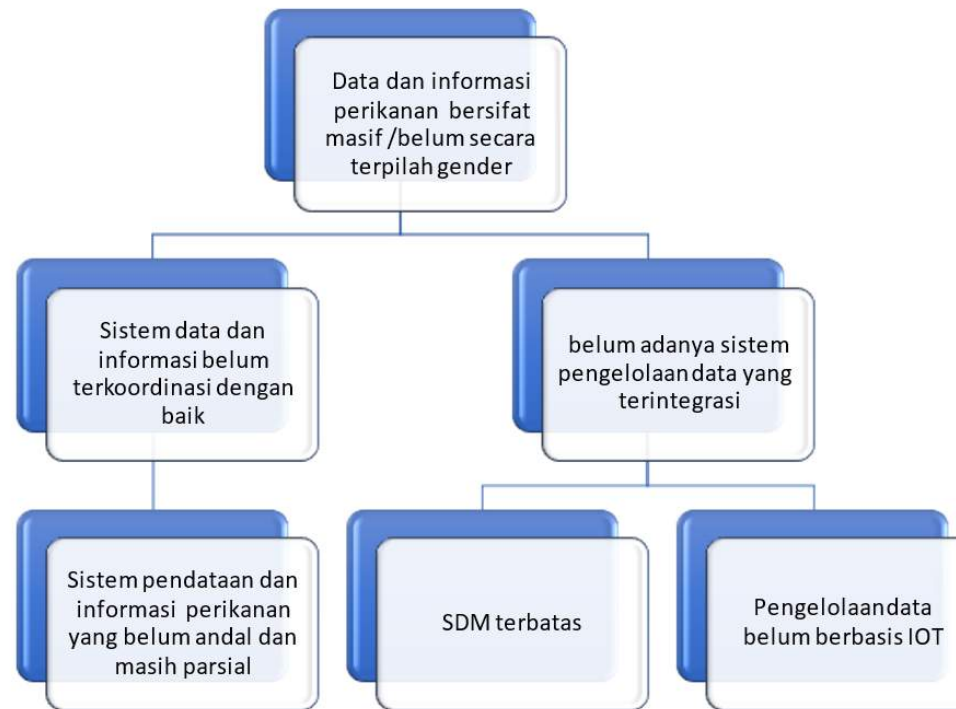


7. Belum Optimalnya Sistem Logistik Perikanan

1. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdayasaing



9. Data dan Informasi perikanan bersifat masif/belum secara terpilah gender



**Tabel.3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas**  
**Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

| No | Masalah Pokok                                                                                                 | Masalah                                                                                                                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Masih Rendahnya Produksi dan Produktivitas Garam dan terbatasnya teknologi dan infrastruktur dalam            | Perubahan Iklim<br><br>Harga jual rendah                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya inovasi teknologi peningkatan produksi garam akibat perubahan iklim</li> <li>• Masih Menerapkan system tradisional</li> <li>• Kualitas rendah, Tidak ada jaminan Pasar</li> </ul>                                                                                                        |
| 2  | Pelabuhan perikanan yang belum memenuhi standar operasional                                                   | Manajemen Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dan peningkatan kapasitas SDM masih rendah</li> <li>• Dukungan Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal</li> <li>• Status P3D pelabuhan belum tuntas</li> </ul>                                                                                                                          |
| 3  | Adanya potensi degradasi Sumber Daya Ikan di WPP 713 (Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone, dan Laut Bali) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padat tangkap (Overfishing) di perairan laut</li> <li>• Pemenuhan standar kelaikan kapal perikanan dan penggunaan API ramah lingkungan belum sesuai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya mata pencaharian alternatif bagi nelayan</li> <li>• Keterbatasan akses untuk pemenuhan dokumen kapal</li> <li>• Keterbatasan SDM pengelola data</li> <li>• Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur dan Operasionalisasi Penangkapan Ikan yang terintegrasi dan ramah lingkungan</li> </ul> |
| 4  | Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing                                      | Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kualitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mendukung inovasi daya saing produk perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Degradasi keragaman biota laut dan ekosistem pesisir karena aktivitas manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungan pesisir dan laut</li> <li>• Marak terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut</li> <li>• Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim sektor Kelautan dan perikanan belum optimal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dan pengendalian lingkungan pesisir dan laut</li> <li>• Terjadinya konflik kepentingan antar nelayan khususnya di wilayah laut dan pesisir</li> <li>• Kontribusi Pengurangan emisi gas rumah kaca (mitigasi) sektor kelautan dan perikanan masih rendah</li> <li>• Kontribusi untuk ketahanan (adaptasi) dampak perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan belum optimal</li> <li>• Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim</li> </ul> |
| 6. | Pengelolaan Perikanan Budidaya Payau belum Optimal                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Operasional budidaya masih tinggi dan keterbatasan sarana Produksi Budidaya</li> <li>- Belum Optimalnya Teknologi Cara Budidaya Yang Baik dan ramah lingkungan</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakan Yang Masih Mahal dan Ketersediaan Pupuk yang terbatas</li> <li>- Kurangnya pemahaman pembudidaya terkait CBIB dan penanganan limbah budidaya berbasis kawasan dan komoditas di kab/kota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. | Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overfishing</li> <li>• Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian SDKP</li> <li>• Padat tangkap</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya mata pencaharian alternatif bagi nelayan</li> <li>• Masih kurangnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | (Overfishing) di perairan laut                                                                                                                                                  | kesadaran nelayan melakukan penangkapan yang ramah lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM pengawasan</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 8. | Belum Optimalnya Sistem Logistik Perikanan                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penanganan logistik yang lebih kompleks karena mahal, terutama dalam proses penyimpanan dan distribusi.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan infrastruktur logistik yang belum merata di berbagai sentra perikanan</li> <li>- tidak tersedianya pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku dan logistik ikan</li> <li>- tidak tersedianya sistem informasi manajemen logistik</li> </ul> |
| 9. | Data dan informasi perikanan bersifat masif /belum secara terpilah gender | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem data dan informasi belum terkoordinasi dengan baik</li> <li>• belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi</li> </ul> | Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM terbatas</li> <li>• Pengelolaan data belum berbasis IOT</li> </ul>                                                                                                        |

Besarnya potensi kekayaan alam pesisir telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kelebihan tangkap (over fishing) di sektor perikanan, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta abrasi pantai dan gelombang pasang hingga masalah kerusakan akibat bencana alam. Permasalahan ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kemiskinan masyarakat pesisir, kebijakan yang tidak tepat, rendahnya penegakan hukum (law enforcement), dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM). Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel.3.4**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

| No  | Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah    | Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan                                                                               | Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | <b>Kelautan Dan Perikanan</b>                                            |                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                     |
| 8.1 | Produksi perikanan                                                       | Belum tercapai (<)                                        | Sarana dan prasarana belum memadai                                                         | Peningkatan dan Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana modern serta kemudahan akses usaha                                    |
|     |                                                                          |                                                           | Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal | Penerapan CBIB dan Cara Penanganan Ikan baik hasil tangkapan maupun budidaya                                                        |
|     |                                                                          |                                                           | Produksi perikanan tangkap didominasi ikan-ikan pelagis                                    | Restrukturisasi alat tangkap ikan dari alat tangkap ikan pelagis ke alat tangkap ikan demersal                                      |
|     |                                                                          |                                                           | Kurangnya akses pasar domestik dan ekspor                                                  | Penguatan kemitraan dan jaringan pasar, koordinasi lintas sektor                                                                    |
| 8.2 | Konsumsi ikan                                                            | Melampaui (>)                                             | Sistem Logistik belum optimal                                                              | Peningkatan Sarpras Logistik dan SDM                                                                                                |
|     |                                                                          |                                                           | Jaminan keamanan mutu ikan                                                                 | Fasilitasi, pembinaan dan promosi produk                                                                                            |
|     |                                                                          |                                                           | Sistem pendataan produksi masih masif                                                      | Peningkatan Sarana pengolahan data                                                                                                  |
| 8.3 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | Melampaui (>)                                             | Belum ada regulasi terkait batasan penangkapan ikan dalam batas biologis yang aman         | Melakukan kajian terkait SDI di wilayah Sulsel dan menyusun regulasi terkait penataan jalur penangkapan dan menjaga kelestarian SDI |
| 8.4 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                            | Belum tercapai (<)                                        | Lemahnya pendataan kelompok nelayan dan dukungan anggaran tidak memadai                    | Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan dinas perikanan dan penyuluh kab/kota serta melakukan pendataan ulang                     |
| 8.5 | Produksi perikanan kelompok nelayan (%)                                  | Belum tercapai (<)                                        | Lemahnya pencatatan secara tertib oleh nelayan yang telah memanfaatkan bantuan             | Melakukan pembinaan dan meningkatkan keterampilan nelayan dalam manajemen kelompok dan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan         |
| 8.6 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial   | Melampaui (>)                                             | Efektivitas rencana pengelolaan sesuai RZWP3K                                              | Penyusunan dokumen pengelolaan dan rencana aksi disusun setiap tahun dan melakukan koordinasi dengan Cabang dinas                   |
| 8.6 | Nilai tukar nelayan                                                      | Belum tercapai (<)                                        | Indeks yang dikeluarkan nelayan cukup tinggi                                               | Subsidi dan sarpras produksi yang lebih efisien dan ekonomis                                                                        |

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi

Renstra 2024-2026 adalah dokumen perencanaan transisi masa pemilihan kepala daerah dimana mengacu pada Visi, Misi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pencapaian visi dan misi, Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu menurunnya produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPD 2024-2026, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah menurunnya pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pasca pandemic Covid-19. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan belum berpedoman pada arahan tataruang dan zonasi WP3K dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan, proporsi penangkapan ikan dan praktek IUU Fishing. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel. 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan  
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

| <b>Visi Sulawesi Selatan (RPJPD) :</b><br><b>"SULSEL SEBAGAI DAERAH TERKEMUKA DI INDONESIA BERBASIS KEMANDIRIANAN LOKAL<br/>DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                         | Misi dan Program /Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan               | Faktor                                                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Penghambat                                                                       | Pendorong                                                                |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                         | (4)                                                                              | (5)                                                                      |
| 1                                                                                                                                                          | <b>Misi 5 :</b><br>Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional<br><b>Sasaran :</b><br>Berkembangnya posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar budaya bahari dan penggerak interkoneksi maritim di Indonesia Timur | 1. Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan                                        | Jumlah dan kualitas SDM, Sarpras pendukung operasional yang ,odern belum optimal | Kebijakan dan dukungan anggaran                                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah                             | Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas                                    | Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang masih dibawah standar | Belum menerapkan CBIB, CPIB, Aspek pasar, SDM, Prasarana yang belum memadai      | Kebijakan dan dukungan anggaran dan potensi SDA                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing                 | Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas                | Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor |
|                                                                                                                                                            | Penguatan pada on Mina Farm :<br>Program :                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan                                             | 1. Sarana dan prasarana pelabuhan                                                | 1. Kerjasama dengan lintas                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan perikanan tangkap</li> <li>• Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> </ul> <p>Penguatan pada Hilirisasi: Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul> <p>Penguatan pada Pembangunan berkelanjutan Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> </ul> | <p>dan TPI sehingga kualitas produksi kurang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum meratanya penerapan teknologi untuk budidaya, penangkapan serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan</li> <li>3. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya &amp; Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok</li> <li>4. Sebagian besar operasional usaha perikanan skala kecil</li> <li>5. Nelayan bergantung pada Ponggawa Sawi</li> <li>6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing</li> <li>7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai</li> <li>8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas</li> </ol> | <p>belum Optimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penerapan teknologi pada sector kelautan perikanan terbatas dikarenakan SDM baik itu pembudidaya, nelayan maupun pengolah pemasar masih belum bisa mengoptimalkan teknologi</li> <li>3. Kelompok nelayan, Pembudidaya &amp; Pengolah masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi</li> <li>4. Kurangnya informasi akses perbankan</li> <li>5. Kegiatan pengawasan belum optimal, penertiban Dokumen kapal dan usaha perikanan lainnya, SDM pengawas masih kurang, sarpras pengawasan belum optimal</li> <li>6. Zona</li> </ol> | <p>sektor dan stakeholder terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kualitas SDM pada sector kelautan dan perikanan</li> <li>3. Regulasi, Kebijakan, dan dukungan anggaran</li> <li>4. Memanfaatkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam akses permodalan pada perbankan</li> <li>5. Penyusunan RAD terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3K</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | mangrove dan padang lamun akibat adanya eksploitasi besar-besaran | <p>pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani</p> <p>7. Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut</p> <p>8. Penguatan dan pengelolaan kelembagaan konservasi serta rehabilitasi ekosistem pesisir belum optimal</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3.3 Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L dan OPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman

bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Isu strategis dan permasalahan pada sektor kelautan dan Perikanan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan 4) Hilirisasi hasil perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Sulawesi Selatan.

Keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024**

| SASARAN STATEGISDAN<br>INDIKATOR KINERJA                           |                                                                                                | 2019<br>(realisasi) | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>                                    |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| <b>SS 1. Masyarakat KP yang meningkat kesejahteraannya</b>         |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| 1                                                                  | Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP                                                             |                     | 59,16  | 60,31  | 61,47  | 62,66  | 63,87  |
| <b>CUSTOMERS PERSPECTIVE</b>                                       |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| <b>SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat</b>                      |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| 2                                                                  | Pertumbuhan PDB Perikanan (%)                                                                  | 5,81                | 7,9    | 8,11   | 8,31   | 8,51   | 8,71   |
| 3                                                                  | Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)                                                      | 4,93                | 6,17   | 6,43   | 6,86   | 7,27   | 7,55   |
| 4                                                                  | Konsumsi ikan (kg/kap/thn)                                                                     | 54,49               | 56,39  | 58,08  | 59,53  | 61,02  | 62,05  |
| <b>SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan</b> |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| 5                                                                  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%) | -                   | ≤53,7% |        |        |        | ≤80%   |
| 6                                                                  | Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)                                                     | 23,14               | 23,4   | 24,1   | 25,1   | 26     | 26,9   |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>                                |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| <b>SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat</b>        |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| 7                                                                  | Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (org)     | -                   | 17.175 | 17.696 | 18.296 | 18.916 | 19.546 |
| <b>SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan</b>             |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| 8                                                                  | Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)                      | -                   | 5      |        |        |        | 15     |
| <b>SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab</b>                |                                                                                                |                     |        |        |        |        |        |
| 9                                                                  | WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)                                 | -                   | 3      | 5      | 7      | 11     | 11     |
| 10                                                                 | Penyelesaian penataan ruang                                                                    | -                   | 24     |        |        |        | 102    |

|                                                    |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                    | laut dan zonasi pesisir (RZ)                                          |       |       |       |       |       |       |
| <b>SS 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing</b> |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
| 11                                                 | Produksi perikanan (Jt Ton)                                           | 23,86 | 26,46 | 27,86 | 29,39 | 30,98 | 32,72 |
| 12                                                 | Produksi garam rakyat (Jt Ton)                                        | 2,85  | 3     | 3,1   | 3,2   | 3,3   | 3,4   |
| <b>SS 8. Industrialisasi KP yang berdaya saing</b> |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
| 13                                                 | Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing | -     | 54,18 | 60    | 65    | 70    | 75    |
| 14                                                 | Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | 93,57 | 89    | 90    | 91    | 92    | 93    |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>                |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
| <b>SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik</b>     |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
| 15                                                 | Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP                            | 78,60 | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    |

Tahun 2022 Sulawesi Selatan berkontribusi terhadap capaian produksi hasil kelautan dan perikanan sebesar 15,3 % yaitu sebesar 4,5 Juta ton yang terdiri atas produksi perikanan tangkap dan budidaya sedangkan untuk garam hanya mampu berkontribusi sebesar 4,9% yaitu sebesar 140 ribu ton. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan garam adalah terbatasnya sarana dan prasarana produksi serta penerapan inovasi teknologi untuk dapat memproduksi setiap bulan. Kemudian untuk pengembangan pelabuhan perikanan pada tahun 2022 sebanyak 19 unit PPI. Permasalahan yang dihadapi untuk pelabuhan perikanan yaitu pemanfaatan pelabuhan perikanan yang ada belum optimal disebabkan sarana dan prasarana belum memadai untuk pelabuhan perikanan Higienis.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat empat major project terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
3. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan
4. Pasar Ikan (Fish Market) Bertaraf Internasional

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan

RPD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Masalah utama yang dihadapi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah tersedianya bahan baku yang cukup namun tidak ada peningkatan diversifikasi pada produk sehingga kurang bersaing pada pangsa pasar baik domestik maupun ekspor. Kemudian Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan pengelolaan kawasan lindung perairan.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan yang relevan dengan Program Kegiatan**

| No | Permasalahan                                                                                                                                                                                              | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                          | Target      |             |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                            | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1. | Kualitas dan mutu produk perikanan hasil tangkapan belum optimal, perikanan tangkap didominasi ikan-ikan pelagis, kapal penangkapan ikan masih tradisional dan biaya operasional melaut yang cukup tinggi | Program pengelolaan perikanan tangkap            | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                                    | 398.565,2   | 389.052,4   | 396.992,3   | 404.932,2   | 413.030,8   |
| 2  | Kurangnya akses pasar domestik dan ekspor, Sistem Logistik belum lancar, kualitas produk olahan masih kurang berdayasaing                                                                                 | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Nilai produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (Hilirisasi) (Rp.Milyar)                   | 293,12      | 298,10      | 304,96      | 311,06      | 317,28      |
| 3  | Produk yang dijual dalam bentuk raw material namun ukuran, kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya belum optimal                                                                            | Program pengelolaan perikanan Budidaya           | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                   | 3.662.761,4 | 3.703.829,0 | 3.898.767,4 | 4.093.705,8 | 4.298.391,1 |
|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Persentase ketersediaan benur berkualitas                                                  | 90%         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 4  | Masih adanya Pelanggaran terkait IUU fishing.                                                                                                                                                             | Program Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan     | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | 82,4%       | 86,88%      | 87,48%      | 88,73%      | 89,85%      |

|   |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                            |        |        |        |        |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 5 | Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Persentase Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%) | 67,28  | 67,29  | 67,30  | 67,31  | 67,33 |
|   |                                                                                                                                                                                          |                                                             | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan                     | 23,91% | 15,22% | 37,50% | 68,75% | 100%  |

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

#### Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.5

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

| No  | Rencana Struktur Ruang        | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD  | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                           | (3)                     | (4)                                                                   | (5)                                                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Pengembangan kawasan produksi | Sentra Produksi         | Hilirisasi dan peningkatan Produksi                                   | Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah | Sentra Produksi BD Payau : Kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, Luwu Timur, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Wajo<br>Sentra Produksi BD Laut : Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Pinrang, Barru, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Palopo<br>Sentra Produksi BD Air Tawar : |

| No | Rencana Struktur Ruang              | Struktur Ruang Saat Ini           | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                   |                                                                       |                                                                 | Enrekang, Sidrap, Tator, Torut, Soppeng<br>Sentra Produksi Penangkapan Ikan :<br>Sinjai, Bulukumba, Takalar, Bone, Palopo, Selayar |
| 2  | Pengembangan kawasan Hilirisasi     | Pusat pertumbuhan                 | Hilirisasi                                                            | pertumbuhan ekonomi daerah                                      | Makassar, Maros, Bantaeng                                                                                                          |
| 3  | Pengembangan Kawasan Industri       | Hinterland dan pemasaran (Outlet) | Hilirisasi, Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing         | pertumbuhan ekonomi daerah                                      | Makassar, Maros                                                                                                                    |
| 4  | Pengembangan Kawasan Konservasi     | Zonasi Wilayah Pesisir dan P3K    | Pengawasan, Konservasi, Penataan Dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut    | Keberlanjutan dan kelestarian lingkungan                        | Luwu Utara, Selayar, Pangkep, Makassar, Barru                                                                                      |
| 5  | Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus | Kawasan Strategis                 |                                                                       | pertumbuhan ekonomi daerah                                      | Kepulauan Selayar                                                                                                                  |

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (up-streem agribusiness) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (on-farm agribusiness) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (downstream agribusiness) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sitem jasa penunjang (supporting institution) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang

memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang, Peran kawasan terkait dengan rencana tata ruang bagi pengembangan perekonomian, Pengembangan daya tarik kawasan (dukungan regulasi dan kemudahan investasi).

Rencana Struktur Tata Ruang menentukan interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, secara garis besar rencana struktur ruang kawasan minapolitan dikabupaten/kota terdiri atas : Pusat satuan kawasan perikanan, pusat distrik minapolitan (pusat pertumbuhan), kota minapolis (Sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet). Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

#### **1. Kawasan Andalan Darat**

- Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya
- Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya
- Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya
- Kawasan andalan Pare-pare dan sekitarnya

#### **2. Kawasan Andalan Laut**

- Kawasan andalan Laut Kapoposan dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya

#### **3. Kawasan potensil yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi

- Kawasan potensil budidaya Rumput Laut meliputi wilayah perairan pantai dan tambak di masing-masing kabupaten : Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

- Kawasan potensil budidaya udang bandeng meliputi tambak-tambak di masing-masing kabupaten : Pinrang, Barru, Pangkep, Bone dan Wajo
- Kawasan potensil perikanan tangkap meliputi Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone

#### **4. Kawasan Wisata Bahari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

- Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep)
- Kawasan Wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar)

#### **5. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang**

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam
- Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan
- Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau dan ekosistem lainnya seperti rawa pasang surut dan padang lamun.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat
- Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti
- Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan

- Pemanfaatan untuk pariwisata bahari

- Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

#### **6. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya**

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhanan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Wilayah pesisir Sulsel telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumber-daya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan

sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulsel bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

- Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir termasuk laju degradasi mangrove semakin hari meningkat seiring dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
- Penangkapan ikan
- Pencemaran laut (sampah plastic, limbah industry dan sarana transportasi)

Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecendrungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan diwilayah pesisir Sulawesi Selatan seperti:

1. Ekosistem mangrove, rawa pasang surut, padang lamun dan terumbu karang sedang mengalami kerusakan yang sangat berat.

2. Kondisi terumbu karang sebesar 40,6 % rusak, 31.5% sedang dan hanya 27.9 % yang sangat baik.
3. Kualitas perairan laut dan daerah dan degradasi ekosistemnya.
4. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.
5. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.
6. Laju degradasi mangrove semakin hari semakin meningkat seiring dengan maraknya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman. Jumlah total hutan mangrove seluas 45.505,5 ha, Kondisi baik 10.568,9 Ha, Sedang 12.385,7 Ha, Rusak 22.550,9 Ha dan tersebar di 18 kab/ kota, diperkirakan 30 % yang telah mengalami gangguan dan dalam proses dijadikan tambak atau penggunaan lahan untuk industry dan pemukiman.
7. Kerusakan memanjang dari wilayah pesisir pantai barat yang mencakup kabupaten Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto hingga kewilayah pantai timur, mulai dari Kabupaten Sinjai hingga daerah Luwu akibat perubahan iklim.

Ketika hutan mangrove rusak, maka ekosistem disekitarnya juga akan rusak dan bahkan pengaruhnya bisa berakibat luas yaitu terjadi kepunahan ekosistem. Bila pemerintah setempat melakukan pembiaran dikhawatirkan keberlangsungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut lainnya dan diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya para nelayan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan sebagai masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya dimana 80%

masyarakat pesisir adalah masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah. Disisi lain dengan semakin berkurangnya populasi ikan dikawasan pesisir mengakibatkan hasil tangkapan nelayan pun semakin berkurang dan membuat nelayan terpaksa mencari ikan pada jarak yang semakin jauh melewati wilayah laut. Semakin bertambah besar-nya biaya operasional para nelayan dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan konflik antar nelayan yang saling memperebutkan lokasi penangkapan ikan. Dengan demikian diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatur dan mengelolah wilayah pesisir ini agar nelayan menangkap ikan tanpa merusak ekosistem lainnya dan terlibat konflik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mencoba sumber mata pencaharian baru seperti pengembangan rumput laut dll.

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat lautpun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan. Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya laju degradasi mangrove dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir, hilangnya habitat satwa daratan dan lautan, hilangnya pulau, kematian dari berbagai jenis satwa dan flora serta dampak-dampak lingkungan lainnya seperti abrasi, intrusi, banjir dan kematian organisme perairan serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

### **3.1.2 Telaahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sulawesi selatan**

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam RTRW TERINTEGRASI RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan sesuai perda No 3 tahun 2022. Adapun ruang lingkup RZWP3K terdiri atas Tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan WP3K, Alokasi Ruang, arahan pemanfaatan ruang, Pulau-pulau kecil, Mitigasi bencana, Pengendalian dan Pengawasan. Batas wilayah perencanaan RZWP3K meliputi :

- a. Kearah Darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir

- b. Kearah Laut sejauh 12 Mil Laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan /atau ke perairan kepulauan
- c. Pengaturan wilayah pesisir sesuai dengan ketentuan dalam RTRW

Pulau – Pulau kecil provinsi dalam batas wilayah perencanaan RZWP3K berjumlah 332 Pulau meliputi :

Tabel. 3.6. Jumlah pulau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota

| No | Kabupaten/Kota                 | Jumlah pulau     |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1  | Kabupaten Kepulauan Selayar    | 131 pulau        |
| 2  | Kabupaten Bulukumba            | 5 pulau          |
| 3  | Kabupaten Jeneponto            | 1 pulau          |
| 4  | Kabupaten Takalar              | 9 pulau          |
| 5  | Kabupaten Sinjai               | 10 pulau         |
| 6  | Kabupaten Bone                 | 2 pulau          |
| 7  | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 140 pulau        |
| 8  | Kabupaten Barru                | 9 pulau          |
| 9  | Kabupaten Pinrang              | 4 pulau          |
| 10 | Kabupaten Luwu Timur           | 4 pulau          |
| 11 | Kabupaten Luwu Utara           | 1 pulau          |
| 12 | Kota Makassar                  | 14 pulau         |
| 13 | Kota Palopo                    | 1 pulau          |
| 14 | Sulawesi Selatan               | 1 pulau          |
|    | <b>Jumlah total Pulau</b>      | <b>332 pulau</b> |

Garis pantai sepanjang  $\pm 1.993,7$  km (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh kilometer). Luas wilayah lautan  $\pm 94.399,85$  Km<sup>2</sup> (kurang lebih sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima kilometer persegi), yang meliputi 4 (empat) kawasan laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone.

#### **Pengelolaan WP-3-K Provinsi bertujuan untuk:**

1. Perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal;
2. Pembangunan sosial ekonomi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat;

3. Pemberdayaan masyarakat, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan
4. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni penataan wilayah, sinergi antar sektor dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum.

**Kebijakan pengelolaan WP-3-K Provinsi, Meliputi:**

- a. Kebijakan perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  1. Mewujudkan pengendalian laju kerusakan ekosistem di bawah tingkat kemampuan pemulihannya;
  2. Mewujudkan peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan;
  3. Mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan lahan kritis lainnya;
  4. Memelihara dan mengembangkan konservasi WP-3-K; dan
  5. Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- b. Kebijakan pembangunan sosial, meliputi:
  1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kesehatan sumber daya manusia;
  2. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di WP-3-K;
  3. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  4. Mewujudkan pengembangan mata pencaharian alternatif di WP-3-K;
  5. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan produksi perikanan;

6. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk perikanan kelautan;
  7. Mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan;
  8. Mewujudkan pengembangan daya tarik objek dan daerah tujuan wisata bahari;
  9. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pengembangan wisata bahari;
  10. Mewujudkan pembangunan sistem tata-niaga hasil perikanan yang berkeadilan; dan
  11. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kemudahan dalam mengakses lembaga perbankan dan informasi pasar.
- c. Kebijakan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal;
  2. Mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tanggap terhadap bencana; dan
  3. Mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengantisipasi perubahan iklim.
- d. Kebijakan penataan kelembagaan dan penegakan hukum, meliputi:
1. Mewujudkan pengendalian kegiatan reklamasi pantai untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan pesisir;
  2. Mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum;
  3. Mewujudkan penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi antar wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan; dan
  4. Mewujudkan pengembangan sistem informasi terpadu.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengendalian laju kerusakan ekosistem di bawah tingkat kemampuan pemulihannya terdiri atas:

1. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan; dan
2. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan terdiri atas:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem WP-3-K; dan
2. Peningkatan pengetahuan konservasi ekosistem WP-3-K dalam kurikulum lokal pendidikan formal.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan lahan kritis lainnya terdiri atas:

1. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi berat/kritis;
2. Peningkatan sistem monitoring, controlling dan surveillance berbasis masyarakat;
3. Peningkatan status Kawasan Konservasi ekosistem WP-3-K; dan
4. Peningkatan dan pengembangan model konservasi berbasis masyarakat.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pemeliharaan dan pengembangan konservasi WP-3-K terdiri atas:

1. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem melalui pengelolaan Kawasan Konservasi WP-3-K; dan
2. Peningkatan dan pengembangan perlindungan biota laut langka.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri atas:

1. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan WP-3-K; dan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan

di setiap kegiatan pemanfaatan WP-3-K.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas dan kesehatan sumber daya manusia terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan WP-3-K; dan
2. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan program penyuluhan kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di WP-3-K terdiri atas:

1. Peningkatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di WP-3-K; dan
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang terbangun di WP-3-K.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri atas:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut di WP-3-K;
2. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut yang telah ada di WP-3-K;
3. Peningkatan kerjasama swasta dan masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana transportasi laut; dan
4. Peningkatan konektivitas antara transportasi darat, laut maupun udara di wilayah pesisir.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan mata pencaharian alternatif di WP-3-K terdiri atas:

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
2. Peningkatan penciptaan mata pencaharian alternatif.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan produksi perikanan terdiri atas:

1. Peningkatan produksi dan nilai produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Peningkatan pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis; dan
3. Peningkatan intensifikasi sistem perikanan budidaya dan teknologi perikanan tangkap.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk perikanan kelautan terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan sistem pengolahan ikan yang higienis;
2. Peningkatan kualitas produk perikanan;
3. Peningkatan manajemen mutu terpadu unit pengelolaan hasil perikanan;
4. Peningkatan pembinaan usaha kelompok masyarakat perikanan; dan
5. Peningkatan penumbuhan wirausaha baru.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan iklim pendukung investasi di WP-3-K;
2. Peningkatan pengembangan sistem jaringan distribusi komoditi strategis;
3. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan; dan
4. Peningkatan produksi perikanan.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan daya tarik objek dan daerah tujuan wisata bahari terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan obyek wisata unggulan dan promosi wisata;
2. Peningkatan pengembangan manajemen wisata;

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari; dan
4. Peningkatan produk domestik regional bruto daerah melalui sektor wisata.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pengembangan wisata bahari terdiri atas:

1. Peningkatan dan perluasan kerjasama antara pemangku kepentingan wisata bahari; dan
2. Peningkatan pengembang sarana dan prasarana wisata bahari.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pembangunan sistem tata-niaga hasil perikanan yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 10 terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan pengembangan sistem tataniaga yang efisien; dan
3. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomipesisir.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kemudahan dalam mengakses lembaga perbankan dan informasi pasar terdiri atas:

1. Peningkatan inventarisasi dan pengelompokan jenis usaha;
2. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi di WP-3-k;
3. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha; dan
4. Peningkatan penguatan permodalan dan manajerial usaha kecil menengah bukan bank perkreditan rakyat serta koperasi.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal sebagaimana terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan pola kemitraan antar pemerintah, lembaga

- swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program di WP-3-K;
2. Peningkatan pemberian wewenang yang lebih luas bagi lembaga lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K; dan
  3. Peningkatan Kearifan Lokal sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya pesisir dan penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tanggap terhadap bencana terdiri atas:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kemampuan lokal; dan
2. Peningkatan pelatihan mitigasi bencana, resiko bencana dan ketahanan terhadap bencana kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem mitigasi yang telah dibangun.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengantisipasi perubahan iklim terdiri atas:

1. Peningkatan sosialisasi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
2. Peningkatan antisipasi perubahan iklim.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengendalian kegiatan Reklamasi pantai untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan terdiriatas:

1. Peningkatan sosialisasi pengendalian kegiatan Reklamasi pantai;
2. Peningkatan pemberian sanksi yang tegas kepada kegiatan Reklamasi yang merusak lingkungan; dan
3. Peningkatan penuntutan kompensasi dari pengelola/pengembang perusak pantai.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum terdiriatas:

1. Peningkatan penegakan hukum dan norma sosial;
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum;
3. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan
4. Peningkatan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi antar wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan terdiri atas:

1. Peningkatan optimalisasi peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam pengelolaan WP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan; dan
2. Peningkatan penerapan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dan RZWP-3-K sebagai basis perizinan di WP-3-K.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sistem informasi terpadu terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan basis data dan jaringan informasi wisata bahari; dan
2. Peningkatan pengembangan pusat informasi wisata bahari.

Alokasi Ruang WP-3-K, meliputi:

1. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU;
2. Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat KK; dan
3. Alur Laut yang selanjutnya disingkat AL.

Selain Alokasi Ruang, sebagian perairan provinsi dialokasikan KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Ruang untuk KPU terdiri atas:

1. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
2. Zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
3. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
4. Zona hutan mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M;
5. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
6. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
7. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;

8. Zona pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR;
9. Zona industri yang selanjutnya disebut KPU-ID;
10. Zona bandar udara yang selanjutnya disebut KPU-BU;
11. Zona fasilitas umum yang selanjutnya disebut KPU-FU;
12. Zona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut KPU-PK; dan
13. Zona jasa perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP.

Alokasi Ruang untuk KK dikategorikan atas:

1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP<sub>3</sub>K;
2. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP;
3. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM.

Selain Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut KK-KL. Alokasi Ruang untuk AL terdiri atas:

1. Alur pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP;
2. Pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
3. Migrasi biota laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.

Alokasi Ruang untuk KSN terdiri atas:

1. Daerah latihan militer yang selanjutnya disebut KSN-LM;
2. Pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KSN-LT; dan
3. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (MAMMINASATA) yang selanjutnya disebut KSN-Mamminasata.

Alokasi Ruang WP-3-K untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan wisata bahari berkelanjutan.

Ketentuan mengenai Alokasi Ruang RZWP-3-K dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu. Ketentuan

mengenai KPU dan/atau KK dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau subzona, dan dituangkan dalam peta dengan skala minimum 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

Tabel 3.6

Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

| No  | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel                                                                                                                                                                                                                 | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>Tujuan 14. Ekosistem Lautan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>TARGET 14. Pada tahun 2022, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p><b>Persentase Kepatuhan pelaku Usaha</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius sehingga merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya</li> <li>Rusaknya ekosistem akan mempengaruhi jumlah stock ikan sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan pangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan Kapasitas SDM nelayan terhadap tekno-logi alat tangkap, target tang-kapan, &amp; daerah penangkapan ikan masih rendah</li> <li>Teknologi penangkapan ikan sangat konvensional dan sulit berubah.</li> <li>Sarana dan prasarana tempat pendaratan ikan serta fasilitas kebutuhan melaut (operasi penangkapan ikan) masih sangat terbatas</li> <li>Penanganan dan pengolahan ikan belum menjadi perhatian yang serius (terkesan seadanya)</li> <li>Mekanisme dan jaringan pemasaran masih sangat konvensional,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Semangat etos kerja nelayan yang sangat kuat</li> <li>Potensi sumberdaya perikanan belum termanfaatkan secara optimal</li> <li>Kebutuhan pasar akan pangan sumberdaya ikan semakin meningkat</li> <li>Perhatian terhadap Perbaikan infrastruktur pendukung serta sarana dan prasarana perikanan tangkap semakin besar</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                      |                                                                                                                  | dengan metode transaksi langsung                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b> | <b>Ketersediaan kerangka Hukum/Regulasi/Kebijakan/Kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kebijakan hak akses nelayan dan perlindungan nelayan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pola pikir dan Kualitas SDM</li> <li>Eksploitasi yang berlebihan</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Pembiayaan</li> <li>Penyuluhan</li> </ul>                                             |
| <b>2</b> | Jumlah kab/Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama perbankan dan akses</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitra Usaha</li> <li>Akses perbankan</li> <li>Jalur penangkapan ikan</li> <li>Kesadaran masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi Perikanan</li> <li>Kebijakan dan Regulasi</li> <li>Perencanaan dan Evaluasi</li> </ul> |
| <b>3</b> | <b>Jumlah nelayan yang terlindungi</b>                                                                                               | Ketersediaan data kelompok nelayan yang valid                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya aturan dan regulasi</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluhan</li> <li>Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)</li> </ul>                        |

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan self assesment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLSH diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasi dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan Infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
2. Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan
3. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan
4. Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan
5. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
6. Belum Optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur
7. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah.
8. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
9. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang,
10. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
11. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi.
12. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing,
13. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan dan pariwisata bahari khususnya di wilayah laut dan pesisir serta padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai.
14. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran

Sehingga berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2024 - 2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha pada sektor kelautan dan perikanan.
2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan Kawasan dan komoditas unggulan akibat masih rendahnya SDM yang terampil pada aparatur dan pelaku usaha perikanan serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan.
3. Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih dibawah serta kurangnya akses permodalan untuk mendukung usaha baik di hulu maupun di hilir.
4. Degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta masih rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan.



## **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mendukung Poros Maritim Dunia, maka untuk itu perlu menetapkan tema pembangunan tahun 2024-2026 yaitu :

**”Sulawesi Selatan sebagai Produsen Perikanan yang berstandar Ekspor dan Berkelanjutan di Indonesia”**

Berdasarkan arahan kebijakan *Blue Economy* maka model pengembangan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas dan daya saing dari hulu ke Hilir dengan memberikan daya tarik agar wilayah lain menjadikan Sulsel sebagai konektivitas ekspor di Indonesia dengan memperbaiki kualitas Komoditas yang sudah menjadi Unggulan baru yaitu Rumput Laut, TTC, Udang, Bandeng dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 dan analisis isu strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2024 – 2026.

##### **a. Tujuan Perangkat Daerah**

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

##### **b. Sasaran Perangkat Daerah**

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
3. Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Tujuan dan Sasaran serta indikator dan target perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel. 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026**

| NO  | TUJUAN DAN SASARAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN                                      | (baseline)  | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - |              |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                 |                                                                           | 2022        | 2024                           | 2025         | 2026         |
| -1  | -2                                                                                              | -3                                                                        | -4          |                                |              |              |
| 1   | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel                            | Indeks Reformasi Birokrasi OPD                                            | 27,07       | 62,27                          | 72,37        | 77,47        |
| 1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                              | 85,80 (A)   | 86 - 88 (A)                    | 88 - 90 (AA) | 90 - 92 (AA) |
| 2.  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor kelautan dan perikanan                                  | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan                                    | 10,8        | 11,01                          | 11,23        | 11,45        |
| 2.1 | Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | Kontribusi sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)                         | 9,4         | 10,5                           | 10,82        | 11,14        |
|     |                                                                                                 | Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap nilai ekspor Sulsel (%)        | 22,39       | 22,55                          | 22,94        | 23,34        |
|     |                                                                                                 | Produksi Perikanan (ton)                                                  | 4.535.835,4 | 4.779.259,3                    | 4.875.744,5  | 4.974.039,4  |
|     |                                                                                                 | Konsumsi Ikan (kg/Kap/th)                                                 | 69,5        | 72,48                          | 73,93        | 75,41        |
| 2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan                                    | Niai Tukar Usaha Perikanan (Indeks)                                       | 109,33      | 110.84                         | 111.95       | 112.36       |
|     |                                                                                                 | Nilai Tukar Usaha Pembudidaya (indeks)                                    | 109,98      | 111,07                         | 111,63       | 112,19       |
|     |                                                                                                 | Nilai Tukar Usaha nelayan (indeks)                                        | 109,29      | 110,46                         | 111,01       | 111,56       |
| 3   | Meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan                             | Potensi penurunan emisi GRK ( ton CO <sub>2</sub> ) dari sektor perikanan | 7.004,89    | 7.351,3                        | 7.530,60     | 7.709,9      |
| 3.1 | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim  | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)                         | 94,01       | 97,8                           | 99,7         | 100          |

|  |                                                                          |       |       |       |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  | Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)        | 67,2  | 96,08 | 96,78 | 99,67 |
|  | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | 58,72 | 59,56 | 60,75 | 61,96 |

Berdasarkan uraian atas tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan di atas serta tujuan dan sasaran dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat ditarik satu garis yang linear antara keduanya. Secara lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas**

| No | RPD                                                                                |                                                                                                     | Renstra                                                                |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                                             | Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                                              |
| 1  | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel               | 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah                                         | 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel   | 1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                              |
| 2. | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata                                | 2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas                                  | 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor kelautan dan perikanan      | 2.1. Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan |
|    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                        | 2.2 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan                                     |
| 3. | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana | 3.1. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 3. Meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan | 3.1 Meningkatnya tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan                                       |

Kemudian untuk mencapai Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 dengan menitikberatkan pada Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target sampai lima tahun. Sedangkan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi yaitu meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada

Komoditi Unggulan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas agar dapat berdaya saing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan hilirisasi berbasis kawasan, maka dikembangkan melalui :

1. Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (cluster).
2. Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
4. Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

#### **4.1.b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai Kewenangan Daerah**

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahannya sama, namun perbedaan akan nampak dari skala atau ruang lingkupnya. Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan pemerintahan masing- masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap ada hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Rincian implementasi NSPK bidang Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Sub Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen PRL)
  - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil (di luar minyak dan gas bumi);
  - b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil (di luar minyak dan gas bumi);
  - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Sub Bidang Perikanan Tangkap (Ditjen Perikanan Tangkap)
  - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  - b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30GT;
  - c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi;
  - d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal

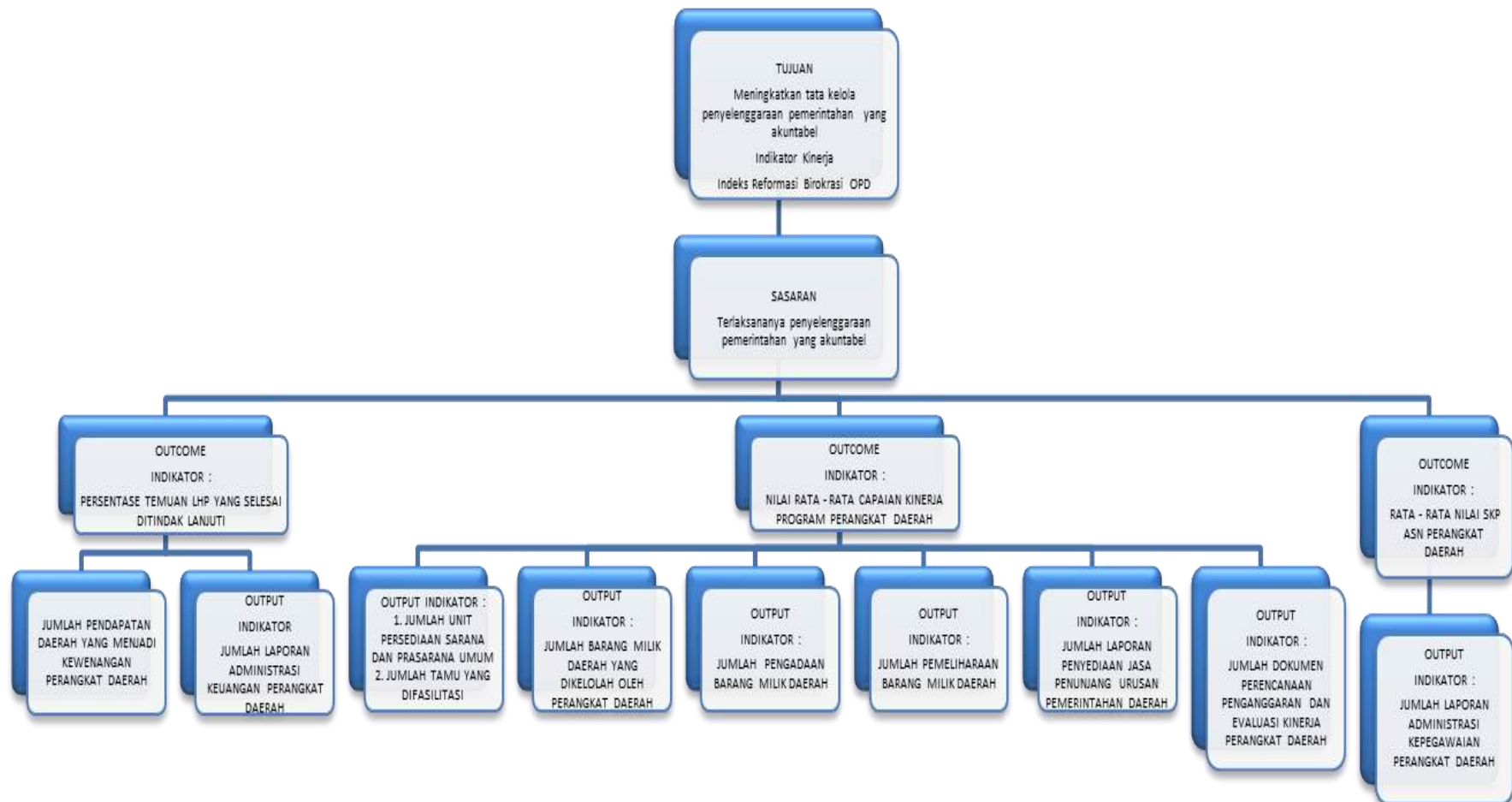
- pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5GT sampai dengan 30GT;
- e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5GT sampai dengan 30GT.
3. Sub Bidang Perikanan Budidaya (Ditjen Perikanan Budidaya)  
Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Sub Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)  
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Ditjen PDSPKP)  
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

#### **4.2 Cascading kinerja dinas kelautan dan perikanan**

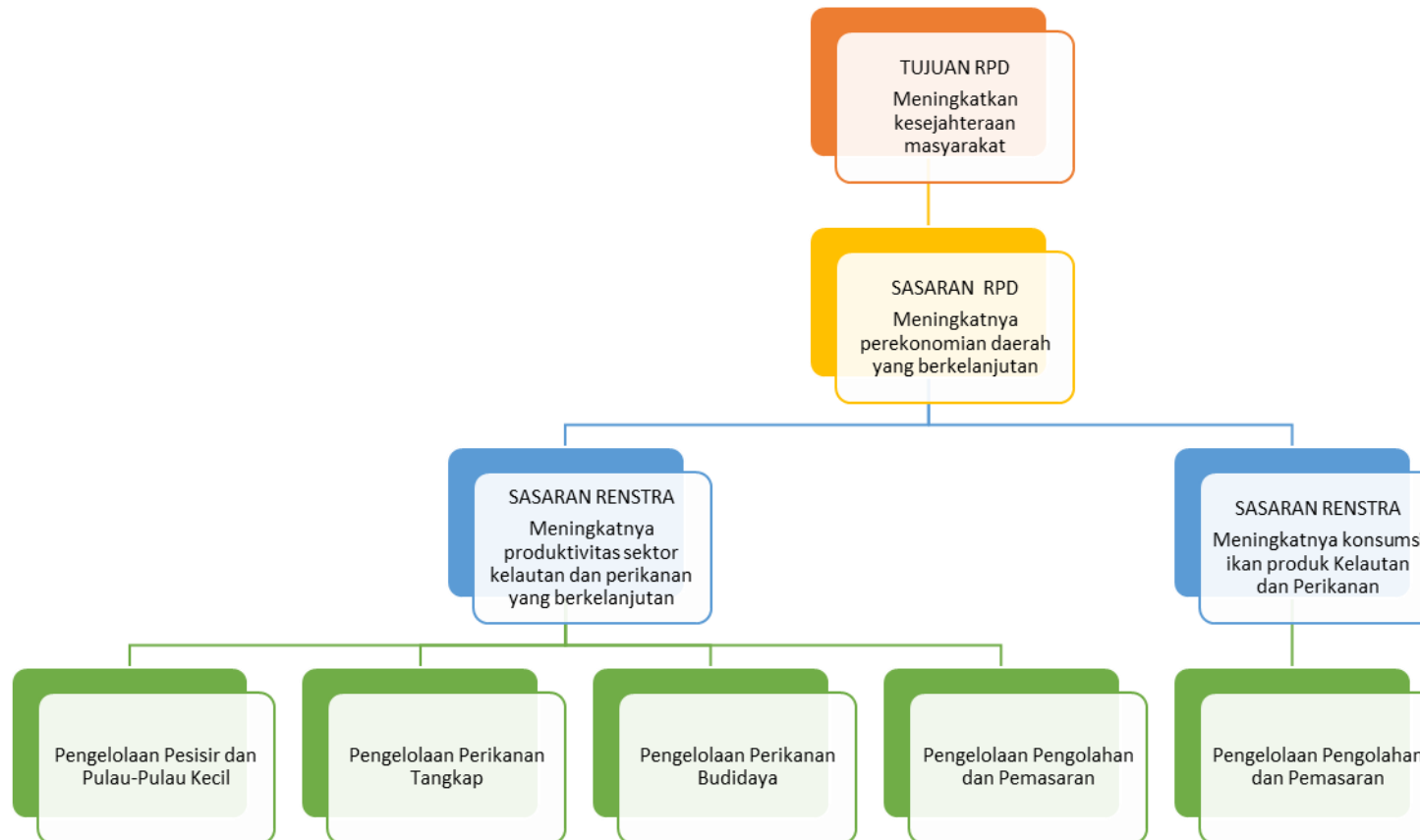
Berikut cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing:

Gambar. 1

### Cascading Tujuan Sasaran 1



**Gambar. 2**  
**Cascading Tujuan Sasaran 2**



**Gambar. 3**  
**Cascading Tujuan Sasaran 3**



A man wearing a blue raincoat and a wide-brimmed hat is carrying a large, dense green plant. He is looking upwards with a smile. The background shows a cloudy sky and a body of water. The image is framed by a blue wavy border at the bottom.

## **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH**

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan strategi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan strategi dan kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah :

**Tabel. 5.1**  
**ANALISIS SWOT**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></div> <div style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Strengths/ Kekuatan (S)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan perikanan kewenangan provinsi</li> <li>2. Potensi Perikanan yang cukup besar</li> <li>3. Pariwisata Bahari</li> <li>4. Perhubungan Laut</li> <li>5. Potensi Peluang Usaha</li> <li>6. Dukungan Pemerintah dan Regulasi</li> </ol> | <b>Weaknesses/ Kelemahan (W)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal perikanan tangkap masih dibawah 20 GT</li> <li>2. Jaringan irigasi tambak</li> <li>3. Pelabuhan perikanan kurang Higienis</li> <li>4. Rendahnya aksesibilitas pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>5. Kemiskinan dan Kesenjangan Gender</li> <li>6. Kualitas produk</li> </ol> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Strategi (SO)</b><br><br>(Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang)<br><br><b>Strategi pengembangan sektor Kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi lokal</b>                                                                                                                       | <b>Strategi (WO)</b><br><br>(Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan Peluang)<br><br><b>Strategi pengembangan Sumberdaya kelautan merujuk Kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Opportunities/ Peluang (O)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya paradigma Ekonomi Biru</li> <li>2. Potensi sumberdaya maritim untuk kesejahteraan</li> <li>3. Kelembagaan Masyarakat usaha perikanan</li> <li>4. Program yang telah dilakukan dalam kaitan Kelestarian Kawasan</li> <li>5. Kedudukan Kawasan dalam RTRW (Rencana TataRuang Wilayah) yang terintegrasi dengan RZWP3K dan pemanfaatan SDA sesuai Zonasi</li> <li>6. SDM ASN dan Pelaku Usaha Perikanan</li> <li>7. Pertumbuhan ekonomi baru berbasis</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kelautan yang inklusif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Threats/ Tantangan (T)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan <i>effort</i> untuk penyamaan paradigma Ekonomi Biru di level daerah</li> <li>2. Pemanfaatan SDA yang cukup tinggi</li> <li>3. Hama penyakit dan virus pada perikanan budidaya</li> <li>4. Lembaga Keuangan Mikro</li> <li>5. Usaha Masyarakat Pesisir masih Skala Kecil</li> <li>6. Pasar Ekspor dan Domestik</li> <li>7. Mitra Usaha</li> <li>8. Emisi Karbon, Degradasi lingkungan dan penurunan mutu air</li> <li>9. Keterampilan, Pola Pikir dan Skill SDM</li> </ol> | <b>Strategi (ST)</b> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p><b>Strategi pengembangan sektor Kelautan dan perikanan yang mandiri, inovatif, inklusif, berdayasaing dan berkelanjutan</b></p> | <b>Strategi (WT)</b> <p>Strategi yang meminimalkan Kelemahan dan menghindari ancaman</p> <p><b>Strategi pengembangan SDM dan pengembangan inovasi serta teknologi usaha perikanan berbasis masyarakat</b></p> |

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang akhirnya dapat selaras pada pilihan program maka rumusan strategi harus di petakan agar secara seimbang melintasi empat perpektif yaitu :

|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO | <b>Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi local</b>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penerapan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi dan optimalisasi tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas dan produksi kelautan dan perikanan serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi dan Peningkatan hasil produksi perikanan dengan prinsip Petik Olah Jual</li> <li>• Pengembangan sektor unggulan sesuai dengan permintaan pasar serta Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah yang berkelanjutan</li> </ul> |
| ST | <b>Strategi pengembangan sektor Kelautan dan perikanan yang mandiri, inovatif, inklusif, berdayasaing dan berkelanjutan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan yang inovatif akan teknologi</li> <li>• Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SD kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi dan peningkatan luas lahan Kawasan, Perlindungan ekosistem <i>blue carbon</i> dan offset emisi dan Pemanfaatan ruang laut secara tertib dan berkelanjutan</li> </ul>                                                                                                                   |
| WO | <b>Strategi pengembangan sumberdaya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan manajemen dan kelembagaan masyarakat usaha perikanan, Pengembangan minat masyarakat pesisir serta perluasan jaringan Kemitraan usaha perikanan</li> <li>• Pengembangan informasi dan jaringan pasar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WT | <b>Strategi pengembangan SDM, pengembangan inovasi dan teknologi usaha perikanan berbasis masyarakat</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan SDM masyarakat pesisir</li> <li>• Pengembangan inovasi sarana prasarana usaha perikanan</li> <li>• Penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam pengembangan usaha perikanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan pada tabel 5.1

**Tabel 5.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| Tujuan                                                               | Sasaran                                                                                             | Strategi                                                                                                                                                                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                             | Penerapan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi dan optimalisasi tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah                                                          | Penerapan Manajemen RB dan peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan ke masyarakat                                                     |
| 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan    | 2.1.Meningkatnya produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | 1. Peningkatan hasil produksi perikanan dengan prinsip Petik Olah Jual                                                                                                          | • Pemberdayaan masyarakat melalui diseminasi usaha perikanan yang berkelanjutan                                                                                                  |
|                                                                      |                                                                                                     | 2. Peningkatan produktivitas dan produksi kelautan dan perikanan, Revitalisasi Wilayah-wilayah pusat produksi serta pengembangan sektor unggulan sesuai dengan permintaan pasar | • Pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK serta Pengelolaan Penangkapan Ikan , pengelolaan budidaya ikan dan pengolah hasil perikanan sesuai kaidah pemanfaatan ruang dan zonasi |
|                                                                      |                                                                                                     | 3. Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah yang berbasis pengelolaan Ekonomi Biru                                                                           | • Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dan Kerjasama pentahelix                                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                     | 4. Peningkatan produksi hasil olahan ikan konsumsi dan Penguatan daya saing produk usaha kelautan dan perikanan                                                                 | • Penyediaan sarana prasarana pengolahan, promosi gemarikan dan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan                                                                      |
|                                                                      |                                                                                                     | 5. Pengembangan informasi dan jaringan pasar                                                                                                                                    | Pengembangan roadmap industrialisasi perikanan dan data informasi pasar                                                                                                          |
|                                                                      | 2.2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan                                   | 1. Peningkatan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang inovatif akan teknologi                                                                                      | • Penyediaan sarana prasarana dan SDM mendukung produksi perikanan<br>• Pengembangan Kawasan Layak Huni bagi nelayan dan pembudidaya melalui Kerjasama berbagai pihak            |
|                                                                      |                                                                                                     | • Peningkatan manajemen dan                                                                                                                                                     | • Pembinaan SDM bagi aparaturnya dan pelaku                                                                                                                                      |

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                | kelembagaan masyarakat usaha perikanan, Pengembangan minat masyarakat pesisir serta perluasan jaringan Kemitraan usaha perikanan                                                                                                | usaha untuk mendorong produktivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dukungan regulasi</li> </ul>                                                                                               |
| 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan | 3.1 Meningkatnya tata Kelola sumberdaya kelautan dan perikanan | 1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SD kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana prasarana pengawasan, peningkatan kapasitas aparat pengawas, pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan pembinaan masyarakat pengawas</li> </ul> |
|                                                                                                  |                                                                | 2. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi dan peningkatan luas lahan Kawasan, Perlindungan ekosistem <i>blue carbon</i> dan offset emisi, serta Pengelolaan dan Pemanfaatan ruang laut secara tertib dan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan konservasi dan Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor</li> </ul>                                           |

Arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID19 dan pencapaian sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM,**  
**KEGIATAN DAN SUB**  
**KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program kegiatan merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Program dan kegiatan akan dilaksanakan secara tahunan melalui penajaman pada sub kegiatan yang memuat rincian rencana aksi yang berkorelasi pada pencapaian target indikator kinerja organisasi pemerintah daerah.

Dalam program kerja tercantum program prioritas yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi perangkat daerah.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2024 – 2026 sebagai masa transisi ke pemerintahan di Sulawesi Selatan sehingga dalam kurun waktu tersebut arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan terfokus pada perencanaan operasional berbasis *money follow*

program yang menekankan pada perencanaan untuk pencapaian kinerja berdasarkan bobot program / kegiatan sesuai dengan tujuan pembangunan. Sehingga program yang memberikan manfaat yang besar pada masyarakat akan mendapatkan prioritas utama dalam pengalokasikan anggaran.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disusun berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah, dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Untuk pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bagian/ kepala seksi (eselon IV) sedangkan staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Nomenklatur rencana Program Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun implemetasi pelaksanaan tujuan , sasaran dan arah kebijakan yang mendukung capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penjabaran Indikator kinerja program prioritas dan program penunjang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana data pada tabel 6.1 Berikut ini :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Tujuan, Sasaran dan Program**

| NO  | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM                                                                  | INDIKATOR TUJUAN,<br>SASARAN DAN PROGRAM                           | Baseline<br>2022 | Target      |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------------|
|     |                                                                                              |                                                                    |                  | 2024        | 2025       | 2026         |
| I   | Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel                | Indeks Reformasi Birokrasi OPD                                     | 27,07            | 62,27       | 72,37      | 77,47        |
| I.1 | Sasaran Strategis : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                       | 85,80 (A)        | 86 – 88 (A) | 88 - 90(A) | 90 - 92 (AA) |
| A   | Program Penunjang urusan pemerintah daerah                                                   | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah                           | 99,92            | 100,42      | 100,92     | 101,43       |
|     |                                                                                              | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah | 75,42            | 82,96       | 87,11      | 91,47        |
|     |                                                                                              | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                 | - 27,35          | 79,32       | 83,16      | 87,05        |
| II  | Tujuan Strategis : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan                             | 10,8             | 11,01       | 11,23      | 11,45        |

|      |                                                                                                    |                                                                                                 |                |                |                |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| II.1 | Sasaran Strategis :<br>Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | Kontribusi sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)                                               | 9,4            | 10,5           | 10,82          | 11,14          |
|      |                                                                                                    | Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel (%)                                    | 22,39          | 22,55          | 22,94          | 23,34          |
|      |                                                                                                    | Produksi Perikanan (ton)                                                                        | 4.535.835,4    | 4.779.259,3    | 4.875.744,5    | 4.974.039,4    |
|      |                                                                                                    | Konsumsi Ikan (kg/kap/th)                                                                       | 69,5           | 72,48          | 73,93          | 75,41          |
| A    | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                              | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000)                                                       | 11.813.500.000 | 11.933.560.000 | 11.960.232.411 | 11.991.430.000 |
|      |                                                                                                    | Produksi perikanan tangkap (Ton)                                                                | 436.749,6      | 442.595,6      | 451.818,7      | 460.858,1      |
|      |                                                                                                    | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                                                   | 27,39          | 29             | 30             | 31             |
|      |                                                                                                    | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)                                              | 29,43          | 30,62          | 31,23          | 31,86          |
|      |                                                                                                    | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%) | 68,48          | 84,21          | 89,47          | 100            |

|             |                                                                                                    |                                                                  |                |                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B</b>    | <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                                      | Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.000)                       | 21.712.560.000 | 21.850.160.000 | 22.187.160.000 | 22,530.900.000 |
|             |                                                                                                    | Jumlah Produksi perikanan budidaya (Rp.M)                        | 4,095,934,66   | 4.331.299,7    | 4,417.925,7    | 4,506.248,3    |
|             |                                                                                                    | Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)                    | 78,51          | 85             | 90             | 95             |
| <b>C</b>    | <b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil</b>                                 | Produksi garam rakyat                                            | 3,387,78       | 5.000          | 6,000          | 6,900          |
|             |                                                                                                    | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan | 49,49          | 56,89          | 78,44          | 100            |
| <b>D</b>    | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>                                            | Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp.M)              | 355.50         | 391,94         | 411.54         | 432.11         |
|             |                                                                                                    | Produksi olahan ikan (ton)                                       | 5,911.60       | 6.150,43       | 6,273.44       | 6.398,9        |
|             |                                                                                                    | Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)                   | 69,05          | 100            | 100            | 100            |
| <b>II.2</b> | <b>Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</b> | <b>NTUP</b>                                                      | <b>109,33</b>  | <b>110,84</b>  | <b>111,95</b>  | <b>112,36</b>  |
|             |                                                                                                    | Nilai Tukar Usaha Pembudidayaan (NTPi)                           | 109,98         | 111,07         | 111,63         | 112,19         |

|       |                                                                                                      |                                                                          |          |         |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|       |                                                                                                      | Nilai tukar usaha nelayan (NTN)                                          | 109,29   | 110,46  | 111,01   | 111,56  |
| A     | Program pengelolaan perikanan tangkap                                                                | Cakupan bina kelompok nelayan                                            | 27,39    | 29      | 30       | 31      |
| B     |                                                                                                      | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan                           | 29,34    | 30,62   | 31,23    | 31,86   |
| III   | Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan | Potensi penurunan emisi GRK (ton CO <sub>2</sub> ) dari sektor perikanan | 7.004,89 | 7.351,3 | 7.530,60 | 7.709,9 |
| III.1 | Sasaran Strategis Meningkatnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan                | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)                        | 94,01    | 97,8    | 99,7     | 100     |
|       |                                                                                                      | Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)        | 67,2     | 96,08   | 96,78    | 99,67   |
|       |                                                                                                      | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | 58,72    | 59,56   | 60,75    | 61,96   |
| A     | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                                                 | Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)                 | 100      | 100     | 100      | 100     |

|          |                                                                |                                                                                     |                   |                   |                   |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>B</b> | Program Pengelolaan Kelautan,<br>Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Perluasan Kawasan Konservasi<br>Perairan yang dikelola secara<br>berkelanjutan (Ha) | <b>569.269,53</b> | <b>816.593,22</b> | <b>822.559,69</b> | <b>847.122,4</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

Pada tabel 6.1 dapat diuraikan bahwa dari 2 sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 maka telah didukung 4 Sasaran Strategis OPD dalam Renstra sehingga untuk mencapai sasaran strategis tersebut didukung oleh 5 program teknis dan 1 program penunjang sesuai numenkatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Penjabaran program prioritas dan penunjang sebagaimana tertuang pada tabel 6.1 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dijelaskan sebagai berikut :

**Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel**

**Sasaran : Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Program

penunjang : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini didukung oleh 9 kegiatan dengan 42 Sub kegiatan adapun detail target kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 6.1

### Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

| No       | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Output                                                                                                                                               | Satuan         | Data Capaian pada Tahun Awal | Target Kinerja Output |           |          | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Outcomes                                                                                                                                                                                    | Satuan | Target Kinerja Outcomes |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                              | 2024                  | 2025      | 2026     |                                                             |                                                                                                                                                                                                               |        | 2024                    | 2025      | 2026       |
| <b>1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>Dokumen</b> | <b>7</b>                     | <b>9</b>              | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>28</b>                                                   | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | %      | <b>33</b>               | <b>66</b> | <b>100</b> |
| 1.1      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen        | 15                           | 2                     | 3         | 2        | 7                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | %      | 33                      | 66        | 100        |
| 1.2      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Dokumen        | 48                           | 1                     | 1         | 1        | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | %      | 33                      | 66        | 100        |
| 1.3      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Dokumen        | 30                           | 1                     | 1         | 1        | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | %      | 33                      | 66        | 100        |
| 1.4      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen        | 30                           | 1                     | 1         | 1        | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | %      | 33                      | 66        | 100        |
| 1.5      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen        | 30                           | 1                     | 1         | 1        | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | %      | 33                      | 66        | 100        |
| 1.6      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan        | 30                           | 11                    | 11        | 11       | 33                                                          | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | %      | 33                      | 66        | 100        |
| 1.7      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan        | 10                           | 35                    | 35        | 35       | 105                                                         | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | %      | 33                      | 66        | 100        |

| No  | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Output                                                                                                                          | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal | Target Kinerja Output |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Outcomes                                                                                                                                                                                    | Satuan | Target Kinerja Outcomes |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                   |           |                              | 2024                  | 2025 | 2026 |                                                             |                                                                                                                                                                                                               |        | 2024                    | 2025 | 2026 |
| 2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             | Laporan   | 45                           | 45                    | 45   | 45   | 28                                                          | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | Orang/bln | 109                          | 2                     | 3    | 2    | 7                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | Dokumen   | 48                           | 1                     | 1    | 1    | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | Dokumen   | 30                           | 1                     | 1    | 1    | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | Dokumen   | 30                           | 1                     | 1    | 1    | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | Dokumen   | 30                           | 1                     | 1    | 1    | 3                                                           | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan   | 30                           | 11                    | 11   | 11   | 33                                                          | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | %      | 33                      | 66   | 100  |
| 1.7 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | Laporan   | 10                           | 35                    | 35   | 35   | 105                                                         | Tercapainya kondisi kinerja dalam pemanfaatan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | %      | 33                      | 66   | 100  |

Pada kegiatan perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan dapat menghasilkan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebanyak 9 dokumen per tahun kecuali pada tahun 2025 dilakukan penyusunan dokumen Renstra untuk periode masa kepala daerah yang terpilih dimana dokumen tersebut terdiri atas dokumen Renja pokok, dokumen Renja Perubahan, dokumen Renstra pokok, dokumen RKA, dokumen RKA Perubahan, dokumen DPA pokok, dokumen DPA perubahan, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, dan dokumen laporan evaluasi. Pemanfaatan dokumen ini dapat menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai pada tahun 2026 sebesar 100%.

## **2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD

### **1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah OPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD

### **2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi DaerahPengamanan Barang Milik Daerah OPD

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### **4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD

#### **5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Aset Tak Berwujud

#### **6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan**

**Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan**

Didukung oleh program

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**Indikator Program :**

- a. Nilai Produksi Perikanan Tangkap dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 11.933.561.187,2 serta tahun 2026 sebesar Rp. 11.991.437.059,2
- b. Jumlah produksi perikanan tangkap dengan target di tahun 2024 sebesar 442.959,6 Ton serta tahun 2026 sebesar 460.858,1 Ton
- c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan dengan target tahun 2024 sebesar 28 persen dan tahun 2026 sebesar 31 persen
- d. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan dengan target tahun 2024 sebesar 30.62 persen dan tahun 2026 sebesar 31.86 persen.
- e. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional dengan target tahun 2024 sebesar 84.21 persen dan tahun 2026 sebesar 100 %.

Pada program ini terdiri dari 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan antara lain :

**a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

**b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

**c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

**d. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil

**e. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

**f. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

**g. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- h. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- i. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- j. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air**

**Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

Dalam rangka memudahkan nelayan dalam melakukan usahanya maka Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi dalam pelayan perizinan yang ditangani Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel. Adapun bentuk fasilitasi yaitu melakukan pelayanan rekomendasi teknis dan pendampingan untuk memudahkan nelayan dalam penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut pada Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) 713 sampai dengan 12 Mil dilaksanakan berbasis Teknologi (fishing technology) dengan mengacu pada kebijakan penangkapan secara terukur dan ramah lingkungan. Sehingga untuk mendukung produksi dan produktivitas penangkapan perlu dilakukan pemetaan zonasi penangkapan khususnya di laut maupun pada perairan umum daratan. Adapun penjabaran rencana aksinya untuk mendukung pencapaian indikator sasaran maka langkah strategis yang diambil antara lain :

- a) Peningkatan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati di laut melalui pembatasan jumlah dan jenis ikan yang ditangkap
- b) Rehabilitasi dan pemulihan sumberdaya ikan dan ekosistemnya yang akan dilaksanakan melalui teknologi *smart fishing* , penyediaan apartemen ikan pada lokasi perairan yang telah menunjukkan grafik penurunan akibat over eksploitasi.
- c) Penyediaan dan penguatan infrastruktur dan operasional Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pintu gerbang di Kawasan timur Indonesia.

- d) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan, salah satu pengembangan teknologi penangkapan yang digunakan melalui teknologi smart fishing dengan base camp pada lokasi Pelabuhan perikanan .
- e) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- f) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.
- g) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan, serta fasilitasi pendataan tanda kapal perikanan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- h) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- i) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.
- j) Meningkatkan kualitas pencatatan dan pendaratan ikan serta ketertelusuran hasil perikanan.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan

mendukung *Marine Culture*.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang terukur , ramah lingkungan serta berkelanjutan. Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Selain itu memberdayakan armada plasma yang merupakan kapal/perahu nelayan skala kecil untuk mendukung *marine culture*.

Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

#### **1. Program Perikanan Budidaya :**

##### **Indikator Program :**

- a. Nilai produksi perikanan budidaya dengan target di tahun 2024 sebesar Rp. 21.850.161.096,3 , tahun 2026 sebesar Rp. 22.530.907.604,6
- b. Jumlah Produksi perikanan budidaya dengan target di tahun 2024 sebesar 4.331.299, 7 ton , tahun 2026 sebesar Rp. 4.506.248,3 Ton

**c. Persentase ketersediaan benur berkualitas dengan target di tahun 2024 sebesar 85 -ersen dan tahun 2026 sebesar 95 %**

Pada program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan budidaya yang ramah lingkungan sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah untuk mendukung pengembangan potensi komoditas unggulan hasil budidaya di Sulawesi Selatan antara lain untuk komoditas udang windu , bandeng, rumput laut, kepiting, lobster, serta budidaya di darat untuk komoditi ikan nila,, sidat dan gabus serta komoditas unggulan daerah lainnya. Selain itu untuk mencegah kepunahan dan menjaga ikan ikan endemik melalui budidaya plasma nutfah yang akan dikembangkan pada instalasi balai benih ikan yang dikelola pemerintah provinsi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

**1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahax Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

**2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

**3. Penerbitan Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT

**4. Penerbitan Tanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**5. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

**6. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat**

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

## **2. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

### **Indikator Program :**

- a. Jumlah produksi garam rakyat dengan target tahun 2024 sebesar 5.000 Ton dan tahun 2026 sebesar 6.900 Ton.**
- b. Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan dengan target tahun 2024 sebesar 20 persen dan tahun 2026 sebesar 26 persen**

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-pulau kecil** yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut. Program ini diarahkan pada penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir serta pendampingan untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Selain itu pada program ini diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mendukung pencapaian produksi perikanan.

Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Adapun dalam rencana kerja yang dilakukan melalui dukungan kegiatan sebagai berikut :

### **1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

c. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha **garam** rakyat dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep , Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana seperti gudang garam mini, geomembrane, penerapan teknologi produksi (iodisasi garam) dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Selain itu untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, maka pada program ini juga diarahkan untuk pembangunan tambatan perahu.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya konsumsi ikan produk Kelautan dan Perikanan**

Pada sasaran ini didukung oleh 1 program dengan 3 Kegiatan dan 6 Sub kegiatan antara lain :

### **1. Program Pengolahan dan Pemasaran**

#### **Indikator Program :**

- a. Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp. 391.94 M dan di tahun 2026 meningkat menjadi Rp. 432.11 M
- b. Produksi olahan ikan dengan target tahun 2024 sebesar 6.150,43 Ton dan tahun 2026 6.398, 91 Ton
- c. Persentase pengujian mutu produk perikanan dengan targe tahun 2024 sebesar 100 % dan tahun 2026 sebesar 100 %

Dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

**1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

**3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan pengolahan dan pemasaran berdasarkan kebijakan pembangunan *economy biru* diarahkan pada peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan melakukan inovasi terhadap produk hasil perikanan dengan prinsip zero waste untuk peningkatan konsumsi ikan. Inovasi produk diharapkan memberikan nilai tambah secara ekonomi sehingga

berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka memenuhi konsumsi ikan yang aman dan higienis tentunya perlu dilakukan pembenahan pada sarana dan prasarana penanganan ikan baik di hulu maupun hilir terutama pada sarana prasarana pemasaran ikan yang lebih higienis, Dengan peningkatan angka konsumsi ikan diharapkan berpengaruh pada perbaikan gizi dan penurunan angka stunting yang sejalan dengan target indikator SDGs.

Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi dan daya saing produk kelautan dan perikanan, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan sarana prasarana yang mendukung logistic ikan koridor Sulawesi serta penguatan sistem informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan**

**Sasaran : - Meningkatnya persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku**  
**- Meningkatnya luasan Kawasan konservasi perairan daerah**

Didukung oleh program :

**1. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**Indikator Program :**

**a. Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan dengan target di tahun 2024 sebesar 905.027,73 Ha dan tahun 2026 sebesar 997.793,07 Ha**

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha

tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon.

Pada program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kegiatan sebagai berikut :

**1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

**2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- c. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada subkegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

## **2. *Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan***

### **Indikator Program :**

- a. **Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan target tahun 2024 97.8 persen dan tahun 2026 sebesar 100 persen.**

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

**1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- d. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

**2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya

- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan, inovasi kepemudaan dalam rangka pencegahan IUU Fising
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Rencana program, kegiatan , sub kegiatan serta pendanaan pagu indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2  
 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab  
 Rencana Strategis (TC.27)  
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

| Tujuan                                                               | Sasaran                                             | Kode         | Program, Kegiatan dan Subkegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |            |                       |             |                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                        | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                                      |                                                     |              |                                                                  |                                                                                                 |                                          |            | Tahun 2024                                    |                       | Tahun 2025 |                       | Tahun 2026  |                       |                                                             |                        |                                              |        |
|                                                                      |                                                     |              |                                                                  |                                                                                                 | Tahun 2022                               | Tahun 2023 | target                                        | Rp                    | target     | Rp                    | target      | Rp                    | target                                                      | Rp                     |                                              |        |
| (1)                                                                  | (2)                                                 | (3)          | (4)                                                              | (5)                                                                                             | (6)                                      |            | (7)                                           | (8)                   | (9)        | (10)                  | (11)        | (12)                  | (13)                                                        | (14)                   | (15)                                         | (16)   |
| Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel |                                                     |              |                                                                  | Indeks Reformasi Birokrasi OPD                                                                  |                                          |            | 100%                                          | 35,107,99<br>9,713.00 | 100%       | 39,287,59<br>4,713.00 | 100%        | 41,917,21<br>5,165.00 |                                                             | 0.00                   |                                              |        |
|                                                                      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 3.25.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah                                                        | 99,47 Nilai                              | 100 Nilai  | 99,55 Nilai                                   | 35,107,99<br>9,713.00 | 99,6 Nilai | 39,287,59<br>4,713.00 | 99,65 Nilai | 41,917,21<br>5,165.00 | 99,65 Nilai                                                 | 116.312.809<br>.591.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                 |        |
|                                                                      |                                                     |              |                                                                  | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah                              | 97,5 Nilai                               | 95 Nilai   | 95 Nilai                                      | 0.00                  | 97 Nilai   | 0.00                  | 98 Nilai    | 0.00                  | 98 Nilai                                                    | 0.00                   |                                              |        |
|                                                                      |                                                     |              |                                                                  | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                                              | 73.100 %                                 | 100%       | 100 %                                         | 0.00                  | 100 %      | 0.00                  | 100 %       | 0.00                  | 100 %                                                       | 0.00                   |                                              |        |
|                                                                      |                                                     | 3.25.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 7 Dokumen                                | 7 Dokumen  | 9 Dokumen                                     | 911,360,000.00        | 10 Dokumen | 1,238,150,000.00      | 9 Dokumen   | 1,405,169,500.00      | 28 Dokumen                                                  | 3,554,679,500.00       | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                 |        |

|  |  |                 |  |                                                      |                                                                                                      |            |            |           |                |           |                |           |                |           |                |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.01.1.01.01 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 2 Dokumen | 234,860,000.00 | 3 Dokumen | 329,000,000.00 | 2 Dokumen | 368,397,000.00 | 6 Dokumen | 932,257,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.01.02 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 48 Dokumen | 31 Dokumen | 1 Dokumen | 12,000,000.00  | 1 Dokumen | 13,200,000.00  | 1 Dokumen | 15,180,000.00  | 3 Dokumen | 40,380,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.01.03 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000.00  | 1 Dokumen | 16,500,000.00  | 1 Dokumen | 18,975,000.00  | 3 Dokumen | 50,475,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.01.04 |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000.00  | 1 Dokumen | 16,500,000.00  | 1 Dokumen | 18,975,000.00  | 3 Dokumen | 50,475,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.01.05 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 1 Dokumen | 22,500,000.00  | 1 Dokumen | 24,750,000.00  | 1 Dokumen | 28,462,500.00  | 3 Dokumen | 75,712,500.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                 |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                    |                          |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.01.1.01.06 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 Laporan        | 30 Laporan        | 11 Laporan        | 200,000,000.00           | 11 Laporan        | 225,000,000.00           | 11 Laporan        | 250,000,000.00           | 33 Laporan         | 675,000,000.00           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.01.07 |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 10 Laporan        | 30 Laporan        | 5 Laporan         | 412,000,000.00           | 5 Laporan         | 613,200,000.00           | 5 Laporan         | 705,180,000.00           | 15 Laporan         | 1,730,380,000.00         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.02    |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                           | <b>45 Laporan</b> | <b>30 Laporan</b> | <b>45 Laporan</b> | <b>24,716,421,896.00</b> | <b>45 Laporan</b> | <b>27,188,064,086.00</b> | <b>45 Laporan</b> | <b>28,559,314,290.00</b> | <b>135 Laporan</b> | <b>80,463,800,272.00</b> | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.01.1.02.01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 189 Orang/Bulan   | 199 Orang / Bulan | 189 Orang/Bulan   | 24,608,721,896.00        | 207 Orang/Bulan   | 27,069,594,086.00        | 217 Orang/Bulan   | 28,423,073,790.00        | 217 Orang/Bulan    | 80,101,389,772.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.02.03 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen        | 12 Dokumen        | 12 Dokumen        | 5,000,000.00             | 12 Dokumen        | 5,500,000.00             | 12 Dokumen        | 6,325,000.00             | 36 Dokumen         | 16,825,000.00            | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.02.04 |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12 Dokumen        | 12 Dokumen        | 12 Dokumen        | 2,700,000.00             | 12 Dokumen        | 2,970,000.00             | 12 Dokumen        | 3,415,500.00             | 36 Dokumen         | 9,085,500.00             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.02.05 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan         | 1 Laporan         | 1 Laporan         | 5,000,000.00             | 1 Laporan         | 5,500,000.00             | 1 Laporan         | 6,325,000.00             | 3 Laporan          | 16,825,000.00            | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |

|  |  |                 |  |                                                                               |                                                                                                                                                  |            |            |            |                   |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.01.1.02.06 |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                         | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 2 Dokumen  | 27,000,00<br>0.00 | 2 Dokumen  | 29,700,00<br>0.00   | 2 Dokumen  | 34,155,00<br>0.00   | 6 Dokumen  | 90,855,000.<br>00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.02.07 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | 65,000,00<br>0.00 | 18 Laporan | 71,500,00<br>0.00   | 18 Laporan | 82,225,00<br>0.00   | 54 Laporan | 218,725,000.<br>.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.02.08 |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                               | 1 Dokumen  | 0          | 1 Dokumen  | 3,000,000.<br>00  | 1 Dokumen  | 3,300,000.<br>.00   | 1 Dokumen  | 3,795,000.<br>00    | 3 Dokumen  | 10,095,000.<br>00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.03    |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah                                                                                   | 53 Unit    | 53 Unit    | 53 Unit    | 49,600,00<br>0.00 | 53 Unit    | 127,200,00<br>00.00 | 53 Unit    | 140,530,00<br>00.00 | 159 Unit   | 317,330,000.<br>.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.01.1.03.01 |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 2,000,000.<br>00  | 1 Dokumen  | 2,200,000.<br>.00   | 1 Dokumen  | 2,530,000.<br>00    | 3 Dokumen  | 6,730,000.0<br>0    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.03.02 |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                               | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 40,000,00<br>0.00 | 1 Dokumen  | 95,000,00<br>0.00   | 1 Dokumen  | 100,250,00<br>00.00 | 3 Dokumen  | 235,250,000.<br>.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                 |  |                                                                   |                                                                                                            |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.01.1.03.03 |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 5,000,000.00          | 1 Laporan               | 25,000,000.00         | 1 Laporan               | 28,750,000.00         | 3 Laporan               | 58,750,000.00         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.03.05 |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 2 Laporan               | 2 Laporan               | 2 Laporan               | 2,600,000.00          | 2 Laporan               | 5,000,000.00          | 2 Laporan               | 9,000,000.00          | 6 Laporan               | 16,600,000.00         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.04    |  | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>2.685.630.000 Rp</b> | <b>2.906.967.750 Rp</b> | <b>1.938.413.662 Rp</b> | <b>25,000,000.00</b>  | <b>1.986.874.004 Rp</b> | <b>30,000,000.00</b>  | <b>2.036.545.854 Rp</b> | <b>34,500,000.00</b>  | <b>5.961.833.520 Rp</b> | <b>89,500,000.00</b>  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.01.1.04.01 |  | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                        | 1 Dokumen               | 1 Dokumen               | 1 Dokumen               | 25,000,000.00         | 1 Dokumen               | 30,000,000.00         | 1 Dokumen               | 34,500,000.00         | 3 Dokumen               | 89,500,000.00         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.05    |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                            | <b>4 Laporan</b>        | <b>6 Laporan</b>        | <b>5 Laporan</b>        | <b>116,530,000.00</b> | <b>7 Laporan</b>        | <b>373,336,000.00</b> | <b>7 Laporan</b>        | <b>429,336,400.00</b> | <b>20 Laporan</b>       | <b>919,202,400.00</b> | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.01.1.05.01 |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                              | 3 Unit                  | 2 Unit                  | 1 Unit                  | 18,000,000.00         | 2 Unit                  | 50,000,000.00         | 2 Unit                  | 57,500,000.00         | 5 Unit                  | 125,500,000.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.05.02 |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     | -                       | 333 Paket               | 0 Paket                 | 0.00                  | 207 Paket               | 185,703,000.00        | 217 Paket               | 213,558,450.00        | 613 Paket               | 399,261,450.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |

|  |  |                 |  |                                                            |                                                                                        |            |            |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.01.1.05.03 |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen  | 4,000,000.00     | 12 Dokumen  | 4,400,000.00     | 12 Dokumen  | 5,060,000.00     | 36 Dokumen  | 13,460,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.05.04 |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen  | 5,000,000.00     | 12 Dokumen  | 5,250,000.00     | 12 Dokumen  | 6,037,500.00     | 36 Dokumen  | 16,287,500.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar         |
|  |  | 3.25.01.1.05.05 |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen  | 44,530,000.00    | 12 Dokumen  | 48,983,000.00    | 12 Dokumen  | 56,330,450.00    | 36 Dokumen  | 149,843,450.00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.05.10 |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | -          | 100 Orang  | 50 Orang    | 45,000,000.00    | 60 Orang    | 54,000,000.00    | 70 Orang    | 62,100,000.00    | 180 Orang   | 161,100,000.00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.05.11 |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | -          | -          | -           | 0.00             | 6 Orang     | 25,000,000.00    | 6 Orang     | 28,750,000.00    | 12 Orang    | 53,750,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.01.1.06    |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum                                       | 50 Unit    |            | 100 Unit    | 1,471,755,000.00 | 120 Unit    | 1,768,015,500.00 | 138 Unit    | 2,026,217,825.00 | 358 Unit    | 5,325,988,325.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  |                 |  |                                                            | Jumlah Tamu Yang difasilitasi                                                          | 2145 Orang | 2145 Orang | 2.145 Orang | 0.00             | 2.574 Orang | 0.00             | 2.960 Orang | 0.00             | 7.679 Orang | 0.00             |                              |                  |

|  |  |                     |  |                                                                                  |                                                                                                       |               |               |               |                    |               |                    |               |                    |                   |                      |                                       |                                                                                                  |
|--|--|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.01 |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 10 Paket      | 10 Paket      | 12 Paket      | 23,905,00<br>0.00  | 12<br>Paket   | 26,295,50<br>0.00  | 12<br>Paket   | 30,239,82<br>5.00  | 36<br>Paket       | 80,440,325.<br>00    | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar,<br>Barru, Pare<br>Pare, Palopo,<br>Bone,<br>Bulukumba,<br>Gowa,<br>Selayar,<br>Pangkep |
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.02 |  | Penyediaan<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengkap<br>an Kantor                        | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 30 Paket      | 30 Paket      | 30 Paket      | 645,000,0<br>00.00 | 30<br>Paket   | 774,000,0<br>00.00 | 30<br>Paket   | 890,100,0<br>00.00 | 90<br>Paket       | 2,309,100,0<br>00.00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar,<br>Barru, Pare<br>Pare, Palopo,<br>Bone,<br>Bulukumba,<br>Gowa,<br>Selayar,<br>Pangkep |
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.03 |  | Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah<br>Tangga                                       | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang Disediakan                                          | 24 Paket      | 10 Paket      | 28 Paket      | 72,100,00<br>0.00  | 32<br>Paket   | 100,000,0<br>00.00 | 37<br>Paket   | 115,000,0<br>00.00 | 97<br>Paket       | 287,100,000<br>.00   | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar,<br>Barru, Pare<br>Pare, Palopo,<br>Bone,<br>Bulukumba,<br>Gowa,<br>Selayar,<br>Pangkep |
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.05 |  | Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                               | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan                               | 30 Paket      | 10 Paket      | 10 Paket      | 81,200,00<br>0.00  | 10<br>Paket   | 89,320,00<br>0.00  | 10<br>Paket   | 102,718,0<br>00.00 | 30<br>Paket       | 273,238,000<br>.00   | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar,<br>Barru, Pare<br>Pare, Palopo,<br>Bone,<br>Bulukumba,<br>Gowa,<br>Selayar,<br>Pangkep |
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.08 |  | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                                  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                                     | 12<br>Laporan | 12<br>Laporan | 12<br>Laporan | 117,000,0<br>00.00 | 12<br>Laporan | 140,400,0<br>00.00 | 12<br>Laporan | 161,460,0<br>00.00 | 36<br>Lapora<br>n | 418,860,000<br>.00   | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan                                                                              |
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.09 |  | Penyelengga<br>raan Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                   | 12<br>Laporan | 12<br>Laporan | 12<br>Laporan | 530,000,0<br>00.00 | 12<br>Laporan | 628,000,0<br>00.00 | 12<br>Laporan | 715,200,0<br>00.00 | 36<br>Lapora<br>n | 1,933,200,0<br>00.00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan, Luar<br>Provinsi                                                            |

|  |  |                     |  |                                                                           |                                                                            |                    |                    |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                          |                                       |                                                                             |
|--|--|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3.25.01.<br>1.06.10 |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                       | 1<br>Dokumen       | 1<br>Dokumen       | 1<br>Dokumen       | 2,550,000.<br>00        | 1<br>Dokumen       | 10,000,00<br>0.00       | 1<br>Dokumen       | 11,500,00<br>0.00       | 3<br>Dokumen       | 24,050,000.<br>00        | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar                                                                    |
|  |  | 3.25.01.<br>1.07    |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                                | <b>1 Unit</b>      | <b>6 Unit</b>      | <b>9 Unit</b>      | <b>151,000,000.00</b>   | <b>11 Unit</b>     | <b>395,000,000.00</b>   | <b>13 Unit</b>     | <b>475,000,000.00</b>   | <b>33 Unit</b>     | <b>1,021,000,000.00</b>  | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN |                                                                             |
|  |  | 3.25.01.<br>1.07.05 |  | Pengadaan Mebel                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                         | -                  | 5 Paket            | 7 Paket            | 41,000,00<br>0.00       | 17<br>Paket        | 100,000,00<br>0.00      | 20<br>Paket        | 115,000,00<br>0.00      | 44<br>Paket        | 256,000,000.<br>.00      | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar, Barru, Pare Pare, Palopo, Bone, Bulukumba, Gowa, Selayar, Pangkep |
|  |  | 3.25.01.<br>1.07.06 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                    | 0                  | 0                  | 1 Unit             | 10,000,00<br>0.00       | 1 Unit             | 20,000,00<br>0.00       | 1 Unit             | 30,000,00<br>0.00       | 3 Unit             | 60,000,000.<br>00        | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi Selatan                                                            |
|  |  | 3.25.01.<br>1.07.08 |  | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                               | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                              | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 50,000,00<br>0.00       | 2 Unit             | 200,000,00<br>0.00      | 3 Unit             | 230,000,00<br>0.00      | 6 Unit             | 480,000,000.<br>.00      | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi Selatan                                                            |
|  |  | 3.25.01.<br>1.07.09 |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            | 0                  | 0                  | 1 Unit             | 50,000,00<br>0.00       | 1 Unit             | 75,000,00<br>0.00       | 1 Unit             | 100,000,00<br>0.00      | 3 Unit             | 225,000,000.<br>.00      |                                       | Sulawesi Selatan                                                            |
|  |  | 3.25.01.<br>1.08    |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>152 Laporan</b> | <b>151 Laporan</b> | <b>163 Laporan</b> | <b>5,362,460,373.00</b> | <b>163 Laporan</b> | <b>5,402,829,127.00</b> | <b>163 Laporan</b> | <b>5,552,397,150.00</b> | <b>489 Laporan</b> | <b>16,317,686,650.00</b> | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN |                                                                             |

|  |                |                 |  |                                                                                                                    |                                                                                                        |                |                |                |                         |                |                         |                |                         |                 |                         |                              |                                                                             |
|--|----------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 1043072017     | 3.25.01.1.08.02 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 12 Laporan     | 12 Laporan     | 810,064,729.00          | 12 Laporan     | 825,433,483.00          | 12 Laporan     | 950,001,506.00          | 36 Laporan      | 2,585,499,718.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan                                                            |
|  | 233,007,288.00 | 3.25.01.1.08.03 |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 2 Laporan      | 0              | 12 Laporan     | 50,000,000.00           | 12 Laporan     | 75,000,000.00           | 12 Laporan     | 100,000,000.00          | 36 Laporan      | 225,000,000.00          | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar, Barru, Pare Pare, Palopo, Bone, Bulukumba, Gowa, Selayar, Pangkep |
|  |                | 3.25.01.1.08.04 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 138 Laporan    | 139 Laporan    | 139 Laporan    | 4,502,395,644.00        | 139 Laporan    | 4,502,395,644.00        | 139 Laporan    | 4,502,395,644.00        | 417 Laporan     | 13,507,186,932.00       | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar, Barru, Pare Pare, Palopo, Bone, Bulukumba, Gowa, Selayar, Pangkep |
|  |                | 3.25.01.1.09    |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                         | <b>32 Unit</b> | <b>40 Unit</b> | <b>36 Unit</b> | <b>2,303,872,444.00</b> | <b>42 Unit</b> | <b>2,765,000,000.00</b> | <b>48 Unit</b> | <b>3,294,750,000.00</b> | <b>126 Unit</b> | <b>9,043,622,444.00</b> | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                             |
|  |                | 3.25.01.1.09.01 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17 Unit        | 17 Unit        | 17 Unit        | 1,500,000,000.00        | 17 Unit        | 1,650,000,000.00        | 17 Unit        | 1,897,500,000.00        | 51 Unit         | 5,047,500,000.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Makassar, Barru, Pare Pare, Palopo, Bone, Bulukumba, Gowa, Selayar, Pangkep |

|  |                                                                                        |                     |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                   |                   |                      |                    |                       |                    |                       |                      |                       |                                       |                                       |                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                        | 3.25.01.<br>1.09.02 |                                                                            | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaa<br>an, Biaya<br>Pemeliharaa<br>an, Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 8 Unit            | 19 Unit           | 12 Unit              | 103,872,4<br>44.00 | 14 Unit               | 115,000,0<br>00.00 | 16 Unit               | 132,250,0<br>00.00   | 42 Unit               | 351,122,444<br>.00                    | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Makassar,<br>Barru, Pare<br>Pare, Palopo,<br>Bone,<br>Bulukumba,<br>Gowa,<br>Selayar,<br>Pangkep |
|  |                                                                                        | 3.25.01.<br>1.09.08 |                                                                            | Pemeliharaa<br>an Aset Tak<br>Berwujud                                                                                                               | Jumlah Aset<br>Tak Berwujud<br>yang Dipelihara                                                                                 | 1 Unit            | 1 Unit            | 1 Unit               | 50,000,00<br>0.00  | 2 Unit                | 100,000,0<br>00.00 | 3 Unit                | 115,000,0<br>00.00   | 6 Unit                | 265,000,000<br>.00                    | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan                                                                              |
|  |                                                                                        | 3.25.01.<br>1.09.09 |                                                                            | Pemeliharaa<br>n/Rehabilita<br>si Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya                                                                        | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh<br>abilitasi                                       | 5 Unit            | 3 Unit            | 4 Unit               | 600,000,0<br>00.00 | 5 Unit                | 800,000,0<br>00.00 | 6 Unit                | 1,000,000,<br>000.00 | 15 Unit               | 2,950,000,0<br>00.00                  | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan                                                                              |
|  |                                                                                        | 3.25.01.<br>1.09.10 |                                                                            | Pemeliharaa<br>n/Rehabilita<br>si Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya                                            | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh<br>abilitasi              | 3 Unit            | 0                 | 2 Unit               | 50,000,00<br>0.00  | 4 Unit                | 100,000,0<br>00.00 | 6 Unit                | 150,000,0<br>00.00   | 11 Unit               | 430,000,000<br>.00                    | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan                                                                              |
|  | Meningk<br>atnya<br>Produkti<br>vitas dan<br>Industri<br>alisasi<br>sektor<br>kelautan | 3.25.02             | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KELAUTAN,<br>PESISIR DAN<br>PULAU-PULAU<br>KECIL | Perluasan<br>kawasan<br>konservasi<br>perairan yang<br>dikelola secara<br>berkelanjutan                                                              | 569269.53<br>0 Ha                                                                                                              | 569269.<br>530 Ha | 816.593,2<br>2 Ha | 9,010,000,<br>000.00 | 822.559<br>,69 Ha  | 10,916,00<br>0,000.00 | 847.122<br>,4 Ha   | 12,553,40<br>0,000.00 | 847.12<br>2,4 Ha     | 32,479,400,<br>000.00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN |                                       |                                                                                                  |
|  |                                                                                        |                     |                                                                            | Jumlah<br>produksi<br>qaram rakvat                                                                                                                   | 3.387,78<br>Ton                                                                                                                | 48.450<br>Ton     | 5.000<br>Ton      | 0.00                 | 6.000<br>Ton       | 0.00                  | 6.900<br>Ton       | 0.00                  | 6.900<br>Ton         | 0.00                  |                                       |                                       |                                                                                                  |

|  |                                                                                               |                 |  |                                                                                                                     |                                                                                                     |              |              |               |                  |             |                  |              |                  |               |                   |                              |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  | dan perikanan yang berkelanjutan, Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan |                 |  |                                                                                                                     | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan                                    | 49.49 %      | 100%         | 56,89 %       | 0.00             | 78,44 %     | 0.00             | 100 %        | 0.00             | 100 %         | 0.00              |                              |                  |
|  |                                                                                               | 3.25.02.1.01    |  | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | ;                                                                                                   | 228 Ha       |              | 61 Ha         | 5,447,000,000.00 | 70 Ha       | 6,651,350,000.00 | 81 Ha        | 7,230,092,500.00 | 212 Ha        | 19,328,442,500.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |                                                                                               |                 |  |                                                                                                                     | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi | 28 Unit      |              | 14 Unit       | 0.00             | 14 Unit     | 0.00             | 14 Unit      | 0.00             | 42 Unit       | 0.00              |                              |                  |
|  |                                                                                               | 3.25.02.1.01.01 |  | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                       | Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K      | -            | -            | 37 Dokumen    | 925,000,000.00   | 39 Dokumen  | 971,250,000.00   | 41 Dokumen   | 1,019,812,500.00 | 117 Dokumen   | 2,916,062,500.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |                                                                                               | 3.25.02.1.01.02 |  | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                   | 569269.53 Ha | 569269.53 Ha | 247.323,69 Ha | 1,400,000,000.00 | 5.966,43 Ha | 1,700,000,000.00 | 24.562,75 Ha | 1,970,000,000.00 | 277.852,87 Ha | 5,070,000,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |               |               |                |                  |                |                  |                |                  |                 |                   |                              |                  |
|--|--|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.02.<br>1.01.03 |  | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                           | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 | 75.9 Ha       | 73 Ha         | 61 Ha          | 3,022,000,000.00 | 70 Ha          | 3,880,100,000.00 | 81 Ha          | 4,140,280,000.00 | 212 Ha          | 11,042,380,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.02.<br>1.01.04 |  | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | -             | -             | 100 Orang      | 100,000,000.00   | 100 Orang      | 100,000,000.00   | 100 Orang      | 100,000,000.00   | 300 Orang       | 300,000,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.02.<br>1.02    |  | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                    | Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan                                                                    | 4 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 45 Rekomendasi | 15,000,000.00    | 47 Rekomendasi | 16,750,000.00    | 49 Rekomendasi | 19,262,500.00    | 36 Rekomendasi  | 51,012,500.00     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.02.<br>1.02.01 |  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                         | 1 Rekomendasi | -             | 37 Rekomendasi | 5,000,000.00     | 39 Rekomendasi | 5,500,000.00     | 41 Rekomendasi | 6,325,000.00     | 117 Rekomendasi | 16,825,000.00     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |                  |                     |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                  |               |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                    |                          |                              |                  |
|--|------------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
|  |                  | 3.25.02.<br>1.02.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan                     | 1 Rekomendasi    | 1 Rekomendasi | 4 Rekomendasi    | 5,000,000.00            | 4 Rekomendasi    | 5,500,000.00            | 4 Rekomendasi    | 6,325,000.00            | 12 Rekomendasi     | 16,825,000.00            | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |                  | 3.25.02.<br>1.02.03 |  | Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan                          | 1 Rekomendasi    | -             | 4 Rekomendasi    | 5,000,000.00            | 4 Rekomendasi    | 5,750,000.00            | 4 Rekomendasi    | 6,612,500.00            | 12 Rekomendasi     | 17,362,500.00            | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  | 1,831,250,000.00 | 3.25.02.<br>1.03    |  | <b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                                                                                               | <b>Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan</b>                                                  | <b>210 Orang</b> |               | <b>920 Orang</b> | <b>3,548,000,000.00</b> | <b>920 Orang</b> | <b>4,247,900,000.00</b> | <b>660 Orang</b> | <b>5,304,045,000.00</b> | <b>1,980 orang</b> | <b>13,099,945,000.00</b> | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |                  | 3.25.02.<br>1.03.01 |  | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                            | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                            | 70 Orang         | 50 Orang      | 720 Orang        | 3,148,000,000.00        | 720 Orang        | 3,797,900,000.00        | 720 Orang        | 4,754,045,000.00        | 2.160 Orang        | 11,699,945,000.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |                  | 3.25.02.<br>1.03.02 |  | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                            | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 21 Kelompok      | 10 Kelompok   | 10 Kelompok      | 100,000,000.00          | 10 Kelompok      | 100,000,000.00          | 10 Kelompok      | 100,000,000.00          | 30 Kelompok        | 300,000,000.00           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                              |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |                                                                                                                                                             | 3.25.02.<br>1.03.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 25 Kelompok       | 20 Kelompok,     | 10 Kelompok       | 300,000,000.00    | 20 Kelompok       | 350,000,000.00    | 22 Kelompok       | 450,000,000.00    | 52 Kelompok       | 1,100,000,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  | Meningkatnya Produktivitas dan Industriisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 3.25.03             | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                             | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp. 1000)                                                                                                                        | 11.813.500.000 Rp | 9.210.120.000 Rp | 11.933.560.000 Rp | 20,618,000.000.00 | 11.960.232.411 Rp | 30,600,600.000.00 | 11.991.430.000 Rp | 34,323,754,548.00 | 11.991.430.000 Rp | 85,542,354,548.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                   | Jumlah produksi perikanan tangkap                                                                                                                                  | 436.735,72 Ton    | 389.052,4 Ton    | 442.959,6 Ton     | 0.00              | 451.818,7 Ton     | 0.00              | 460.858,1 Ton     | 0.00              | 460.858,1 Ton     | 0.00              |                              |                  |
|  |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                   | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                                                                                                                      | 27,39 %           | 30,25 %          | 29 %              | 0.00              | 30 %              | 0.00              | 31 %              | 0.00              | 31 %              | 0.00              |                              |                  |

|  |  |                 |       |                                                                                             |             |             |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |                              |                  |
|--|--|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |  |                 |       | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan                                              | 29,43 %     | 27,17 %     | 30,62 %     | 0.00             | 31,23 %      | 0.00              | 31,86 %      | 0.00              | 31,86 %      | 0.00              |                              |                  |
|  |  |                 |       | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | 68,42 %     | 78,95%      | 84,21 %     | 0.00             | 89,47 %      | 0.00              | 100 %        | 0.00              | 100 %        | 0.00              |                              |                  |
|  |  | 3.25.03.1.01    |       | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                           | 588 Unit    | 399 Unit    | 207 Unit    | 5,100,000,000.00 | 420 Unit     | 11,100,000,000.00 | 485 Unit     | 12,465,000,000.00 | 1.112 Unit   | 28,665,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  |                 | 55.58 | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah                   | 96 Kelompok | 69 Kelompok | 99 Kelompok | 0.00             | 114 Kelompok | 0.00              | 131 Kelompok | 0.00              | 344 Kelompok | 0.00              |                              |                  |
|  |  | 3.25.03.1.01.01 |       | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                              | -           | -           | 1 Dokumen   | 100,000,000.00   | 1 Dokumen    | 100,000,000.00    | 1 Dokumen    | 115,000,000.00    | 3 Dokumen    | 315,000,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.1.01.02 |       | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                | 9 Unit      | 18 Unit     | 7 Unit      | 1,000,000,000.00 | 20 Unit      | 5,000,000,000.00  | 25 Unit      | 5,750,000,000.00  | 52 Unit      | 11,750,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |            |            |            |                  |             |                  |             |                  |             |                   |                              |                  |
|--|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.03.<br>1.01.03 |  | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                | 579 Unit   | 381 Unit   | 200 Unit   | 4,000,000,000.00 | 400 Unit    | 6,000,000,000.00 | 460 Unit    | 6,600,000,000.00 | 1.060 Unit  | 16,600,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.02    |  | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | -          | 2 Unit     | 50 Unit    | 1,600,000,000.00 | 75 Unit     | 1,760,000,000.00 | 85 Unit     | 2,024,000,000.00 | 210 Unit    | 5,384,000,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  |                     |  |                                                                                                                                                                         | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah                                                                                                               | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 6 Kelompok | 0.00             | 10 Kelompok | 0.00             | 16 Kelompok | 0.00             | 32 Kelompok | 0.00              |                              |                  |
|  |  | 3.25.03.<br>1.02.01 |  | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                                                      | 1 Dokumen  | 0          | 1 Dokumen  | 100,000,000.00   | 1 Dokumen   | 110,000,000.00   | 1 Dokumen   | 126,500,000.00   | 3 Dokumen   | 336,500,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.02.02 |  | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                            | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                                                        | 1 Unit     | 0          | 4 Unit     | 800,000,000.00   | 5 Unit      | 850,000,000.00   | 8 Unit      | 965,000,000.00   | 17 Unit     | 2,615,000,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                       |                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                                     |                  |
|--|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.03.<br>1.02.03 |  | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                            | 1 Unit                | 2 Unit         | 46 Unit               | 700,000,000.00       | 70 Unit               | 800,000,000.00       | 75 Unit               | 932,500,000.00       | 191 Unit              | 2,432,500,000.00      | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.03    |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>        | <b>Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b> | <b>11 Rekomendasi</b> | <b>-</b>       | <b>13 Rekomendasi</b> | <b>39,344,044.00</b> | <b>15 Rekomendasi</b> | <b>66,000,000.00</b> | <b>17 Rekomendasi</b> | <b>75,900,000.00</b> | <b>45 Rekomendasi</b> | <b>181,244,044.00</b> | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                  |
|  |  | 3.25.03.<br>1.03.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT   | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan                                                    | 11 Rekomendasi        | 11 Rekomendasi | 13 Rekomendasi        | 14,344,044.00        | 15 Rekomendasi        | 16,000,000.00        | 17 Rekomendasi        | 18,400,000.00        | 45 Rekomendasi        | 48,744,044.00         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.03.03 |  | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                | -                     | -              | 1 Dokumen             | 25,000,000.00        | 1 Dokumen             | 50,000,000.00        | 1 Dokumen             | 57,500,000.00        | 3 Dokumen             | 132,500,000.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | Sulawesi Selatan |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |               |   |             |               |                |               |                |               |                |               |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.03.1.04    |  | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil                                                                             | Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan | 2 Rekomendasi | - | -           | 0.00          | 10 Rekomendasi | 10,000,000.00 | 12 Rekomendasi | 11,500,000.00 | 22 Rekomendasi | 21,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.03.1.04.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil                                                                 | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan                                                                                        | 2 Rekomendasi | - | -           | 0.00          | 10 Rekomendasi | 10,000,000.00 | 12 Rekomendasi | 11,500,000.00 | 22 Rekomendasi | 21,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.1.05    |  | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan                                                                                                             | 125 Dokumen   | - | 126 Dokumen | 10,000,000.00 | 144 Dokumen    | 15,000,000.00 | 165 Dokumen    | 16,500,000.00 | 435 Dokumen    | 41,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |

|  |  |                 |  |                                                                                                          |                                                                                                                              |                       |                       |                       |                   |                       |                   |                       |                   |                        |                   |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.03.1.05.01 |  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen             | -                     | 1 Dokumen             | 5,000,000.00      | 1 Dokumen             | 5,000,000.00      | 1 Dokumen             | 5,000,000.00      | 3 Dokumen              | 15,000,000.00     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.1.05.02 |  | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                    | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan                                           | 125 Dokumen           | -                     | 125 Dokumen           | 5,000,000.00      | 143 Dokumen           | 10,000,000.00     | 164 Dokumen           | 11,500,000.00     | 432 Dokumen            | 26,500,000.00     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.1.06    |  | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                              | Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                           | 5 Pelabuhan           | 7 Pelabuhan           | 6 Pelabuhan           | 13,818,655,956.00 | 7 Pelabuhan           | 17,554,600,000.00 | 8 Pelabuhan           | 19,621,604,548.00 | 21 Pelabuhan           | 50,994,860,504.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  |                 |  |                                                                                                          | Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola                                                                            | 6 Pelabuhan           | 19 Pelabuhan          | 19 Pelabuhan          | 0.00              | 19 Pelabuhan          | 0.00              | 19 Pelabuhan          | 0.00              | 19 Pelabuhan           | 0.00              |                              |                  |
|  |  | 3.25.03.1.06.01 |  | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                         | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                | 5 Pelabuhan Perikanan | 7 Pelabuhan Perikanan | 6 Pelabuhan Perikanan | 223,000,000.00    | 7 Pelabuhan Perikanan | 256,000,000.00    | 8 Pelabuhan Perikanan | 294,400,000.00    | 21 Pelabuhan Perikanan | 773,400,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.1.06.02 |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                | 6 Unit                | 7 Unit                | 6 Unit                | 13,460,655,956.00 | 7 Unit                | 17,148,600,000.00 | 8 Unit                | 19,154,704,548.00 | 21 Unit                | 49,763,960,504.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                     |               |               |                |                      |                |                      |                |                      |                |                              |                  |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.03.<br>1.06.03 |  | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                      | 17<br>Layanan       | 19<br>Layanan | 19<br>Layanan | 135,000,000.00 | 19<br>Layanan        | 150,000,000.00 | 19<br>Layanan        | 172,500,000.00 | 19<br>Layanan        | 457,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.07    |  | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                           | Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT                                   | 1020<br>Rekomendasi |               | -             | 0.00           | 1.020<br>Rekomendasi | 20,000,000.00  | 1.020<br>Rekomendasi | 23,000,000.00  | 2.040<br>Rekomendasi | 43,000,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.03.<br>1.07.01 |  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | -                   | -             | -             | 0.00           | 1<br>Dokumen         | 10,000,000.00  | 1<br>Dokumen         | 11,500,000.00  | 2<br>Dokumen         | 21,500,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.07.02 |  | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                    | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan                                                                             | 1020<br>Rekomendasi | -             | -             | 0.00           | 1.020<br>Rekomendasi | 10,000,000.00  | 1.020<br>Rekomendasi | 11,500,000.00  | 2.040<br>Rekomendasi | 21,500,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   |                              |                  |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  | dipakai dalam renja | 3.25.03.1.08    | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut Ikan dgn Ukuran Sampai dgn 10 GT di Laut,Sungai,Danau,Waduk,Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2 Rekomendasi | - | 4 Rekomendasi | 10,000,00<br>0.00 | 6 Rekomendasi | 20,000,00<br>0.00 | 8 Rekomendasi | 23,000,00<br>0.00 | 18 Rekomendasi | 53,000,000.<br>00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |                     | 3.25.03.1.08.02 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                | 2 Rekomendasi | - | 4 Rekomendasi | 10,000,00<br>0.00 | 6 Rekomendasi | 20,000,00<br>0.00 | 8 Rekomendasi | 23,000,00<br>0.00 | 18 Rekomendasi | 53,000,000.<br>00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |                     | 3.25.03.1.09    | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                                                                                                       | Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                                                                                      | 10 Laporan    | - | 11 Laporan    | 15,000,00<br>0.00 | 12 Laporan    | 27,500,00<br>0.00 | 14 Laporan    | 31,625,00<br>0.00 | 37 Laporan     | 74,125,000.<br>00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |                       |                   |                       |                   |                       |                   |                        |                   |                                       |                     |
|--|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  |  | 3.25.03.<br>1.09.02 |  | Penerbitan<br>Pendaftaran<br>Kapal<br>Perikanan<br>dengan<br>Ukuran di<br>atas 10 GT<br>sampai<br>dengan 30<br>GT                                                                                                                                                     | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Buku Kapal<br>Perikanan<br>(BKP) yang<br>Diterbitkan                                                                                                                                                                                                          | - | - | 11<br>Rekomen<br>dasi | 15,000,00<br>0.00 | 12<br>Rekom<br>endasi | 27,500,00<br>0.00 | 14<br>Rekom<br>endasi | 31,625,00<br>0.00 | 37<br>Rekom<br>endasi  | 74,125,000.<br>00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan |
|  |  | 3.25.03.<br>1.10    |  | Pendaftaran<br>Kapal<br>Perikanan<br>Berukuran<br>sampai dengan<br>10 GT yang<br>Beroperasi di<br>Laut, Sungai,<br>Danau, Waduk,<br>Rawa, dan<br>Genangan Air<br>Lainnya yang<br>dapat<br>diusahakan<br>Lintas<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah laporan<br>pendaftaran<br>Kapal<br>Perikanan<br>Berukuran<br>Sampai<br>Dengan 10 GT<br>yang<br>Beroperasi di<br>Laut,Sungai,da<br>nau,waduk,Ra<br>wa ,dan<br>Genangan air<br>Lainnya Dapat<br>diusahakan<br>Lintasan<br>Kabupaten/Kot<br>a dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Provinsi | - | - | 61<br>Laporan         | 25,000,00<br>0.00 | 64<br>Lapora<br>n     | 27,500,00<br>0.00 | 68<br>Lapora<br>n     | 31,625,00<br>0.00 | 193<br>Lapora<br>n     | 84,125,000.<br>00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN |                     |
|  |  | 3.25.03.<br>1.10.02 |  | Penerbitan<br>Pendaftaran<br>Kapal<br>Perikanan<br>dengan<br>Ukuran<br>sampai<br>dengan 10<br>GT                                                                                                                                                                      | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Buku Kapal<br>Perikanan<br>(BKP) yang<br>Diterbitkan                                                                                                                                                                                                          | - | - | 61<br>Rekomen<br>dasi | 25,000,00<br>0.00 | 64<br>Rekom<br>endasi | 27,500,00<br>0.00 | 68<br>Rekom<br>endasi | 31,625,00<br>0.00 | 193<br>Rekom<br>endasi | 84,125,000.<br>00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan |

|  |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
|  | Meningkatnya Produktivitas dan Industri sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 3.25.04      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                 | Nilai produksi perikanan budidaya (Rp. 1000)                                                                                                   | 21.712.560.000 Rp | 15.958.390.000 Rp | 21.850.160.000 Rp | 8,068,000,000.00 | 22.187.160.000 Rp | 11,389,500,000.00 | 22.530.900.000 Rp | 12,397,925,000.00 | 22.530.900.000 Rp | 31,855,425,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |
|  |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | Jumlah Produksi perikanan budidaya                                                                                                             | 4.095.934,66 Ton  | 4.298.391,1 Ton   | 4.331.299,7 Ton   | 0.00             | 4.417.925,7 Ton   | 0.00              | 4.506.248,3 Ton   | 0.00              | 4.506.248,3 Ton   | 0.00              |                              |  |
|  |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | Persentase ketersediaan benur berkualitas                                                                                                      | 78,51 %           | 100%              | 85 %              | 0.00             | 90 %              | 0.00              | 95 %              | 0.00              | 95 %              | 0.00              |                              |  |
|  |                                                                                                                                                        | 3.25.04.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | -                 | -                 | 101 Rekomendasi   | 50,000,000.00    | 101 Rekomendasi   | 53,500,000.00     | 101 Rekomendasi   | 61,525,000.00     | 303 Rekomendasi   | 165,025,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |   |   |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                                     |                  |
|--|--|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.04.1.01.01 |  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                  | - | - | 50 Rekomendasi         | 5,000,000.00         | 50 Rekomendasi         | 5,000,000.00         | 50 Rekomendasi         | 5,750,000.00         | 150 Rekomendasi        | 15,750,000.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.01.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                          | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                        | - | - | 50 Rekomendasi         | 10,000,000.00        | 50 Rekomendasi         | 10,000,000.00        | 50 Rekomendasi         | 11,500,000.00        | 150 Rekomendasi        | 31,500,000.00        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.01.03 |  | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                     | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko                                                                               | - | - | 1 Dokumen              | 35,000,000.00        | 1 Dokumen              | 38,500,000.00        | 1 Dokumen              | 44,275,000.00        | 3 Dokumen              | 117,775,000.00       | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.02    |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b> | <b>Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b> | - | - | <b>100 Rekomendasi</b> | <b>20,000,000.00</b> | <b>102 Rekomendasi</b> | <b>22,000,000.00</b> | <b>104 Rekomendasi</b> | <b>25,300,000.00</b> | <b>306 Rekomendasi</b> | <b>67,300,000.00</b> | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                  |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.04.1.02.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                               | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                                             | - | - | 100 Rekomendasi | 20,000,000.00 | 102 Rekomendasi | 22,000,000.00 | 104 Rekomendasi | 25,300,000.00 | 306 Rekomendasi | 67,300,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.03    |  | Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan | - | - | 2 Rekomendasi   | 20,000,000.00 | 4 Rekomendasi   | 22,000,000.00 | 6 Rekomendasi   | 25,300,000.00 | 12 Rekomendasi  | 67,300,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.04.1.03.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT                                                                                                 | Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan                                                                                                          | - | - | 2 Rekomendasi   | 20,000,000.00 | 4 Rekomendasi   | 22,000,000.00 | 6 Rekomendasi   | 25,300,000.00 | 12 Rekomendasi  | 67,300,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |          |   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                    |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.04.1.04    |  | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi | -        | - | 10 Laporan     | 20,000,00 0.00    | 12 Lapora n    | 22,000,00 0.00    | 14 Lapora n    | 25,300,00 0.00    | 36 Lapora n    | 67,300,000. 00     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.04.1.04.02 |  | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi    | -        | - | 10 Rekomendasi | 20,000,00 0.00    | 12 Rekomendasi | 22,000,00 0.00    | 14 Rekomendasi | 25,300,00 0.00    | 36 Rekomendasi | 67,300,000. 00     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.05    |  | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                               | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                     | 383 Unit |   | 301 Unit       | 3,558,000, 000.00 | 567 Unit       | 3,820,000 ,000.00 | 684 Unit       | 4,460,500, 000.00 | 2.174 Unit     | 11,838,500, 000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  |                 |  |                                                                                                                                      | Jumlah pembudidaya di kawasan konservasi dan laut yang dibina dan dipantau                                                             | 70 Orang |   | 40 Orang       | 0.00              | 50 Orang       | 0.00              | 60 Orang       | 0.00              | 150 Orang      | 0.00               |                              |                  |
|  |  | 3.25.04.1.05.01 |  | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  | -        |   | 1 Dokumen      | 25,000,00 0.00    | 1 Dokum en     | 100,000,0 00.00   | 1 Dokum en     | 115,000,0 00.00   | 3 Dokum en     | 240,000,000 .00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                 |  |                                                                                                                             |                                                                              |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.04.1.05.02 |  | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                  | 382 Unit        | 565 Paket       | 540 Unit        | 3,200,000,000.00 | 568 Unit        | 3,340,000,000.00 | 683 Unit        | 3,916,000,000.00 | 1.791 Unit      | 10,456,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.05.04 |  | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                     | 1 Unit          | 1 Unit          | 1 Unit          | 200,000,000.00   | 1 Unit          | 220,000,000.00   | 1 Unit          | 253,000,000.00   | 3 Unit          | 673,000,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.05.06 |  | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                           | 13 Dokumen      | 284 Dokumen     | 284 Dokumen     | 93,000,000.00    | 284 Dokumen     | 100,000,000.00   | 284 Dokumen     | 107,500,000.00   | 35 Dokumen      | 300,500,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.05.07 |  | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya                                                           | 70 Orang        | 30 Orang        | 40 Orang        | 40,000,000.00    | 60 Orang        | 60,000,000.00    | 70 Orang        | 69,000,000.00    | 170 Orang       | 169,000,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.1.06    |  | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                            | Jumlah areal pengelolaan pembudidayaan ikan                                  | 1150 Hektar     | -               | 100 Hektar      | 4,400,000,000.00 | 100 Hektar      | 7,450,000,000.00 | 100 Hektar      | 7,800,000,000.00 | 300 Hektar      | 19,650,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  |                 |  |                                                                                                                             | Jumlah produksi nener / benur yang berkualitas                               | 17.272.000 Ekor | 10.000.000 Ekor | 18.700.000 Ekor | 0.00             | 19.800.000 Ekor | 0.00             | 20.900.000 Ekor | 0.00             | 20.900.000 Ekor | 0.00              |                              |                  |
|  |  |                 |  |                                                                                                                             | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat | 115 Unit        | 35 Unit         | 129 Unit        | 0.00             | 152 Unit        | 0.00             | 158 Unit        | 0.00             | 605 Unit        | 0.00              |                              |                  |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |         |          |                  |          |                  |          |                  |          |                   |                              |                  |
|--|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.04.<br>1.06.01 |  | <b>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit   | 33 Unit | 20 Unit  | 1,950,000,000.00 | 37 Unit  | 3,550,000,000.00 | 38 Unit  | 3,690,000,000.00 | 95 Unit  | 9,190,000,000.00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.04.<br>1.06.02 |  | <b>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</b>    | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | 115 Unit | 2 Unit  | 107 Unit | 2,450,000,000.00 | 115 Unit | 3,900,000,000.00 | 120 Unit | 4,110,000,000.00 | 510 Unit | 10,460,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |                                                             |                 |                                                                                   |                                                                                                        |             |            |              |                  |              |                  |              |                  |              |                   |                              |                  |
|--|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|  | Meningkatnya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan | 3.25.05         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                             | Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                                                   | 100 %       | 100%       | 100 %        | 3,345,695,000.00 | 100 %        | 3,821,000,000.00 | 100 %        | 4,400,150,000.00 | 100 %        | 11,566,845,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |                                                             | 3.25.05.1.01    | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil                 | 9 Dokumen   | 9 Dokumen  | 1424 Dokumen | 3,255,695,000.00 | 1424 Dokumen | 3,671,000,000.00 | 1424 Dokumen | 4,201,650,000.00 | 3162 Dokumen | 11,128,345,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |                                                             |                 |                                                                                   | Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)                            | 14 Kelompok | 7 Kelompok | 13 Kelompok  | 0.00             | 13 Kelompok  | 0.00             | 13 Kelompok  | 0.00             | 39 Kelompok  | 0.00              |                              |                  |
|  |                                                             | 3.25.05.1.01.01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 12 Dokumen   | 60,000,000.00    | 12 Dokumen   | 66,000,000.00    | 12 Dokumen   | 75,900,000.00    | 36 Dokumen   | 201,900,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |                                                             | 3.25.05.1.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                           | 7 Dokumen   | 7 Dokumen  | 1400 Dokumen | 3,080,000,000.00 | 1400 Dokumen | 3,425,000,000.00 | 1400 Dokumen | 3,908,250,000.00 | 4200 Dokumen | 10,413,250,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |                                                             | 3.25.05.1.01.03 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 12 Dokumen   | 45,000,000.00    | 12 Dokumen   | 80,000,000.00    | 12 Dokumen   | 87,500,000.00    | 36 Dokumen   | 212,500,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |               |                 |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |             |               |             |                |             |                |             |                |                              |                  |
|--|---------------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|------------------|
|  | 45,695,000.00 | 3.25.05.1.01.04 |  | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                      | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif                                                                                                                                                          | 14 Kelompok | 7 Kelompok | 13 Kelompok | 70,695,000.00 | 13 Kelompok | 100,000,000.00 | 13 Kelompok | 130,000,000.00 | 39 Kelompok | 300,695,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |               | 3.25.05.1.02    |  | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                               | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                  | 8 Dokumen   | 3 Dokumen  | 26 Dokumen  | 90,000,000.00 | 26 Dokumen  | 150,000,000.00 | 26 Dokumen  | 198,500,000.00 | 78 Dokumen  | 438,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |               | 3.25.05.1.02.01 |  | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 6 Dokumen   | 25,000,000.00 | 6 Dokumen   | 50,000,000.00  | 6 Dokumen   | 67,500,000.00  | 18 Dokumen  | 142,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |               |                   |               |                   |               |                   |               |                    |                                       |                     |
|--|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  |  | 3.25.05.<br>1.02.02 |  | <b>Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya</b> | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 3<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 6<br>Dokumen  | 30,000,00<br>0.00 | 6<br>Dokumen  | 50,000,00<br>0.00 | 6<br>Dokumen  | 63,500,00<br>0.00 | 18<br>Dokumen | 143,500,000<br>.00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan |
|  |  | 3.25.05.<br>1.02.03 |  | <b>Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                       | 4<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 14<br>Dokumen | 35,000,00<br>0.00 | 14<br>Dokumen | 50,000,00<br>0.00 | 14<br>Dokumen | 67,500,00<br>0.00 | 42<br>Dokumen | 152,500,000<br>.00 | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan |

|  |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|
|  | Meningkatnya Produktivitas dan Industri sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 3.25.06      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                           | Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp.1000)                                                                                              | 355.500.000 Rp. | 317.280.000 Rp. | 391.940.000 Rp  | 1,680,000,000.00 | 411.540.000 Rp  | 2,815,000,000.00 | 432.110.000 Rp  | 3,237,250,000.00 | 432.110.000 Rp  | 7,732,250,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |
|  |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                            | Produksi olahan ikan                                                                                                                                | 5.911,6 Ton     | 5.544,1 Ton     | 6.150,43 Ton    | 0.00             | 6.273,44 Ton    | 0.00             | 6.398,91 Ton    | 0.00             | 6.398,91 Ton    | 0.00             |                              |  |
|  |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                            | Persentase pengujian mutu produk perikanan                                                                                                          | 69.050 %        | 100%            | 100 %           | 0.00             | 100 %           | 0.00             | 100 %           | 0.00             | 100 %           | 0.00             |                              |  |
|  |                                                                                                                                                        | 3.25.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan | 189             | 195 Rekomendasi | 120 Rekomendasi | 50,000,000.00    | 138 Rekomendasi | 55,000,000.00    | 159 Rekomendasi | 63,250,000.00    | 417 Rekomendasi | 168,250,000.00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |               |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.06.1.01.02 |  | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi            | 189           | 195 Rekomendasi | 120 Rekomendasi | 25,000,000.00    | 138 Rekomendasi | 27,500,000.00    | 159 Rekomendasi | 31,625,000.00    | 417 Rekomendasi | 84,125,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.06.1.01.03 |  | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | -             | -               | 1 Dokumen       | 25,000,000.00    | 1 Dokumen       | 27,500,000.00    | 1 Dokumen       | 31,625,000.00    | 3 Dokumen       | 84,125,000.00    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.06.1.02    |  | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                 | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdaya saing                                                                                 | 70 Unit Usaha | 3 Unit Usaha    | 120 Unit Usaha  | 1,500,000,000.00 | 138 Unit Usaha  | 2,550,000,000.00 | 159 Unit Usaha  | 2,932,500,000.00 | 417 Unit Usaha  | 6,982,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |

|  |  |                 |  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |                |                |                       |                |                       |                |                |                  |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  |  |                 |  |                                                                                                                           | <b>Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>                                                                                   | 100 Unit Usaha | 130 Unit Usaha      | 144 Unit Usaha | <b>0.00</b>    | <b>117 Unit Usaha</b> | <b>0.00</b>    | <b>120 Unit Usaha</b> | <b>0.00</b>    | 352 Unit Usaha | <b>0.00</b>      |                              |                  |
|  |  | 3.25.06.1.02.01 |  | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 70 Unit Usaha  | <b>3 Unit Usaha</b> | 120 Unit Usaha | 500,000,000.00 | 138 Unit Usaha        | 550,000,000.00 | 159 Unit Usaha        | 632,500,000.00 | 417 Unit Usaha | 1,682,500,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                              |                  |
|--|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  |  | 3.25.06.1.02.02 |  | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 100 Unit Usaha | 130 Unit Usaha | 144 Unit Usaha | 1,000,000,000.00 | 144 Unit Usaha | 2,000,000,000.00 | 144 Unit Usaha | 2,300,000,000.00 | 432 Unit Usaha | 5,300,000,000.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |
|  |  | 3.25.06.1.03    |  | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                     | <b>Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan</b>                                                                                                                             | -              | 2 Laporan      | 2 Laporan      | 130,000,000.00   | 2 Laporan      | 210,000,000.00   | 2 Laporan      | 241,500,000.00   | 6 Laporan      | 581,500,000.00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                  |
|  |  | 3.25.06.1.03.01 |  | Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                | -              | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 30,000,000.00    | 1 Dokumen      | 100,000,000.00   | 1 Dokumen      | 115,000,000.00   | 3 Dokumen      | 245,000,000.00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Sulawesi Selatan |

|  |  |                     |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |   |                  |              |                       |                  |                       |                  |                        |                  |                        |                                       |                     |
|--|--|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  |  | 3.25.06.<br>1.03.03 |  | Pengembang<br>an Sistem<br>Informasi<br>Manajemen<br>Logistik Ikan<br>Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota dalam 1<br>(Satu)<br>Daerah<br>Provinsi | Jumlah Data<br>dan Informasi<br>yang<br>Diintegrasikan<br>ke dalam Sistem<br>Informasi<br>Manajemen<br>Logistik Ikan<br>dan Terkoneksi<br>dari Hulu<br>sampai Hilir | - | 1<br>Dokume<br>n | 1<br>Dokumen | 100,000,0<br>00.00    | 1<br>Dokum<br>en | 110,000,0<br>00.00    | 1<br>Dokum<br>en | 126,500,0<br>00.00     | 3<br>Dokum<br>en | 336,500,000<br>.00     | DINAS<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Sulawesi<br>Selatan |
|  |  |                     |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |   |                  |              | 77,829,69<br>4,713.00 |                  | 98,829,69<br>4,713.00 |                  | 108,829,6<br>94,713.00 |                  | 285.489.084<br>.139.00 |                                       |                     |

A fisherman in a brown jacket and dark pants is standing on a small, narrow boat, pulling a large net filled with fish. The net is blue and is being pulled from the water. The fish are small and silvery, and are densely packed in the net. The background shows a body of water and a distant shoreline. The text "BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN" is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

**BAB VII**  
**KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 adapun kinerja penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci.

##### 7.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2024-2026**

| No           | Sasaran Strategis dan Indikator                           | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan | Target Capaian Setiap Tahun |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perubahan | Formulasi             | Pengukuran Sumber Data |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|              |                                                           | Tahun 2022                                        | Tahun 2024                  | Tahun 2025  | Tahun 2026                                         |                       |                        |
| (1)          | (2)                                                       | (3)                                               | (7)                         | (8)         | (9)                                                |                       |                        |
| <b>SS1.1</b> | Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel |                                                   |                             |             |                                                    |                       |                        |
| 1            | Nilai Saki Perangkat Daerah (%)                           | 85,8 (A)                                          | 86 - 88 (A)                 | 88 - 90 (A) | 90 – 92 (AA)                                       | Lembar Hasil Evaluasi | Permenpan              |

| No           | Sasaran Strategis dan Indikator                                                                 | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan | Target Capaian Setiap Tahun |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perubahan | Formulasi                                                                                                                  | Pengukuran Sumber Data |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                 | Tahun 2022                                        | Tahun 2024                  | Tahun 2025  | Tahun 2026                                         |                                                                                                                            |                        |
| (1)          | (2)                                                                                             | (3)                                               | (7)                         | (8)         | (9)                                                |                                                                                                                            |                        |
| <b>SS2.1</b> | Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan |                                                   |                             |             |                                                    |                                                                                                                            |                        |
| 1            | Produksi Perikanan (ton)                                                                        | 4.535.835,4                                       | 4.779.259,3                 | 4.875.744,5 | 4.974.039,4                                        | Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya)                                            | BPS                    |
| 2            | Kontribusi PDRB Perikanan (%)                                                                   | 9,4                                               | 10,5                        | 10,82       | 11,14                                              | (PDRB perikanan/PDRB Daerah)x100%                                                                                          | DKP                    |
| 3            | Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulsel (%)                                    | 22,39                                             | 22,55                       | 22,94       | 23,94                                              | (Jumlah ekspor hasil perikanan (ton)/Jumlah Ekspor Daerah (ton)) x 100%                                                    | DKP                    |
| 4            | Konsumsi Ikan (kg/kap/th)                                                                       | 69,50                                             | 72,48                       | 73,93       | 75,41                                              | AKI = A + B + C<br>dimana<br>A = Konsumsi di rumah Tangga<br>B = Konsumsi Luar Rumah Tangga<br>C = Konsumsi Tidak Tercatat | BPS                    |
| <b>SS2.2</b> | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan                       |                                                   |                             |             |                                                    |                                                                                                                            |                        |
| 1            | Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)                                                              | 109,33                                            | 110,84                      | 111,95      | 112,36                                             | (Indeks yang diterima usaha perikanan/indeks yang dibayar usaha perikanan)x100%                                            | BPS                    |
| 2            | Nilai Tukar nelayan (NTN)                                                                       | 109,29                                            | 110,46                      | 111,01      | 111,56                                             | (Indeks yang diterima nelayan/indeks yang dibayar nelayan)x100%                                                            | BPS                    |
| 3            | Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)                                                                  | 109,98                                            | 111,07                      | 111,63      | 112,19                                             | (Indeks yang diterima pembudidaya/indeks yang dibayar usaha pembudidaya)x100%                                              | BPS                    |
| <b>SS3.1</b> | Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan              |                                                   |                             |             |                                                    |                                                                                                                            |                        |
| 1            | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)                                               | 94,01                                             | 97,78                       | 99,7        | 100                                                |                                                                                                                            | DKP                    |
| 2            | Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)                               | 67,29                                             | 96,08                       | 96,78       | 99,67                                              | (Luas Kawasan konservasi yang dikelola / Total target luas kawasan konservasi perairan) x100                               | DKP                    |
| 3            | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)                        | 58,72                                             | 59,56                       | 60,75       | 61,96                                              | (Jumlah Tangkapan Ikan 80% dari tangkapan maksimum Lestari) x100                                                           | DKP                    |

#### **7.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah 2024 - 2026. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan Bab IX RPD 2024-2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.2**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026**

| N<br>o                        | IKK<br>Outcome                                                                                                                     | Satua<br>n | Capaian<br>2022 | Target<br>2024 | Target<br>2025 | Target<br>2026 | N<br>o | IKK Output                                                                                 | Satuan | Capaian<br>2022 | Target<br>2024 | Target<br>2025 | Target<br>2026                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URUSAN PILIHAN</b>         |                                                                                                                                    |            |                 |                |                |                |        |                                                                                            |        |                 |                |                |                                                                                                                                           |
| <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                                                                                                                                    |            |                 |                |                |                |        |                                                                                            |        |                 |                |                |                                                                                                                                           |
| I                             | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Ton        | 4,535.835,4     | 4,779.259,3    | 4,875.744,5    | 4.974.039,4    | 1)     | Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber dayanya (WPP) | WPP    | 713             | 713            | 713            | 713                                                                                                                                       |
|                               |                                                                                                                                    |            |                 |                |                |                | 2)     | Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT              | SIUP   | 444             | 500            | 600            | Fasilitasi untuk NIB dan Rekomendasi untuk perizinan sektor perikanan yang kewenangannya di limpahkan ke pusat sesuai UU No. 2 Tahun 2022 |
|                               |                                                                                                                                    |            |                 |                |                |                | 3)     | Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar                                       | %      | 68,4            | 84.21%         | 89.73%         | 95.25%                                                                                                                                    |

|   |                                                                                            |   |       |       |       |       |    |                                                                                                                                       |            |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                            |   |       |       |       |       |    | operasional                                                                                                                           |            |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
|   |                                                                                            |   |       |       |       |       | 4) | Jumlah izin/pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT                                   | Izin       | SIUP = 444 unit kapal 10-30 GT;<br>BPKP = 552 unit kapal >5-10 GT | PPKP = 1030 unit kapal 5-10 GT;<br>BPKP = 650 unit kapal >5-10 GT | PPKP = 1060 unit kapal 5-10 GT;<br>BPKP = 680 unit kapal >5-10 GT | PPKP = 1090 unit kapal 5-10 GT;<br>BPKP = 910 unit kapal >5-10 GT |
|   |                                                                                            |   |       |       |       |       | 5) | Jumlah kapal yang+G12 terdaftar                                                                                                       | Unit Kapal | 1,020                                                             | 1030                                                              | 1060                                                              | 1090                                                              |
|   |                                                                                            |   |       |       |       |       | 6) | Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan | Izin Usaha | 26                                                                | 50                                                                | 55                                                                | 60                                                                |
| 2 | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | % | 94,01 | 94.25 | 95.85 | 97.55 | 1) | Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku                               | %          | 6,13                                                              | 8.65                                                              | 8.80                                                              | 9.05                                                              |
|   |                                                                                            |   |       |       |       |       | 2) | Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang                                          | %          | 71.43                                                             | 75,50                                                             | 78,75                                                             | 83.85                                                             |

|  |  |  |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                              |            |     |     |             |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  | dikelola |                                                                                                                                                                              |            |     |     |             |
|  |  |  |  |  |  |  | 3)       | Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku                                                      | Unit       | 403 | 900 | 1.000 1.100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4)       | Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan               | Izin Usaha | 5   | 11  | 15 18       |
|  |  |  |  |  |  |  | 5)       | Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan | Izin Usaha | 9   | 20  | 35 50       |

|  |  |  |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                              |            |    |    |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|---------|
|  |  |  |  |  |  |  | perundangan yang berlaku |                                                                                                                                                                                              |            |    |    |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 6)                       | Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku |            | 9  | 13 | 25 37   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7)                       | Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP                                                                                                                                  | POKMASWAS  | 75 | 95 | 100 105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8)                       | Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan                                                                   | Izin Usaha | 3  | 14 | 20 26   |

Tabel 7.3  
Indikator Kinerja Program  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

| KODE |   |   | BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>AN DAN<br>PROGRAM<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUN<br>AN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME<br>)                                                  | SATUAN | KONDISI<br>KINERJA AWAL<br>RPD (TAHUN<br>2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |            |            |            |                                             |
|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|      |   |   |                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                | Tahun 2023                                    | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Kinerja<br>pada Akhir<br>Priode RPD |
|      |   |   |                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                | Target                                        | Target     | Target     | Target     | Target                                      |
| 3    | 2 | 1 | Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan                                                  |                                                                                                   |        |                                                |                                               |            |            |            |                                             |
| 3    | 2 | 0 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KELAUTAN,<br>PESISIR DAN<br>PULAU-<br>PULAU KECIL         | Perluasan<br>kawasan<br>konservasi<br>perairan<br>yang<br>dikelola<br>secara<br>berkelanjut<br>an | Ha     | 569,269.53                                     | 569,269.53                                    | 816,593.22 | 822,559.65 | 847,122.40 | 847,122.40                                  |
|      |   |   |                                                                                     | Jumlah<br>produksi<br>garam<br>rakyat                                                             | Ton    | 3,387.78                                       | 4,845                                         | 5,000      | 6,000      | 6,900      | 6,900                                       |

|   |   |   |                                       |                                                                                             |     |                      |                       |                    |                    |                    |                    |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |   |   |                                       | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan                            | %   | 18                   | 18                    | 20                 | 20                 | 24                 | 100                |
| 3 | 2 | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Nilai Produksi Perikanan Tangkap                                                            | Rp. | 11,813,500,000,000.0 | 11,911,300,000,000.00 | 11,933,560,000,000 | 11,960,232,411,000 | 11,991,430,000,000 | 11,991,430,000,000 |
|   |   |   |                                       | Jumlah produksi perikanan tangkap                                                           | Ton | 436,735.72           | 439,274.10            | 442,959.60         | 451,818.70         | 460,858.10         | 460,858.10         |
|   |   |   |                                       | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                                               | %   | 27.39                | 28                    | 29                 | 30                 | 31                 | 31                 |
|   |   |   |                                       | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan                                              | %   | 29.43                | 30.02                 | 30.62              | 31.23              | 31.86              | 31.86              |
|   |   |   |                                       | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | %   | 68.42                | 73.68                 | 84.21              | 89.47              | 100.0              | 100.0              |

|   |   |   |                                                                     |                                                                                                                         |     |                    |                       |                    |                      |                      |                      |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | 2 | 0 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA                     | Nilai<br>produksi<br>perikanan<br>budidaya                                                                              | Rp. | 21,712,560,000,000 | 21,819,765,780,700.00 | 21,850,160,000,000 | 22,187,160,000,000.0 | 22,530,900,000,000.0 | 22,530,900,000,000.0 |
|   |   |   |                                                                     | Jumlah<br>Produksi<br>perikanan<br>budidaya                                                                             | Ton | 4,095,934.66       | 4,246,372.30          | 4,331,299.7        | 4,417,925.7          | 4,506,248.3          | 4,506,248.3          |
|   |   |   |                                                                     | Persentase<br>ketersediaan<br>benur<br>berkualitas                                                                      | %   | 78.51              | 80                    | 85                 | 90                   | 95                   | 95                   |
| 3 | 2 | 0 | PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>SUMBERDAYA<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN | Persentase<br>Kepatuhan<br>Pelaku<br>usaha KP<br>terhadap<br>ketentuan<br>peraturan<br>perundang-<br>an yang<br>berlaku | %   | 94.01              | 94.24                 | 97.80              | 99.70                | 100.00               | 100.00               |
| 3 | 2 | 0 | PROGRAM<br>PENGOLAHAN<br>DAN<br>PEMASARAN<br>HASIL<br>PERIKANAN     | Nilai<br>produksi<br>ikan<br>konsumsi<br>yang<br>dipasarkan                                                             | Rp. | 355,500,000,000.0  | 373,280,000,000.00    | 391,940,000,000.00 | 411,540,000,000.00   | 432,110,000,000.00   | 432,110,000,000.00   |
|   |   |   |                                                                     | Produksi<br>olahan ikan                                                                                                 | Ton | 5,911.60           | 6,029.83              | 6,150.43           | 6,273.44             | 6,398.91             | 6,398.91             |

|   |  |  |                                              |                                                                    |            |        |       |       |       |       |       |
|---|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |  |                                              | Persentase pengujian mutu produk perikanan                         | %          | 69.05% | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| X |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah                           | Nilai      | 99.47  | 99.50 | 99.55 | 99.60 | 99.65 | 99.65 |
| X |  |  |                                              | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah | Nilai      | 97.5   | 95.0  | 95    | 97    | 98    | 98    |
| X |  |  |                                              | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti                 | Persentase | 73.1   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

### **7.1.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)**

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.4  
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan,  
Mengacu pada RPJMD 2024-2026

| Kode Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target/Indikator                                                                                                                 | Sumber Data                  | Satuan              | Realisasi 2022 | Target |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                     |                | 2024   | 2025   | 2026   |
| TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                              |                     |                |        |        |        |
| TARGET 14.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. |                                                                                                                                  |                              |                     |                |        |        |        |
| 14.6.1.(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase kepatuhan pelaku usaha                                                                                                | Dinas kelautan dan perikanan | %                   | 86,88          | 87,48  | 88,73  | 89,95  |
| TARGET 14.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                              |                     |                |        |        |        |
| 14.b.1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil | Dinas kelautan dan perikanan | Regulasi/ Kebijakan | 1              | 1      | 1      | 1      |
| 14.b.1.(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan                                                                | Dinas kelautan dan perikanan | Kab/ Kota           | 19             | 19     | 19     | 19     |
| 14.b.1.(b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah nelayan yang terlindungi.                                                                                                 | Dinas kelautan dan perikanan | Nelayan             | 11,800         | 11,820 | 11,840 | 11,860 |

A close-up photograph of a hand holding a large, dark, segmented shrimp. The shrimp is positioned diagonally across the frame, with its head towards the top left and its tail towards the bottom right. The hand is visible on the right side, holding the shrimp by its tail. In the background, a pink mesh basket is partially visible. The shrimp has a dark, almost black, segmented body with some lighter, yellowish-green markings on its legs and antennae. The overall image has a slightly tilted perspective.

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah mengalami pergeseren kebijakan baik nasional maupun daerah yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan dari tahun 2024-2026.

Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan mengikuti paradigma pergeseren kebijakan. Dengan demikian Renstra Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

